

■ PENYUSUN

SYAFA'ATUN KARIADI
WILLY PURNA SAMADHI

■ PENYUNTING

SALEH ABDULLAH
ROEM TOPATIMASANG

BLOK **POLITI** **DEMOKRATI**

PANDUAN PELATIHAN |  **demos**

BLOK POLITIK DEMOKRATIK
Paduan Pelatihan

Penyusun: Syafa'atun Kariadi, Willy Purna Samadhi
Penyunting: Saleh Abdullah, Roem Topatimasang

Tata-letak: Rumah Perdikan
Rancang-sampul & foto-foto: Beta Pettawaranie
Gambar-gambar: Mail Sukribo

Diterbitkan pertama kali oleh:
DEMOS, Lembaga Kajian Demokrasi & Hak Asasi
Jalan Cikini IV No.10, Gedung Griya Upakara Lt.3, Unit 3
Jakarta 10330
Tel. +62 21 39899777, Fax. +62 21 3147897
email: office@demos.or.id, website: www.demosindonesia.org

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Perpustakaan Nasional - Katalog Dalam Terbitan (KDT)

BLOK POLITIK DEMOKRATIK: Panduan Pelatihan/Penyusun: Syafa'atun Kariadi
& Willy Purna Samadhi/Penyunting: Saleh Abdullah & Roem Topatimasang —
Jakarta: DEMOS, 2008
118 halaman, 17 x 24 cm

1. Demokrasi
 2. Representasi Politik
 3. Pendidikan Politik
- I. JUDUL

Cetakan Pertama, Desember 2008

Dicetak oleh:
INSISTPress
Jalan Ganesha II/09
Muja-muju, Yogyakarta 55165
Tel/Fax: +62 274 556433

daftar isi

PENDAHULUAN h.5 - 18

■ Latar belakang & Tujuan Panduan ■
Sasaran Pengguna Utama ■ Pokok-pokok
Bahasan & Sistematika ■ Kerangka Dasar
Metodologi Pelatihan ■ Petunjuk Praktis
Penggunaan Panduan

MODUL-1 h.19 - 76

■ Konsep (Pengertian & Prinsip Dasar)
Blok Politik Demokratik ■ Konteks (Alasan
& Manfaat) Pembentukan Blok Politik
Demokratik ■ Langkah-langkah Pokok
Pembentukan Blok Politik Demokratik

MODUL-2 h.77 - 104

■ Pemetaan Kekuatan Politik Lokal ■
Analisis Kekuatan Politik Lokal

MODUL-3 h.105 - 115

■ Membentuk Kelompok Pemrakarsa &
Kelompok Kerja Blok Politik Demokratik ■
Rencana Tindak-lanjut & Evaluasi
Pelatihan

PUSTAKA h.117

CAKRAM DIGITAL sampul dalam belakang

pendahuluan

Satu survei tahun 2007 yang dilakukan DEMOS — Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi yang berkedudukan di Jakarta— menyimpulkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia rapuh. Gejala itu ditandai terutama oleh menurunnya kadar berbagai kebebasan dasar, serta masih rendahnya mutu representasi dan partisipasi politik masyarakat. Kendati secara umum situasi demokrasi saat itu lebih baik dibandingkan situasi sebelumnya¹ — yang terutama didorong oleh membaiknya beberapa aspek tata-kelola pemerintahan (*good governance*) dan penerapan hukum (*rule of law*)— namun data yang diperoleh pada survei tersebut jelas memperlihatkan bahwa aspek-aspek paling mendasar dari demokrasi —yakni representasi dan partisipasi masyarakat sipil— masih tetap dalam keadaan buruk, sementara kebebasan sipil dan politik mulai menurun.² Demokratisasi, jika pun terus berlangsung, tak ditopang oleh landas-pijak yang kuat.

¹ Pada tahun 2003-2004, DEMOS telah melakukan survei serupa. Hasilnya bisa dilihat dalam: Priyono, A.E., Willy Purna Samadhi, Olle Törnquist, *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta-Yogyakarta: PCD Press, 2007).

² Lihat: 'Laporan Awal dan Ringkasan Eksekutif Resurvei 2007' (Jakarta: DEMOS, 2007). Naskah laporan bisa diunduh di situs DEMOS: <www.demosindonesia.org>

Salah satu kesimpulan yang kelihatannya tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan dengan hasil survei nasional sebelumnya (2003-2004) adalah **masih buruknya representasi politik**. Dengan kata lain, seluruh perjuangan dan proyek untuk memajukan reformasi sistem politik nasional, khususnya sejak kejatuhan Soeharto dari tampuk kekuasaan pada tahun 1998, sejauh ini hanya melahirkan demokrasi tanpa representasi, suatu ‘representasi semu’. Dengan kata lain, demokrasi yang sejati — merujuk pada artinya yang paling mendasar, yakni pengendalian (kontrol) rakyat atas urusan-urusan publik berlandaskan kesetaraan politik³— ternyata masih ‘jauh panggang dari api’.

Padahal, upaya untuk ‘menjadikan demokrasi yang bermakna’ (*making democracy meaningful*) tidaklah mesti selalu sempurna, namun tetap harus fungsional dan cukup substansial bagi kebanyakan warga negara, agar benar-benar penad (*relevant*) bagi mereka dalam mengendalikan dan mempengaruhi apa yang mereka anggap sebagai urusan bersama.

Sampai di sini, ada baiknya kita bertanya: Apa sebetulnya yang sudah dilakukan selama ini oleh para pelaku pro-demokrasi dalam upaya mereka memajukan dan membangun proses demokrasi di Indonesia? Apa hambatan dan peluangnya dalam mendorong dan meningkatkan representasi politik yang lebih mencerminkan mutu demokrasi yang lebih baik?

Merujuk kepada upaya perbaikan mutu demokrasi selama ini, sedikitnya ada tiga model yang sudah dikembangkan dan dijalankan, sebagai berikut:

(1) **Rekayasa elitis**, khususnya yang terpusat pada upaya-upaya memperbaiki pengelolaan partai politik dan sistem kepartaian. Ini sangat terlihat dari upaya berbagai organisasi non pemerintah (ORNOP) lokal maupun luar negeri —juga lembaga-lembaga internasional seperti Program Pembangunan PBB (UNDP) dan Bank

³ Lihat: D. Beetham, S. Bracking, L. Kearton, dan S. Weir (eds)., *International IDEA Handbook and Democracy Assessment* (The Hague: Kluwer Law International, 2002).

Dunia— yang memiliki kepedulian memajukan berbagai perangkat demokrasi di Indonesia yang berkaitan, antara lain, dengan pemilihan umum, partai politik, serta reformasi undang-undang dan peraturan.

(2) **Reformasi kepartaian**, yakni dengan cara bergabung ke dalam partai-partai politik yang sudah ada —baik partai-partai besar maupun yang gurem— atau membangun partai politik baru sama sekali. Cara *go politics* ini banyak ditempuh oleh para aktivis organisasi non pemerintah (ORNOP) dan mahasiswa, secara perseorangan maupun kelompok. Tujuan mereka adalah untuk ikut mewarnai proses-proses politik, bahkan sampai ke aras pembuatan kebijakan publik. Selain itu —juga digerakkan oleh para aktivis ORNOP dan organisasi-organisasi rakyat— ada upaya untuk mendirikan partai politik sendiri. Dengan kata lain, ada upaya transformasi politik mengubah kelompok-kelompok dampingan mereka selama ini —yang berbasis komunal atau kolektif— menjadi kelompok pemilih (*voters*) —yang lebih berbasis pribadi perseorangan sebagai warga negara.

(3) **Mendorong partisipasi warga secara langsung** bertolak dari kepentingan-kepentingan bersama yang khas. Model yang semula dianjurkan oleh Bank Dunia ini, pada dasarnya, dimaksudkan untuk mengisi kekurangan ruang partisipasi melalui partai politik dalam mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan publik di tingkat lokal. Upaya ini terutama memang bertumpu pada komunitas lokal, yakni dengan menganjurkan proses-proses ‘demokrasi *deliberatif*’.

Pada kenyataannya, ketiga model tersebut tidak cukup mampu mengatasi persoalan representasi politik di Indonesia. Hal ini terutama dikarenakan rendahnya dukungan organisasi rakyat yang berakar (*popular*), terjadinya fragmentasi di kalangan gerakan organisasi sipil dan pro-demokrasi, serta terabaikannya agenda penting untuk mengubah relasi-relasi kekuasaan.

Pertanyaannya kemudian: Lantas, apa? Apa yang mestinya harus dikerjakan? Banyak gagasan dan saran yang pernah diajukan, mulai dari yang sekadar pengubah-sesuaian (modifikasi) sampai ke reformasi menyeluruh. Salah satunya adalah gagasan yang kini disarankan oleh DEMOS, yakni pembentukan **Blok Politik Demokratik** (selanjutnya disingkat BPD). Pada dasarnya, gagasan ini merupakan upaya untuk mengatasi fragmentasi politik, memperbesar dukungan organisasi-organisasi rakyat, mengurangi penguasaan

tunggal (demonopolisasi) politik sehingga, pada gilirannya, akan menciptakan dan memperkuat representasi politik yang benar-benar merakyat (*popular representation*).

Buku ini adalah panduan praktis pelatihan yang memperkenalkan gagasan BPD tersebut serta cara-cara atau langkah-langkah pembentukannya, terutama pada tingkat lokal, mulai dari tingkat kabupaten dan kota sampai kecamatan dan desa.

■ MENGAPA PELATIHAN INI PENTING?

Upaya untuk membentuk BPD, tentu saja, bukanlah kerja sederhana seperti layaknya kita merakit perabotan bongkar-pasang (*knock down*). Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai pijakan awalnya, yakni:

(1) BPD pada dasarnya suatu eksperimen politik. Meskipun di beberapa negara sudah pernah diterapkan —ada yang berhasil dan banyak juga yang gagal— namun sifatnya sangat kontekstual. Keberhasilan maupun kegagalannya, efektif atau tidaknya, sangat tergantung kepada para pelaku politik yang terlibat di dalamnya, selain sangat dipengaruhi oleh keadaan atau lingkungan makropolitik saat itu.

(2) BPD harus selalu dipahami sebagai eksperimen politik ‘yang menjadi’. Artinya, meskipun ada beberapa prasyarat dan tahapan yang perlu dipenuhi dalam keseluruhan prosesnya, tetapi pada dasarnya tidak ada ‘cetak biru’ (*blue print*) serba pasti untuk membentuknya.

Membentuk BPD memang tidak mudah. Kita butuh kerja keras untuk mewujudkannya tanpa ada jaminan sama sekali bahwa BPD yang dibentuk itu nanti akan benar-benar efektif, berhasil, dan berkelanjutan. Banyak hal dan unsur yang harus dilihat dan dipertimbangkan, termasuk keterlibatan aktif para pelaku pro-demokrasi. Meskipun demikian, upaya tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Panduan pelatihan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pembentukan BPD serta tahapan-tahapan yang harus dilalui.

Pelatihan ini memiliki kepentingan praktis sebagai berikut:

(1) Bermanfaat bagi siapa saja yang berkepedulian terhadap upaya

agar semua piranti (instrumen) demokrasi berfungsi untuk penguatan representasi politik popular; dan

(2) Dapat digunakan oleh perseorangan maupun kelompok — terutama yang selama ini terpinggirkan dalam proses-proses politik— untuk menggalang dan memperjuangkan agenda-agenda kerakyatan.

Panduan pelatihan ini disusun dengan memadukan antara kajian-kajian teoretis dan pengalaman empiris di berbagai wilayah di Indonesia maupun di negara lain.⁴

■ UNTUK SIAPA PANDUAN INI?

Secara umum, panduan pelatihan ini diperuntukkan bagi siapa saja yang tertarik dan peduli dengan kehidupan demokrasi di Indonesia, yang memiliki tekad untuk mengubahnya.

Secara lebih khusus, panduan pelatihan ini diharapkan menjadi rujukan alternatif dan pegangan bagi para aktivis pro-demokrasi, baik perseorangan maupun kelompok, dalam berbagai kedudukannya masing-masing di aras organisasi rakyat, organisasi massa, organisasi atau partai politik, lembaga kajian atau perguruan tinggi, serta kalangan profesional.

■ APA SAJA POKOK BAHASAN PANDUAN INI?

Sesuai dengan pengertian-pengertian dasar di atas, maka panduan pelatihan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

(1) Modul-1: Konsep, Konteks & Inisiasi BPD.

Bagian ini terutama dimaksudkan untuk memperoleh suatu batasan pengertian yang sama tentang BPD, yakni:

[a] Konsep atau pengertian-pengertian dasar serta prinsip-prinsip yang melandasi gagasan BPD;

⁴ Lihat antara lain hasil riset 'Link+Olle' (DEMOS), juga (untuk komparasi internasional) lihat: Sofian, Boni, *op.cit.*

[b] Konteks atau alasan pentingnya BPD sebagai suatu alternatif atau terobosan dalam sistem politik nasional dan lokal saat ini dan di masa mendatang; dan

[c] Inisiasi atau prakarsa yang dibutuhkan untuk memulai atau merintis pembentukan BPD, khususnya di tingkat lokal.

Kesamaan persepsi para peserta pelatihan tentang tiga unsur mendasar ini penting untuk mencegah pengertian BPD itu sendiri menjadi terlalu meluas dan melebar, sehingga menjadi rancu dengan berbagai bentuk persekutuan politik lainnya seperti koalisi, aliansi, front, partai politik, dan sebagainya. Karena itu, tiga pokok bahasan ini ditempatkan sebagai modul pertama. Sangat disarankan untuk tidak melangkah lebih jauh jika tiga unsur fundamental ini belum cukup tuntas difahami oleh peserta pelatihan. Jika kesamaan persepsi ini telah tercapai, maka akan lebih mudah bagi seluruh peserta untuk memahami lebih baik unsur-unsur teknis operasional dan prosedural pembentukan dan pengembangan BPD sesuai dengan konteks lokal daerah asal masing-masing.

(2) Modul-2: Pemetaan & Analisis Kekuatan Politik Lokal.

Jika kesamaan persepsi tentang konsep, konteks, dan inisiasi BPD telah cukup tercapai di kalangan peserta pelatihan, maka baru lah melangkah ke modul berikutnya. Modul kedua ini terdiri dari dua pokok bahasan uata yang sangat berkaitan satu sama lain, yakni:

[a] Pemetaan kekuatan politik lokal. Pemetaan ini terutama bertujuan memperoleh gambaran umum mengenai kekuatan-kekuatan politik lokal di daerah yang bersangkutan.

[b] Analisis relasi-relasi antar berbagai kekuatan politik lokal tersebut. Analisis ini terutama dimaksudkan untuk mengidentifikasi mana di antara berbagai kekuatan politik lokal tersebut yang benar-benar potensial untuk diajak membentuk BPD di daerah yang bersangkutan.

Karena pelatihan ini pada dasarnya lebih merupakan pengenalan awal tentang gagasan BPD, maka metode dan teknik pemetaan serta analisis kekuatan politik lokal yang digunakan disini adalah suatu kerangka kerja 'Analisis Politik' yang telah disederhanakan untuk memudahkan peserta melakukannya secara cepat, cukup hanya dengan data dan informasi yang bersifat umum atau agregatif saja.

Jika para peserta pelatihan ini nantinya ingin melakukan pemetaan dan analisis situasi politik lokal yang lebih rinci dan menyeluruh,

mereka dapat menggunakan kerangka kerja riset dan survei nasional *Democracy Watch* (DemWatch) yang sudah diuji-cobakan dan diterapkan pada tahun 2003 sampai 2007. Kerangka kerja tersebut telah diterbitkan oleh DEMOS sebagai suatu buku terpisah ('Panduan Survei Pemantauan Demokrasi; Jakarta: DEMOS, 2009).

(3) Modul-3: Kelompok Kerja BPD & Rencana Tindak-lanjut.

Akhirnya, modul atau bagian ketiga panduan pelatihan ini terdiri dari dua pokok bahasan utama:

[a] Langkah-langkah awal pembentukan Kelompok Kerja (*task force*) yang akan bertugas mengorganisir berbagai pertemuan dengan berbagai kalangan yang potensial untuk menjadi bagian atau ikut membantu merintis pembentukan BPD yang sesungguhnya.

[b] Rencana tindak-lanjut dalam bentuk rencana kerja (*work plan*) pasca pelatihan oleh para peserta di daerah asal mereka masing-masing untuk merintis dan mendorong terbentuknya BPD.

Modulasi lengkap seluruh pokok bahasan tersebut di atas dapat dijabarkan dalam satu jadwal tentatif (pada halaman berikutnya).

■ METODOLOGI APA YANG DITERAPKAN PANDUAN INI?

Bertolak dari pengertian bahwa BPD pada dasarnya adalah representasi politik populer yang mempersyaratkan partisipasi, maka pelatihan ini juga secara bersengaja dirancang sebagai suatu pelatihan partisipatif (*participatory training*). Karena itu, pelatihan ini akan diselenggarakan dengan sebanyak mungkin berusaha bertolak dari pengalaman dan pengetahuan peserta sendiri sebagai landas-pijak utamanya. Semua bahan bacaan berupa contoh kasus, hasil temuan riset atau survei dan analisisnya, bahkan penjelasan teoretis yang digunakan disini, pada dasarnya, adalah lebih sebagai bahan masukan atau bahan banding dan rujukan. Dengan kata lain, semua bahan tersebut akan diperhadapkan dengan pengetahuan dan pengalaman nyata peserta sendiri selama ini. Dengan demikian, terbuka kemungkinan luas bagi mereka untuk memahami dan mengembangkan BPD sesuai dengan konteks lokalnya masing-masing.

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah menciptakan kemampuan para peserta memahami realitas sosial-politik, ekonomi, dan budaya yang akan mempengaruhi gagasan dan proses pembentukan serta

MODULASI JADWAL TENTATIF PELATIHAN BPD

HARI-3

HARI-2

HARI-1

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pagi (08:00-10:00) | Sesi-1 PENGERTIAN DASAR BPD | Sesi-5 LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN BPD | Sesi-9 ANALISIS KEKUATAN POLITIK LOKAL |
| Siang (10:30-12:30) | Sesi-2 PENGERTIAN DASAR BPD (lanjutan) | Sesi-6 MEMBENTUK KELOMPOK PEMRAKARSA BPD | Sesi-10 ANALISIS KEKUATAN POLITIK LOKAL (lanjutan) |
| Sore (13:30-15:30) | Sesi-3 PENGERTIAN DASAR BPD (lanjutan) | Sesi-7 PEMETAAN KEKUATAN POLITIK LOKAL | Sesi-11 MEMBENTUK KELOMPOK KERJA BPD |
| Petang (16:00-18:00) | Sesi-4 KONTEKS: ALASAN & MANFAAT PEMBENTUKAN BPD | Sesi-8 PEMETAAN KEKUATAN POLITIK LOKAL (lanjutan) | Sesi-12 RENCANA TINDAK LANJUT & EVALUASI PELATIHAN |

MODUL 1 (Sesi 1 ~ 6) ——— MODUL 2 (Sesi 7~10) ——— MODUL 3 (Sesi 11~12)

pengembangan BPD di daerah asal mereka masing-masing. Karena itu, panduan pelatihan ini pun disusun dengan kerangka dasar metodologi ‘pengalaman berstruktur’ (*structured experiences*) melalui suatu proses ‘daur belajar’ (*learning cycle*) yang bersifat induktif sebagai berikut:

(1) **Melakukan/mengalami.**

Setiap pokok bahasan akan selalu dimulai dengan pemaparan tindakan yang pernah dilakukan atau dialami sebelumnya, baik oleh peserta sendiri maupun oleh pihak lain yang dianggap relevan. Pemaparan tersebut bisa saja disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya: contoh kasus tertulis atau dalam bentuk audio-visual (jika ada dan mungkin), penyajian *slides*, penyajian laporan hasil kajian atau penelitian oleh narasumber khusus, dan sebagainya. Bahkan, jika belum tersedia atau memang belum pernah ada contoh kasus yang memadai, dapat saja dibuat contoh kasus imajiner (tertulis) atau simulatif (diperagakan, misalnya, melalui permainan peran atau *role playing*, atau praktik mencoba langsung, dan sebagainya).

Tujuan utama tahap ini adalah agar pemahaman peserta terhadap pokok bahasan tersebut benar-benar berlandaskan suatu realitas (fakta kejadian, peristiwa, gejala, kecenderungan) yang nyata atau yang mendekati kenyataan yang sesungguhnya, bukan semata-mata suatu pengandaian teoretis yang serba atau sepenuhnya niskala (*abstract*).

(2) **Mengungkapkan/mengurai.**

Setelah itu, realitas tindakan atau pengalaman tadi diungkapkan dan diuraikan secara deskriptif, belum secara analitis. Pada tahap ini, yang diungkapkan dan diurai adalah berbagai unsur realitas pengalaman tersebut (rincian kejadian atau peristiwanya, gejala-gejalanya yang tampak, pelaku-pelaku utamanya, pihak-pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung, kedudukan dan peran mereka masing-masing dalam keseluruhan kejadian atau peristiwa tersebut, dan berbagai rincian data atau informasi lainnya yang dapat diidentifikasi dari kejadian atau peristiwa tersebut).

Singkatnya, para peserta pelatihan pada tahap ini diarahkan sedemikian rupa agar memusatkan perhatian pada pengungkapan atau penguraian ‘fakta’, bukan ‘penafsiran mereka atas fakta’ tersebut. Untuk itu, berbagai cara atau teknik dapat digunakan pada tahap ini, misalnya, melalui ‘urun-pendapat’ (*brainstorming*) atau

'diskusi pleno' (*overhead discussion*). Tujuan utamanya adalah agar peserta semakin terbiasa dan mampu melakukan identifikasi deskriptif secara sistematis, tidak mencampur-adukkannya dengan 'kemauan pikiran' atau *wishful thinking* nya sendiri.

(3) Membahas/mengkaji.

Barulah setelah penguraian deskriptif atas suatu realitas pengalaman (fakta) selesai, tahap analisis dilakukan. Pada tahap ini, seluruh deskripsi fakta (data dan informasi) tadi dibahas dan dikaji ciri-ciri pokoknya, hubungan-hubungan (relasi) sebab-akibatnya, besaran atau luasan pengaruh dan dampaknya, yang kesemuanya mengarah pada penemuan inti permasalahan utamanya.

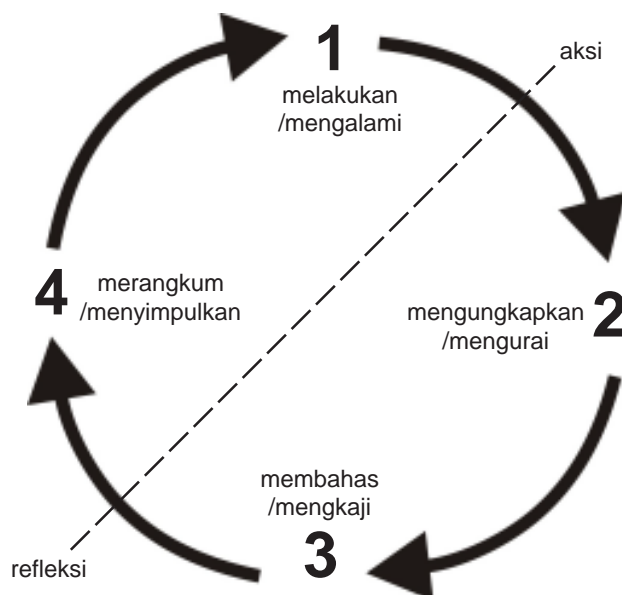
Dengan kata lain, pada tahap inilah peserta akan melakukan 'penafsiran atas fakta' yang telah mereka ungkapkan atau uraikan sebelumnya. Karena itu, teknik atau cara-cara analitis pun mulai diterapkan pada tahap ini, misalnya, melalui diskusi-diskusi kelompok kecil (*focus group discussion*) berdasarkan suatu kerangka kerja analisis (*analytical framework*) tertentu yang dijelaskan terlebih dahulu cara melakukannya oleh fasilitator.

(4) Merangkum/menyimpulkan.

Akhirnya, setelah melakukan analisis, maka seluruh peserta melakukan perangkuman dan penyimpulan umum. Pada tahap inilah dirumuskan bersama pengertian-pengertian dasar tentang pokok bahasan yang bersangkutan. Kesimpulan atau pengertian yang diperoleh tidak selalu harus tunggal dan sama, bisa saja banyak atau sangat beragam dan berbeda-beda. Yang terpenting adalah pelajaran penting (*lessons learned*) apa yang diperoleh dari semua kesimpulan tersebut.

Pokok-pokok pelajaran penting inilah yang akan menjadi dasar bagi peserta merancang dan melakukan tindakan selanjutnya, sehingga daur proses ini bermula lagi dari awal, yakni melakukan atau mengalami. Jika tersedia cukup waktu, tindakan tersebut bisa saja dicobakan atau dipraktikkan langsung contohnya pada saat itu juga. Jika waktu tak memungkinkan, maka cukup dirumuskan saja dalam suatu 'Daftar Tindakan' yang akan dilakukan setelah pelatihan, yakni dalam kenyataan hidup dan kerja sehari-hari para peserta di daerah asal mereka masing-masing. Yang terpenting adalah menegaskan tekad (*commitment*) mereka untuk benar-benar melakukan atau menerapkannya nanti.

Keseluruhan daur proses tersebut dapat digambarkan berikut:



■ BAGAIMANA MENGGUNAKAN PANDUAN INI?

Kerangka dasar metodologi yang diuraikan di atas tadi itulah yang mendasari panduan pelatihan ini, baik pada setiap sesi (pokok bahasan) pada setiap modul atau bagiannya maupun secara keseluruhannya sebagai suatu kesatuan. Sebagai suatu metodologi yang bersifat induktif, maka salah satu hal paling mendasar dalam penerapannya adalah pemahaman dasar sang fasilitatornya bahwa dirinya adalah ‘fasilitator’ (yang membantu peserta belajar berdasarkan realitas dan pengalaman mereka sendiri), bukan ‘guru’ (yang menggurui) atau ‘dosen’ atau ‘penceramah’ (yang mengajar dan berkhotbah kepada peserta). Bahkan jika dibutuhkan adanya orang yang menjelaskan sesuatu yang nisbi baru atau belum ada dalam khasanah pengetahuan atau pengalaman peserta, maka peran orang itu adalah lebih sebagai ‘narasumber’ (*resource person*) yang ‘membagi pengetahuan dan pengalamannya’ sebagai bahan masukan atau bahan banding. Adalah tugas fasilitator mengawal penyajian dari narasumber ini agar tidak melenceng menjadi ‘kuliah’ atau ‘ceramah’ murni. Tugas fasilitator adalah menjadikan proses penyajian narasumber itu menjadi ‘dialogis’ dan ‘interaktif’ dengan para peserta, yakni dengan ‘membenturkan’ penyajian dari

narasumber tersebut dengan pengetahuan dan pengalaman peserta sendiri.

Maka, menjadi lebih jelas bahwa sang fasilitator (yakni anda sendiri yang akan menggunakan panduan pelatihan ini) adalah faktor kunci. Untuk itu, berikut adalah beberapa petunjuk praktis yang sangat perlu anda perhatikan, terutama jika anda selama ini memang belum memiliki cukup banyak waktu dan pengalaman memfasilitasi proses pelatihan dengan metoda ini. Hal-hal yang perlu anda perhatikan dan lakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Sebaiknya baca dahulu seluruh isi panduan ini dengan cermat, sehingga menjadi lebih jelas apa sebenarnya muatan inti, tujuan utama pelatihan, dan logika atau sistematika panduan ini. Sambil membaca, jika perlu, tandai bagian-bagian yang belum terlalu jelas untuk kemudian anda baca ulang lagi dan pelajari lebih mendalam.
- (2) Kemudian pelajari lebih cermat setiap bagian (modul) dan setiap pokok bahasan atau sesinya masing-masing. Pada setiap pokok bahasan atau sesi itu terdapat uraian tentang 'Tujuan', 'Pokok Bahasan', 'Metoda & Media', 'Bahan & Peralatan', 'Waktu', dan 'Proses'. Pelajari rincian setiap unsur tersebut, terutama pada unsur 'Proses', yakni urutan langkah-langkah yang anda harus lakukan selama memfasilitasi pelatihan nanti. Agar lebih yakin, anda dapat saja mencoba mempraktikkannya (sambil membayangkan diri anda memang sedang berada di ruang latihan yang sesungguhnya nanti). Jadi, semacam 'latihan' (*exercise*) persiapkan awal.
- (3) Rincian yang sangat penting pada bagian 'Proses' tersebut adalah daftar pertanyaan pokok (*key questions*) pada langkah-langkah tertentu sepanjang proses. Jika perlu, salin pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut pada kertas plano atau tayangan proyektor LCD (jika ada), sehingga anda tinggal menempelkan atau menyorotkannya saja ke layar pada saatnya nanti. Ini akan membantu anda untuk tetap mengingatnya dan tidak 'gelagapan' (*nervous*) jika lupa. Sekali lagi, ingatlah bahwa anda adalah 'fasilitator' yang salah satu tugas utamanya adalah melemparkan 'pertanyaan-pertanyaan dialektis, analitis, dan kritis' kepada para peserta agar mereka benar-benar berpikir, bukan sekadar menerima apa saja yang anda atau narasumber katakan atau sampaikan.
- (4) Sesaat sebelum masuk ke ruang pelatihan yang sesungguhnya, sebaiknya periksa kembali dahulu semua kelengkapan media, bahan, dan peralatan yang dibutuhkan (lihat bagian 'Metode &

Media' serta 'Bahan & Peralatan') pada setiap pokok bahasan (sesi). Semua bahan yang diperlukan (terutama contoh-contoh kasus dan bahan bacaan) termuat lengkap segera setelah uraian setiap sesi. Anda tinggal menggandakannya saja sebanyak jumlah peserta. Adapun bahan-bahan tak tertulis (terutama bahan-bahan audio-visual) yang tidak bisa dicantumkan ke dalam buku panduan ini, disisipkan (*attached*) pada halaman terakhir buku panduan ini dalam bentuk satu kepingan cakram digital (CD). Sebaiknya anda periksa CD tersebut sebelum pelatihan, untuk meyakinkan apakah mengalami kerusakan atau tidak. Pada waktu memeriksanya (mencoba memutarinya sendiri terlebih dahulu) anda sekaligus bisa menandai bagian bahan mana yang akan digunakan pada pokok bahasan (sesi) yang mana. Dengan demikian, anda tidak perlu menghabiskan waktu mencari-cari nya lagi pada saat dibutuhkan dalam proses pelatihan yang sesungguhnya nanti. Kejadian semacam itu hanya akan menimbulkan kesan kepada para peserta bahwa anda sebenarnya 'tidak atau kurang siap'.

(5) Meskipun semua bahan yang disebutkan dalam panduan ini telah tersedia disini, namun anda juga jangan membatasi diri hanya pada bahan-bahan itu saja. Jika anda mengetahui ada bahan-bahan tertulis atau audio-visual lain yang sejenis dan ternyata memang 'lebih sesuai', maka sebaiknya gunakan bahan tersebut dan lupakan saja bahan yang tersedia dalam panduan ini. Sangat disarankan agar anda memang sebaiknya mencari bahan-bahan semacam itu dan memperkaya bahan-bahan yang sudah tersedia dalam panduan ini. Bahkan, pada saat pelatihan yang sesungguhnya nanti, jika ada peserta yang memiliki dan membawa bahan-bahan yang 'lebih cocok' atau bahkan 'lebih bagus', maka jangan ragu untuk menggunakannya menggantikan yang sudah tersedia dalam panduan ini atau yang sudah anda siapkan sendiri.

(6) Berdasarkan pengalaman selama ini, tugas sebagai fasilitator akan menjadi lebih mudah jika dikerjakan oleh satu 'tim kecil'. Maka, sangat disarankan agar anda tidak menggunakan panduan pelatihan ini sebagai 'fasilitator tunggal'. Sebaiknya anda mengajak satu atau dua orang rekan anda —lebih baik lagi jika mereka adalah orang yang memang sudah terbiasa bekerja bersama anda selama ini— sebagai suatu 'tim fasilitator'. Dengan demikian, anda berdua atau bertiga dapat saling membagi tugas secara bergantian pada setiap atau beberapa sesi sebagai 'fasilitator utama' dan 'fasilitator pendamping' (*co-facilitator*). Selain akan sangat membantu

mengurangi ketegangan dan keletihan, adanya ‘fasilitator pendamping’ pada setiap sesi juga akan sangat membantu ‘menutupi’ berbagai kemungkinan celah kesalahan atau kekurangan fasilitator lainnya. Jika dilakukan dengan semangat kerja tim yang baik, maka proses fasilitasi anda akan berjalan jauh lebih mulus dan menyenangkan. Rekan fasilitator anda, misalnya, bisa saja menyela di tengah proses untuk membuat suasana lebih cair, lebih santai, dan tidak membosankan. Rekan fasilitator yang mengamati pada saat fasilitator utama sedang memfasilitasi, akan lebih jeli melihat suasana keseluruhan ruangan dan peserta, sehingga lebih mampu melihat kapan saatnya melakukan ‘intervensi proses’ yang dibutuhkan untuk membuat proses tetap berjalan lancar, tidak sampai melewatkan.

(7) Juga berdasarkan pengalaman selama ini, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa proses yang terjadi di dalam ruang kelas pelatihan ‘bukanlah satu-satunya proses pembelajaran yang paling menentukan’. Dalam banyak kasus selama ini, malah acara-acara informal di luar ruang kelas (ngobrol santai dengan dan sesama peserta selama waktu-waktu jeda) justru sering lebih menentukan keberhasilan proses pembelajaran mereka. Karena itu, sebaiknya manfaatkan waktu-waktu jeda tersebut (istirahat antar sesi, saat istirahat makan siang, atau pada malam hari jika seluruh peserta dan anda menginap pada satu tempat yang sama) seoptimal mungkin. Pada saat-saat semacam itulah anda juga dapat melakukan pengamatan lebih mendalam, bahkan semacam ‘pengujian’, tentang taraf pemahaman yang telah dicapai oleh peserta pada suatu pokok bahasan yang telah dibahas sebelumnya di dalam ruang kelas. Jika anda terdiri dari satu tim, maka tinggal membagi dan menyepakati tugas pengamatan dan ‘pengujian’ ini agar lebih cermat.

Demikianlah beberapa petunjuk praktis yang dapat anda kembangkan sendiri lebih lanjut pada saat pelatihan yang sesungguhnya. Ingatlah bahwa buku panduan ini memang ‘hanya panduan’, bukan ‘kitab suci’ yang mutlak harus persis sama dengan apa yang anda lakukan nanti. Sebagai panduan, tentu saja, buku ini hanyalah pedoman dasar dan petunjuk garis-besarnya saja. Selebihnya, terletak pada daya imajinasi dan kreativitas anda sendiri. Jadi, jangan pernah berhenti untuk terus mencoba, berlatih, dan belajar. Para fasilitator paling berpengalaman sekalipun selalu menekankan pentingnya jumlah ‘jam terbang’. ❖



MODUL-1

**KONSEP, KONTEKS & INSIASI
BLOK POLITIK DEMOKRATIK**



Sesi 1-3

PENGERTIAN DASAR BLOK POLITIK DEMOKRATIK

TUJUAN

- Peserta memiliki pengertian dasar yang sama tentang Blok Politik Demokratik (BPD).
- Peserta mampu menguraikan unsur-unsur utama dan ciri khas BPD tersebut yang membedakannya dengan berbagai bentuk persekutuan lainnya (koalisi partai politik, aliansi antar organisasi, jaringan kerja, front, dan sebagainya).
- Peserta mampu merumuskan posisi dan peran strategis BPD dalam konteks politik lokal dan nasional Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

POKOK BAHASAN

- Pengertian Dasar BPD
- Unsur-unsur utama dan khas BPD
- Posisi dan peran strategis BPD dalam konteks lokal dan nasional Indonesia.

METODE & MEDIA

- Telaah kasus
- Diskusi kelompok
- Diskusi pleno

BAHAN & PERALATAN

- Lembar-lembar kasus: [1] 'GOLPUT: Gerakan Moral yang Tak Bisa Dihentikan' (h.28-30); [2] 'WALHI: Ingin Menjadi Partai Hijau?' (h.31-33); dan [3] 'Partai Hijau Jerman: Jembatan Gerakan Sosial dan

Kenyataan Politik' (h.34-37).

- Bahan Bacaan-1: 'Apa itu Blok Politik Demokratik?' (h.38-41)
- Video dokumenter 'Menggulingkan Sang Diktator', tentang OTPOR di Serbia (terselip sebagai kepingan CD pada halaman belakang dalam panduan ini)
- Papan tulis, kertas plano, spidol, LCD-proyektor + komputer.

WAKTU

6 jam efektif (3 sesi berurutan)

PROSES

- (1) Pengantar singkat tentang tujuan dan pokok bahasan tiga sesi ini.
- (2) Bagi seluruh peserta dalam beberapa kelompok kecil secara acak saja (usahakan agar tercampur-baur dari daerah-daerah asal yang berbeda). Agar diskusi dalam kelompok nanti cukup intensif, sebaiknya setiap kelompok terdiri tidak lebih dari 4-5 orang saja.
- (3) Bagikan lembar-lembar kasus yang berbeda kepada setiap kelompok, misalnya: lembar Kasus-1 (GOLPUT) hanya kepada Kelompok-1, lembar Kasus-2 (WALHI) hanya kepada Kelompok-2, dan seterusnya.



Keterangan: Selain untuk memperkaya nuansa pengertian, pilihan beberapa kasus yang berbeda ini juga nantinya akan membantu seluruh peserta lebih mudah memahami pengertian dasar BPD dari berbagai kemungkinan yang pernah ada dari contoh-contoh kasus yang berbeda tersebut. Selain itu, juga akan membantu peserta melihat lebih jelas mana di antara berbagai contoh yang berbeda tersebut yang lebih mendekati gambaran BPD yang sesungguhnya atau yang nisbi dianggap lebih sesuai dengan konteks khas politik Indonesia. Karena itu, contoh-contoh kasus yang dipilih memang sebaiknya mewakili berbagai bentuk persekutuan sosial-politik yang sudah dikenal selama ini (koalisi antar partai politik, aliansi antar organisasi, jaringan kerja, front, komite, dan sebagainya).

Catatan: beberapa contoh kasus yang tersedia disini juga tidak bersifat mutlak. Jika diperoleh contoh-contoh kasus lain yang nisbi lebih baik, contoh kasus tersebut dapat digunakan menggantikan contoh-contoh

kasus yang tersedia disini. Yang terpenting adalah bahwa contoh-contoh tersebut cukup lengkap menggambarkan semua unsur pokok yang diperlukan untuk menjelaskan pengertian berbagai bentuk persekutuan sosial-politik seperti koalisi, aliansi, jaringan, front, komite, dan 'blok politik' itu sendiri. Selain itu, contoh kasusnya juga tidak terlalu panjang dan rumit, paling tidak nisbi sama dengan contoh-contoh kasus yang tersedia di sini (sekitar 4-5 halaman saja).

(4) Beri waktu secukupnya (5-10 menit) kepada semua peserta pada setiap kelompok tersebut untuk membaca lembar kasusnya dengan cermat.

(5) Setelah itu, selama 30-45 menit berikutnya, minta setiap kelompok membahas dan menguraikan:

- Apa latar belakang dan tujuan pembentukan kelompok atau organisasi dalam kasus tersebut?
- Apa pilihan isu utamanya dan mengapa mereka memilih isu tersebut?
- Apa pilihan posisi politiknya dan mengapa mereka memilih posisi tersebut?
- Siapa saja anggotanya?
- Bagaimana struktur organisasi atau mekanisme internalnya?
- Darimana sumber-sumber pendanaannya?
- Berdasarkan semua uraian tersebut, maka dapat disebut apa setepatnya kelompok atau organisasi tersebut? Apakah koalisi, aliansi, jaringan kerja, front, komite, atau apa?

(6) Presentasi hasil diskusi setiap kelompok, masing-masing sekitar 5-10 menit. Beri kesempatan kelompok lain bertanya atau melakukan klarifikasi.

(7) Setelah semua kelompok selesai presentasi, ajak seluruh peserta membahas hasil diskusi seluruh kelompok:

- Apa saja persamaan dan perbedaan paling menonjol dari semua kelompok atau organisasi yang dipaparkan dalam semua contoh kasus tersebut? Apa saja ciri khas masing-masing kelompok atau organisasi yang membedakannya secara cukup jelas dibanding dengan kelompok atau organisasi lainnya?
- Dengan demikian, apakah kesimpulan dari setiap kelompok tentang sebutan bentuk kelompok atau organisasi tersebut (koalisi,

aliansi, jaringan kerja, front, komite, dan seterusnya) memang tepat atau tidak? Mengapa?

■ Apakah kelompok atau organisasi dalam contoh-contoh kasus tersebut dapat disebut sebagai suatu 'blok politik'? Mengapa?

■ Sehingga, apa sesungguhnya pengertian mereka tentang 'blok politik'?

(8) Jeda (*break*) antar sesi.



Keterangan: pada pertanyaan terakhir ini, beri kesempatan kepada peserta untuk merumuskan pengertian mereka sendiri sampai saat itu tentang 'blok politik', apapun juga, tanpa perlu dibahas dan disanggah. Hal ini akan memberi gambaran lebih jelas tentang taraf pemahaman mereka sendiri tentang 'blok politik', sehingga memberi gambaran awal juga kepada fasilitator tentang taraf '*leveling off*' yang perlu dilakukan dalam pemahaman peserta.

(9) Lanjutkan sesi ini dengan membagikan bahan bacaan 'Apa itu Blok Politik Demokratik?' kepada semua peserta.

(10) Presentasi oleh salah seorang anggota Tim Peneliti DEMOS untuk menjelaskan hasil temuan dan perumusan DEMOS tentang 'Blok Politik Demokratik' (BPD) berdasarkan bahan bacaan tersebut:

■ Pengertian & Prinsip-prinsip dasar BPD

■ Tujuan BPD

■ Posisi BPD

■ Model Pengorganisasian BPD

■ Sumber pendanaan BPD

(11) Setelah presentasi, ajak semua peserta membahas:



Catatan: pada bagian penjelasan mengenai 'Posisi BPD', sebaiknya ditegaskan bahwa posisi BPD tersebut tidak selalu harus berarti 'oposisi' terhadap kekuatan atau kekuasaan politik resmi, tetapi juga bisa berarti 'supportif' terhadapnya.

Ini sangat bergantung pada bagaimana BPD membaca, menganalisis, dan memahami situasi politik berdasarkan hasil riset (pemetaan politik) yang dilakukannya (yang akan dibahas pada sesi khusus nanti

mengenai langkah-langkah pembentukan BPD). Penegasan ini penting dilakukan untuk menghindari kecenderungan umum yang selalu menempatkan kekuatan-kekuatan non-partisan (seperti BPD) sebagai 'oposisi biner' terhadap kekuatan atau kekuasaan politik resmi.

■ Apa persamaan dan perbedaan antara rumusan pengertian 'blok politik' yang telah mereka rumuskan sebelumnya dalam diskusi kelompok dengan rumusan hasil temuan dan kesimpulan DEMOS ini?

■ Apakah perbedaan-perbedaan tersebut (jika ada) dapat ditambahkan untuk melengkapi rumusan dari DEMOS atau, sebaliknya, justru harus ditolak (karena memang secara prinsipil sangat berbeda dan berlawanan atau bertentangan sama sekali), sehingga makin mempertegas pengertian 'Blok Politik Demokratik'?

(12) Tutup sesi ini dengan membuat kesimpulan-kesimpulan umum yang semakin menegaskan pengertian bersama tentang 'Blok Politik Demokratik'.

(13) Jedah antar sesi (untuk makan dan istirahat siang).



Catatan: Jika masih tersisa ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam beberapa hal mengenai pengertian tersebut, sebaiknya dicatat saja untuk dibahas lebih lanjut dalam sesi-sesi berikutnya sepanjang pelatihan ini. Biarkan tetap terbuka kemungkinan untuk mengembangkan rumusan pengertian BPD tersebut sampai setajam mungkin.

(14) Langsung mulai sesi lanjutan ini dengan penjelasan singkat bahwa untuk semakin mempertegas kesimpulan dan rumusan pengertian tentang BPD pada dua sesi sebelumnya, perlu melihat satu contoh lagi dalam bentuk rekaman video dokumenter.

(15) Tayangkan dengan LCD-proyektor video dokumenter 'Menggulingkan Sang Diktator' (kisah tentang OTPOR di Serbia menumbangkan rezim jagal Slobodan Milosevic).

16. Setelah tayangan, ajak peserta membahas:



Keterangan: pemutaran video ini sebaiknya memang dilakukan pada sesi setelah makan siang ini. Selain untuk membantu mengurangi keletihan dari rangkaian diskusi dan analisis dua sesi sebelumnya, dan kecenderungan mengantuk pada ‘jam-jam kritis’ ini, juga sebagai media penguatan (*freezing*) kesimpulan dan pengertian tentang BPD yang telah dirumuskan pada dua sesi sebelumnya.

Catatan: video ‘Menggulingkan Sang Diktator’ hanyalah salah satu pilihan. Video dokumenter lainnya dapat saja digunakan, sepanjang video itu memang mengandung unsur-unsur yang sama (kisah tentang suatu kelompok atau organisasi yang dapat dijadikan contoh kasus atau pembandingan untuk lebih memahami pengertian ‘blok politik’).

■ Apakah contoh OTPOR dalam video itu dapat disebut sebagai suatu ‘blok politik’ atau ‘blok politik demokratik’ sebagaimana telah dirumuskan dan disimpulkan bersama pada sesi sebelumnya?

■ Mengapa, atau apa saja unsur-unsur utama OTPOR yang membuatnya dapat disebut sebagai suatu ‘blok politik’ atau ‘blok politik demokratik’ atau bukan?

(17) Jika masih tersedia cukup waktu, manfaatkan untuk mempertegas pengertian berbagai istilah kunci yang banyak digunakan dalam pembahasan dan perumusan pengertian BPD sejak sesi pertama tadi (misalnya: ‘entitas politik’, ‘kekuatan politik’, ‘platform politik’ dan perbedaannya dengan ‘ideologi’ atau ‘program kerja’, ‘kelompok penekan’ (*pressure group*), ‘kendaraan politik’, ‘kelompok perantara’ (*intermediary group*), ‘kelompok kepentingan’ (*interest group*), ‘kepentingan yang diperluas’, ‘transformasi kekuasaan’, atau berbagai istilah lain yang khas yang muncul selama pembahasan dan perumusan tadi). Bahkan juga beberapa istilah yang cenderung ‘samar’ dengan istilah ‘blok politik’, yakni istilah-istilah yang sudah sangat umum tetapi masih tetap perlu ‘penjernihan’ pengertian, seperti: ‘koalisi’, ‘aliansi’, ‘front’, dan sebagainya.

(18) Juga jika masih tersisa cukup waktu, pembahasan dapat diperluas dengan mengajak peserta membandingkan antara berbagai contoh kasus kelompok atau organisasi tadi dengan kelompok atau organisasi yang ‘mirip’ yang pernah dan masih ada di Indonesia atau di daerah mereka masing-masing: Apa persamaan dan perbedaannya, sehingga berbagai kelompok atau organisasi dalam negeri itu apakah juga dapat disebut sebagai ‘blok politik’ atau

'blok politik demokratik' atau bukan? Mengapa?

(19) Tutup seluruh rangkaian tiga sesi ini dengan menegaskan



Catatan: Perlu diperhatikan bahwa perluasan diskusi ini (jika waktu masih tersedia), terutama adalah untuk mempertegas saja lagi kesimpulan-kesimpulan umum dan rumusan pengertian-pengertian dasar yang telah dicapai sebelumnya.

Sedapat mungkin hindari perluasan pembahasan ini menjadi sekadar 'debat peristilahan' yang bertele-tele atau 'penghakiman (*judgement*) menilai benar atau salahnya' kelompok atau organisasi yang dijadikan contoh kasus dan perbandingan.

kembali butir-butir terpenting dari rumusan kesimpulan umum bersama dan pengertian mengenai BPD yang telah dihasilkan. Untuk lebih meyakinkan, dapat saja minta beberapa orang peserta (cermati dan beri prioritas, misalnya, kepada peserta yang sejak sesi pertama nampak kurang aktif atau belum pernah mengajukan pendapat apapun) untuk menyatakan pemahaman atau pengertian mereka saat ini tentang BPD. ❖



LEMBAR KASUS 1

GOLPUT: GERAKAN MORAL YANG TAK BISA DIHENTIKAN

Menyusul ' kudeta' berdarah 1965, Jenderal Soeharto yang kemudian tampil sebagai diktator sepanjang periode Orde Baru Indonesia sampai ia terguling pada pada 1998, tampil sebagai pimpinan politik tertinggi Republik ini. Sebagaimana layaknya watak seorang diktator, maka Soeharto pun mulai merekayasa sistem politik untuk senantiasa mengukuhkan kekuasaannya tanpa ada yang boleh mengganggunya. Soeharto yang pada mulanya 'mendapat dukungan tak langsung' dari gerakan mahasiswa Angkatan 66 untuk menggulingkan Soekarno, kemudian melancarkan strategi fusi partai. Belasan partai politik yang ada ketika itu difusikan menjadi hanya 3 partai sesuai aliran politik dan agama — yakni: Golongan Karya (GOLKAR), PPP, dan PDI. Tak perlu diragukan, tujuan strategi fusi partai itu, di antaranya, adalah untuk membatasi oposisi dari partai-partai yang ada ketika itu, dan juga untuk memudahkan Soeharto mengendalikan seluruh kekuatan sosial-politik tersebut.

Seperti selalu terjadi dalam situasi monumental dari suatu perubahan politik, maka akan mudah ditemui unsur-unsur 'petualang politik' (untuk tidak menamakannya gerakan para *lumpen*) yang senantiasa mencari

dan memanfaatkan setiap kemungkinan bagi kepentingan-kepentingan sempit dan individual. Maka gerakan angkatan Angkatan 66 pun tidak luput dari fragmentasi yang disebabkan oleh berseliwerannya kepentingan-kepentingan tersebut. Kesatuan-kesatuan aksi mahasiswa —yang sebelumnya pejal (*solid*) sewaktu menggulingkan Soekarno— pun ikut-ikutan terpecah. Beberapa tokohnya kemudian masuk ke dalam arus utama Orde Baru dengan kendaraan politiknya: GOLKAR.

Beberapa tokoh aktivis Angkatan 66 yang masih mencoba untuk menjaga idealisme dan prinsip demokrasi tidak menyetujui strategi fusi partai di atas, di samping juga kritisisme mereka yang lain pada tanda-tanda dan arah kebijakan Soeharto ketika itu. Mereka beranggapan hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Mereka juga kecewa dengan beberapa tokoh Angkatan 66 —seperti Akbar Tanjung, Cosmas Batubara, David Napitupulu, dan yang lainnya— yang bergabung di barisan Soeharto (GOLKAR). Arief Budiman, Syahrir, Adnan Buyung Nasution (walaupun belakangan juga ikut mendirikan GOLKAR),



Imam Waluyo, Yusuf AR, Marsillam Simanjuntak, Julius Usman, Asmara Nababan, dan lain-lain, adalah di antara tokoh aktivis Angkatan 66 yang mencoba mempertahankan idealisme, dan kemudian mendeklarasikan berdirinya 'Golongan Putih' (GOLPUT) pada 28 Mei 1971, yang menolak berpartisipasi dalam Pemilihan Umum pertama Orde Baru pada tahun yang sama.

Bukan tanpa disengaja bila mereka juga memakai kata 'Golongan' di dalam gerakannya. Arah mereka jelas: untuk menandingi (*counter discourse*) Golongan Karya. Simbol mereka pun 'disama-samakan' dengan simbol GOLKAR, hanya saja bila GOLKAR di tengah simbolnya ada gambar pohon beringin dengan latar warna kuning, maka GOLPUT sama sekali total putih tanpa gambar apapun. Para aktivis GOLPUT sangat sadar GOLKAR akan menjadi kekuatan dan kendaraan utama Soeharto, karena itu mereka menjadikannya sebagai sasaran utama.

Menurut kesaksian para aktivisnya, ada beberapa manifestasi GOLPUT dalam menyikapi Pemilihan Umum 1971. Ada yang tetap datang ke bilik pemungutan suara ketika hari pencoblosan, tapi hanya mencoblos bagian kertas berwarna putih yang tidak ada gambar partai politik apapun. Ada juga yang lebih radikal lagi dengan menolak mendaftar sebagai pemilih dan tidak datang ke bilik suara.

GOLPUT juga aktif melakukan kampanye lewat poster, stiker, dan spanduk. Gerakan ini memang tidak begitu diorganisir dan

dikonsolidasikan secara meluas dan tidak begitu jelas siapa-siapa para pimpinannya. Masyarakat hanya tahu siapa tokoh-tokohnya. Ia lebih seperti gerakan moral yang meluas dan berhasil menciptakan opini yang kuat dan fenomenal. Tujuan jangka pendeknya ketika itu adalah menolak Pemilu 1971, dan tujuan jangka panjangnya adalah melakukan pendidikan politik ke masyarakat luas lewat sikap penolakan terhadap kecenderungan politik yang tidak demokratis. Ada tiga kota besar yang menjadi daerah-daerah utama gerakan ini: Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Karena sifatnya sebagai 'gerakan moral', maka gerakan ini pun terus bergulir dalam bentuk gerakan-gerakan protes lainnya yang juga diinisiasi oleh para tokoh yang sama, antara lain: Komite Anti Korupsi (KAK); Gerakan Anti Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah; dan apa yang kemudian dicap sebagai 'Malapetaka Lima Belas Januari' (MALARI). Seperti juga GOLPUT, gerakan-gerakan tersebut memang tidak memberi dampak perubahan politik yang signifikan, tetapi di dalam sejarah gerakan politik mutakhir Indonesia, gerakan-gerakan tersebut tetap tercatat. Para tokoh dan aktivisnya pun, tetap 'melek politik' dan tetap menjaga independensinya untuk tidak masuk ke dalam arus utama politik, setidaknya di masa Soeharto berkuasa.

Soeharto semakin menancapkan kuku-kuku kekuasaannya dan



semakin represif. GOLPUT pun seperti 'ada dan tiada'. Setidaknya ia tidak lagi segiat di masa-masa awal keberadaannya. Namun gerakan ini tetap tidak bisa dihabisi sama sekali. Aktivistik-aktivisnya memang dibungkam dengan segala cara, tapi kenyataan 'tidak memilih' —yang dilakukan secara sadar dan sukarela oleh warga masyarakat pada setiap Pemilu sepanjang masa Orde Baru— juga tidak bisa sepenuhnya dimatikan sama sekali. Gejala itu tetap hidup sebagai suatu realitas politik bahkan sampai saat ini, setelah reformasi sistem politik nasional dan Soeharto tumbang pada tahun 1998.

GOLPUT memang telah menjadi wacana penting —bahkan satu 'kosa kata baku'— dalam sejarah politik Indonesia mutakhir, khususnya yang terkait dengan pemilihan umum. Bahkan ia menjadi *discourse* yang tak tergantikan dalam perbendaharaan istilah politik di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa seseorang sangat boleh jadi melakukan kesalahan atau dengan sadar melakukannya dalam setiap peristiwa Pemilihan Umum, atau malah tidak mau memilih sama sekali (sikap asli GOLPUT), angka suara

yang batal atau juga yang tidak memilih dalam setiap pemilihan, selalu menunjukkan angka yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan di Orde Reformasi ini pun angka-angka itu cenderung meningkat.

Saat ini, setiap kekecewaan terhadap situasi dan perkembangan politik, disikapi 'secara GOLPUT'. Bahkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang partainya pecah —yang, menurut Wahid sendiri, pemerintah lebih cenderung menyokong kubu lawannya di PKB— sudah 'mengancam' akan menggelembungkan suara GOLPUT pada Pemilu 2009 nanti sampai 75% dari seluruh calon pemilih sah!

Kendati sebagian tokoh pencetus GOLPUT masih hidup hingga kini, namun gerakan ini sudah menjadi gerakan siapa saja dalam mengekspresikan kekecewaan politiknya. Ia sudah lepas dari kendali para pencetusnya. Ia sudah berubah menjadi wacana yang bisa saja kemudian melahirkan bentuk-bentuk gerakan baru. ❖



LEMBAR KASUS 2

WALHI: INGIN MENJADI PARTAI HIJAU?

WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, adalah organisasi jaringan lingkungan hidup terbesar di Indonesia dengan organisasi anggota di nyaris seluruh Indonesia. Sebagai suatu jaringan kerja (*network*) antar organisasi sejenis, WALHI bisa dikatakan sebagai organisasi jaringan lingkungan hidup tertua di Indonesia dengan masa berkegiatan sudah melewati seperempat abad. Pengalaman melakukan advokasi untuk kasus-kasus perusakan kualitas lingkungan di Indonesia sangat banyak, dari yang berskala kecil hingga nasional. Termasuk juga melakukan advokasi kebijakan, tidak hanya terbatas pada isu lingkungan hidup —dalam pengertian sebatas ekologi dalam kaitannya dengan kehidupan manusia— tetapi juga sampai ke isu-isu yang bisa jadi terkait secara langsung atau tidak langsung dengan masalah lingkungan hidup tersebut, seperti kebijakan industri, globalisasi, dan juga soal utang luar negeri. Bahkan ketika rezim diktator Soeharto digulingkan pada 1998, pada tahun 1999 WALHI juga aktif melibatkan jaringan-jaringannya melakukan pemantauan Pemilihan Umum pertama pasca tumbangannya sang tiran.

Dengan pengalaman seabrek sejak

masa represif Orde Baru, didukung oleh organisasi-organisasi jaringan yang tersebar luas, sangat wajar bila WALHI — seiring dengan arus kemungkinan perubahan Orde Reformasi— mengalami dinamika pemikiran yang kemudian mempengaruhi keinginan mereka untuk memanfaatkan momentum tersebut. Salah satu keinginan itu adalah dirasakan perlunya menubuh bentuk gerakannya, yakni dari gerakan organisasi jaringan lingkungan hidup menjadi gerakan sosial. Keinginan ini mencuat ketika WALHI dipimpin oleh Longgeng Ginting.

WALHI mungkin sudah merasa ‘gerah’ juga melihat gerakan organisasi-organisasi non pemerintah (ORNOP) di Indonesia, yang memang sudah terfragmentasi cukup lama dan bahkan saling bersaing secara tidak produktif. WALHI merasa sudah saatnya mengkonsolidasikan gerakannya secara lebih sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, terutama organisasi-organisasi anggota jaringannya.

Di dalam teori-teori tentang gerakan sosial (*social movement*) setidaknya dikenal tiga model gerakan sosial: *behaviorism*,



resource mobilization, dan *action identity*. Nampaknya model kedua (*resource mobilization*) yang akan dijadikan acuan oleh WALHI, karena memang model ini mengambil pendekatan konsolidasi sumber daya yang ada untuk memperjuangkan cita-cita bersama.

Di dalam perkembangan pemikiran tentang gerakan sosial, dan sebagai akibat dari dinamika gerakan sosial mutakhir itu sendiri, baik yang skalanya per negara atau kawasan (semacam Asian Europe People Forum, AEPF) maupun internasional (sekaliber World Social Forum, WSF), berkembang beberapa gagasan reflektif yang merasa perlunya 'penataan ulang' bentuk, arah dan strategi gerakan sosial dunia. Gerakan sosial internasional yang ada selama ini dirasakan agak terlalu mengarah pada model *action identity* yang kurang mempunyai arah, agenda, dan strategi bersama yang jelas. Gerakan sosial kemudian dirasakan hanya menjadi ajang 'unjuk diri' bagi para pelakunya. Pada suatu pertemuan reflektif beberapa anggota Panitia Pengarah (*Steering Committee*) WSF dan beberapa orang tokoh aktivisnya, pada musim semi 2004 di Helsinki, Finlandia, otokritik ini mencuat dengan gugatan yang tidak tanggung-tanggung: "...gerakan sosial dunia harus mempunyai arah politik yang jelas dan tegas!"

Orde Reformasi di Indonesia kemudian memang menempuh jalur sistem multi partai, suatu arah yang kemudian terbukti, hingga hari ini, bersifat euforia saja. Tidak tanggung-tanggung, sepanjang orde ini dari awal hingga sekarang, ratusan partai

politik dibentuk dan bertekad maju dalam pemilihan umum, dengan mimpi berkuasa. Barang tentu, dari sekian banyak syahwat politik yang ada, ada juga yang memang benar-benar ingin memanfaatkan peluang tersebut dengan baik dan benar. WALHI yang memang sudah dikenal dan punya nama di masyarakat, barang tentu, akan menjadi lirikan dari sejumlah kepentingan politik. Bahkan sangat mungkin pula, beberapa pendiri dan mantan aktivis nya yang saat ini berada di kisaran panggung politik nasional, juga ikut memunculkan gesekan-gesekan kepentingan di dalam tubuh WALHI.

Mungkin, berdasarkan perkembangan pemikiran tentang gerakan sosial, dinamika gerakan sosial itu sendiri di aras nasional maupun dunia, dan momentum orde reformasi yang menawarkan sejumlah kemungkinan, WALHI kemudian mulai berfikir untuk memprakarsai terbentuknya suatu 'Partai Hijau' di Indonesia. Satu Tim Pengkaji untuk mewujudkan gagasan ini kemudian dibentuk yang (kalau tidak salah) terdiri dari 5 orang. Dan, di Sekretariat Nasional WALHI di Jakarta, dibentuk satu tim 'Sayap Politik' yang bertugas mengorganisir kegiatan-kegiatan ke arah pembentukan partai politik tersebut. Tugas tim tersebut adalah untuk memetakan aspirasi para anggota WALHI dan sekaligus menguji kelayakannya. Hasilnya, konon, di tingkat nasional adalah 85% anggota menyambut hangat gagasan dan rencana tersebut. Sisanya,



terutama WALHI Yogyakarta, jelas-tegas menolaknya dan tetap menginginkan WALHI sebagai jaringan gerakan lingkungan hidup yang non-partisan!

Berdasarkan hasil pemetaan tadi, tim 'Sayap Politik', pada penghujung tahun 2005, kemudian melakukan perjalanan untuk meminta pendapat dari kalangan aktivis ORNOP lainnya yang bukan anggota WALHI. Di Yogyakarta, dalam satu diskusi antara tim 'Sayap Politik' dengan beberapa aktivis ORNOP setempat, teretuslah alasan-alasan penolakan itu secara lebih tersurat:

Pertama, dengan komposisi presentase hasil pemetaan (85% setuju lawan 15% menolak) tadi, bagaimanapun, jelas-jelas menunjukkan bahwa gagasan dan rencana pembentukan partai politik itu belum sepenuhnya bulat disetujui.

Kedua, di kalangan aktivis WALHI, masih ada beberapa kemungkinan lain untuk mewujudkan 'keinginan berpolitik' itu, tidak selalu harus berarti membentuk partai politik sendiri, tetapi juga bisa saja masuk bergabung dengan partai-partai politik yang sudah ada, atau memanfaatkan tokoh-tokoh oposisi yang lantang.

Ketiga, bagaimanapun, membentuk suatu kekuatan politik, apalagi partai politik, akan memerlukan rakyat

(konstituen) sebagai basis pendukung dan basis legitimasi. Masalahnya, selama ini sangat dirasakan bahwa WALHI, kendati sangat aktif dan sangat dikenal dalam melakukan advokasi, tetapi lebih ke arah atas (kebijakan), dan kurang melakukan proses-proses pengorganisasian rakyat (*community organising*) ke bawah. Di titik inilah maka 'keinginan berpolitik' itu perlu dipertimbangkan kembali;

Keempat, pendekatan *resource mobilization* tidak melulu harus berarti mengubah diri dari gerakan sosial menjadi gerakan politik. Ia bisa juga menempatkan diri sebagai 'sistem pendukung' (*supporting system*) saja bagi terbentuknya partai politik dimaksud.

Keempat hal tersebut di atas, sangat bisa jadi akan menjadi tema diskusi yang terus dan lumayan hangat. Apalagi aura ibukota Jakarta, di mana Sekretariat Nasional WALHI berada, adalah magma yang kadang bisa membuat suasana panas dan bisa membuat kita lupa pada hal-hal yang begitu elementer dan substansial. Hingga kini, nasib gagasan dan rencana ingin menjadi Partai Hijau tersebut tidak terdengar lagi kabar beritanya. ❖



LEMBAR KASUS 3

PARTAI HIJAU JERMAN: JEMBATAN GERAKAN SOSIAL & KENYATAAN POLITIK

“Baiklah, Bapak Kanselir Schroeder, anda boleh mengeksport senjata ke Cina, tapi dengan satu syarat... tolong paket-paket senjatanya dibungkus dengan bahan plastik yang ramah lingkungan...”

Begitulah pernyataan sarkastis Claudia Roth, salah satu tokoh dan pemimpin Partai Hijau Jerman (PHJ) kepada Kanselir (Perdana Menteri) Jerman kala itu dari Partai Sosial Demokrat (PSD), Gerhard Schroeder. Selama hampir dua masa pemerintahan (1998-2001 dan 2001-2005), Jerman diperintah oleh koalisi dua partai yang kadang dianggap agak ‘kekiri-kirian’: yakni PSD & PHJ, yang dikenal sebagai ‘Koalisi Merah-Hijau’ (*Rot-Grün Koalition*). Di Eropa, koalisi ini begitu terkenal. Sangat boleh jadi hal itu disebabkan oleh krisis lingkungan hidup dunia yang memang semakin mengkhawatirkan dan meningkatkan kesadaran akan kualitas lingkungan yang lebih baik, hal yang kemudian meningkatkan eskalasi gerakan sosial dunia di mana-mana. Dan gerakan sosial lingkungan hidup Jerman, untuk ukuran Eropa setidaknya, memang mencatat prestasi mengesankan tersendiri. Konteks inilah yang mendorong lahirnya PHJ dan menempatkan posisi PHJ sebagai salah satu Partai Hijau di Eropa yang disegani dan sering memberikan inspirasi. Sesuai dengan latar

belakangnya itu pula, PHJ sering dianggap sebagai partai dengan haluan organisasi non pemerintah (ORNOP) yang membela kelestarian lingkungan, hak asasi manusia, multikulturalisme, kesetaraan gender, dan pasifis (anti perang, anti militer). Inilah partai yang sering dijadikan sebagai sasaran lobi dan sekutu para aktivis ORNOP di Jerman. Inilah juga partai yang kerap aktif mengirim aktivis-aktivis atau kader-kadernya untuk terlibat dalam banyak pertemuan gerakan sosial di tingkat kawasan Eropa atau juga internasional.

Hubungan aspirasi antara gerakan sosial dan PHJ yang tetap dijaga dalam hubungan yang dinamik itu juga yang kemudian menjadi contoh, setidaknya di Eropa. Di Finlandia misalnya, ketua Partai Hijau, Heidi, yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Presiden walaupun tidak menang, pernah menjadi Ketua Dewan dari organisasi payung NGO se Finlandia, yakni KEPA, yang mempunyai konstituen lebih dari 300 organisasi seluruh Finlandia. Bukan hanya Heidi, aktivis-aktivis lingkungan lainnya pun, masuk ke dalam tubuh Partai Hijau Finlandia. Atau, mengambil posisi sebagai penasehat-penasehat politisi Partai Hijau. Bahkan,



menjadi 'Tim Sukses' dalam pemilihan-pemilihan yang melibatkan para politisi hijau. Jadi, suatu hubungan timbal-balik yang terus dijaga hingga kini.

Didirikan pada tahun 1979 di Jerman Barat, PHJ mempunyai sejarah latar belakang yang panjang, yang justru berawal dari gerakan sosial (*social movements*). Tahun 1970, saat Jerman berusaha mengurangi tingkat ketergantungan mereka pada energi fosil, menyusul dimulainya krisis energi dunia, bersama negara-negara tetangga Perancis dan Swiss, Jerman berusaha membangun pabrik energi nuklir di tepian Sungai Raya Rheine untuk menambah pasokan energi nasional mereka. Sengaja industri ini dibangun di tepian Rheine karena memang akan banyak memerlukan banyak air, sekalipun limbahnya dianggap akan mengancam kelestarian hutan-hutan asli (*Black Forests*) di bukit Bavaria dan hutan-hutan di sekitar Perancis dan Swiss. Hal inilah yang kemudian menuai badai protes berkepanjangan yang dipelopori oleh para petani anggur di Freiburg, dan semakin melebar dengan dukungan mayoritas masyarakat Freiburg dan kelas-kelas pekerja lain.

"*Heute Fisch Morgen Wir*" (Hari ini ikan yang mati, besok kita yang mati), adalah slogan yang sangat terkenal ketika itu. Petani-petani anggur Freiburg dan Bavaria pada umumnya, didukung oleh masyarakat umum terus melakukan tekanan yang sangat kuat, dan mencapai puncaknya pada tahun 1975. Tidak hanya melakukan tekanan, mereka juga mulai mempraktikkan gaya hidup 'mudik ke alam' (*back to nature*), yang hingga kini masih tetap

dilakukan dan dapat dilihat wujudnya di hampir seluruh negara bagian Jerman.

Hans Jorg Schwander dari ORNOP Innovation Academy yang menjadi saksi mata gerakan 1975 itu mengatakan bahwa gerakan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Partai Hijau Jerman pada tahun 1979. PHJ sejak awal berdirinya hingga kini, tetap mempunyai tujuan perjuangan yang sama, yakni: membela kelestarian lingkungan, hak asasi manusia, multikulturalisme, kesetaraan gender, dan anti perang/militer. Setelah mencatat keberhasilan politik sejak berdirinya, kendati tidak menguasai secara dominan, posisi PHJ memang sangat diperhitungkan di dalam politik Jerman khususnya, dan Eropa umumnya. Di dalam pertemuan Partai Hijau se-Eropa (seluruhnya berjumlah 32), PHJ mendapat posisi terhormat dengan diberikan julukan sebagai 'induk semang Partai Hijau (*the Mother of Green Party*).

Seperti sudah disinggung di atas, kuatnya posisi politik PHJ, selain karena tujuan-tujuannya yang dipertahankan sekuat mungkin, juga karena ia dianggap 'dekat' oleh kebanyakan kalangan aktivis ORNOP dan senantiasa menjadi sasaran utama lobi-lobi mereka. Pada kurun waktu 1998-2005, PHJ dan PSD memimpin pemerintahan dalam suatu koalisi yang, dengan segala catatannya, bagaimanapun telah menggoreskan catatan sejarah dan melahirkan begitu banyak tulisan dan bahkan penelitian.



Namun politik adalah politik dengan seluruh tabiat dan karakternya. Seperti contoh pernyataan yang dikutip di awal tulisan ini, menunjukkan bagaimana PHJ akhirnya toh harus 'berkompromi' juga dengan menyetujui sesuatu yang justru bertentangan dengan salah satu tujuan dasarnya. Andre Gunder Frank dan Marta Fuentes — dalam risalah ringkasnya yang bertajuk *Ten Thesis on Social Movements*— mengomentari sikap kompromi PHJ tersebut dengan mengatakan: "Bagaimanapun, ini merupakan salah satu masalah terbesar gerakan sosial: koeksistensi mereka dengan negara, institusi-institusi politik dan proses-prosesnya, termasuk partai-partai politik". Gerakan ekologi akar-rumput (yang merupakan cikal bakal PHJ) telah berubah menjadi partai politik dan masuk parlemen. Sayap '*Realo*' (mereka yang memaklumi *real politics*) di gerakan ini beranggapan bahwa pemerintah, parlemen, partai politik, dan seterusnya, adalah fakta kehidupan, di mana gerakan mesti memperhitungkannya demi kepentingan-kepentingannya, dan cara terbaik memengaruhi tekanan adalah dengan masuk ke dalam dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain di sana. Sementara sayap '*Fundi*' (para fundamentalis —garis keras, radikal) gerakan beranggapan bahwa berpartisipasi dengan institusi-institusi negara adalah sama saja dengan 'pelacuran nilai-nilai fundamental' dari gerakan mereka. Ini fakta politik yang memang tidak mudah. Untuk budaya Eropa, di mana demokrasi dan 'berpikir liberal' tumbuh dan berakar, akan tidak mudah mengambil suatu posisi

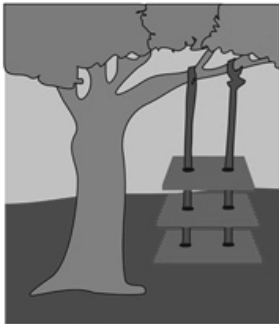
radikal berdasarkan prinsip fundamental. Dan negara dengan sistem politik demokratisnya, adalah kenyataan yang saat ini merupakan *conditio sine qua non*, suatu keniscayaan. Namun, demokrasi tetap harus bisa menerima dan memberi tempat bagi suatu pandangan seradikal apapun. Hal ini pula yang tetap memberikan peluang pada kelompok-kelompok '*Fundi*' untuk tetap bisa diterima dalam '*Realo*' politik. Misalnya, saat ini di Jerman dan juga di Finlandia, ketika kelompok-kelompok ini, karena tidak lagi percaya dengan sistem politik yang ada, menuntut agar negara memberikan subsidi pada mereka untuk kegiatan-kegiatan yang akan mereka kelola sendiri 'di luar negara', negara sedang 'sangat mempertimbangkan'. Bahkan di sisi lain tuntutan itu sudah mulai dipenuhi.

Dalam dinamika pemikiran tentang gerakan sosial, di Eropa setidaknya, kelompok-kelompok radikal pun sudah melansir semacam wacana tandingan (*counter discourse*) terhadap 'demokrasi perwakilan' (*representative democracy*) ke arah suatu 'demokrasi langsung' (*direct democracy*). Hal itu dilakukan karena sudah terjadi krisis kepercayaan terhadap demokrasi perwakilan yang selama ini dijalankan. Dalam pandangan kelompok-kelompok radikal tersebut (dan ini memang kenyataan), parlemen sudah dikuasai oleh para pelobi perusahaan-perusahaan multinasional.

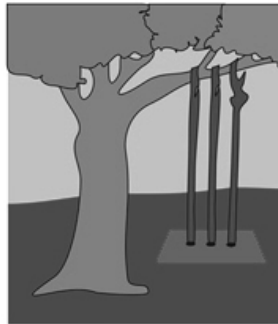


Partai Hijau Jerman, seperti juga partai-partai hijau lainnya di Eropa, kini sedang berada dalam pusaran dinamika tersebut. Mereka sangat paham dengan tuntutan kaum gerakan sosial radikal, tapi juga tetap berupaya menjaga agar posisi politiknya tidak hilang. Mereka tetap

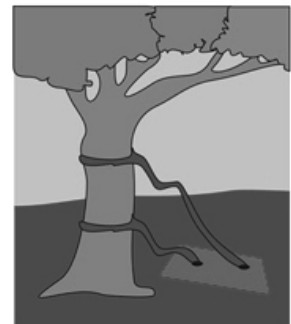
memelihara jembatan penghubung antara para politisinya dengan gerakan sosial. Dan itulah, barangkali, salah satu sebab mengapa mereka tetap bertahan, dan tetap dinamis, sampai saat ini. ❖



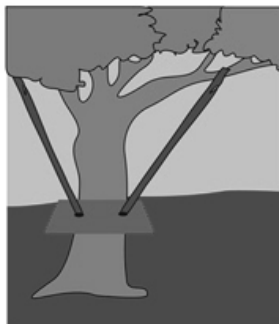
(1) Usul para pakar



(2) Keinginan pejabat



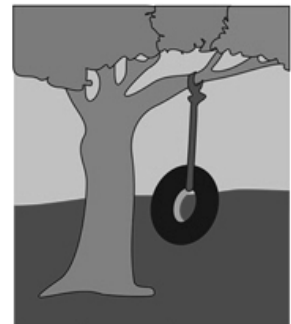
(3) Setelah direvisi oleh konsultan



(4) Hasil kompromi



(5) Setelah selesai dibangun oleh kontraktor



(6) Yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan warga



APA ITU BLOK POLITIK DEMOKRATIK?

Untuk memantapkan perjalanan demokrasi Indonesia pada dasawarsa kedua pasca-reformasi, penguatan representasi kerakyatan – yang mencakup tiga dimensinya, yakni: [1] representasi politik berbasis partai; [2] representasi kepentingan berbasis kegiatan sipil dan gerakan sosial; dan [3] partisipasi langsung berbasis komunitas-komunitas kewargaan – harus mendapatkan prioritas utama. Penguatan representasi populer itu harus didasarkan kembali pada dua basisnya yang utama, yakni pada komunitas-komunitas politik demokratik di tingkat nasional, dan pada gerakan politik lokal yang berbasis isu dan kepentingan kerakyatan.

Kehadiran Blok Politik Demokratik (BPD) diharapkan dapat menjawab persoalan itu. Lantas, mengapa BPD benar-benar penting dan diperlukan? Berdasarkan pengalaman nyata selama ini, ada tujuh alasan empiris mengapa BPD memang dipandang mendesak:

(1) Berbagai usaha untuk menjembatani dan menggalang persekutuan antara gerakan sosial dan asosiasi sipil dari bawah seringkali menghadapi kegagalan, dan hanya berhenti menjadi front, aliansi, atau koalisi temporer.

(2) Upaya untuk membangun organisasi-organisasi politik berbasis kepentingan sektoral tidak cukup berhasil mendapatkan posisi tawar yang berarti.

(3) Politisasi gerakan komunitarianisme (berbasis agama, kesukuan, dan norma lokal [adat]) cenderung mengikis prinsip kesetaraan, gagal menumbuhkan kesetiakawanan inklusif berdasarkan *citizenship-politics*, dan tidak efektif menciptakan persatuan sipil yang luas.

(4) Menyusun *platform* untuk dinegosiasikan dengan kandidat/partai politik secara *ad-hoc* seringkali hanya menghasilkan keuntungan sepihak bagi kandidat/partai politik itu sendiri, tanpa jaminan ada pelaksanaannya.

(5) Usaha-usaha dari atas, misalnya melalui mesin politik partai – meskipun didasarkan pada program dan perspektif yang secara teoretis dan ideologis konsisten – seringkali ditanggapi secara negatif sebagai upaya untuk ‘penguasaan’ (intervensi, *claim*) terhadap gerakan akar-rumput.

(6) Ada kebutuhan mendesak



untuk melibatkan partisipasi perempuan, yang perspektif dan kepentingannya selama ini diabaikan oleh gerakan politik manapun.

(7) Ada kebutuhan untuk mencari cara-cara politik baru yang kreatif dengan melibatkan banyak individu dan gerakan sipil yang sejauh ini berminat dalam politik, tapi enggan terlibat dalam kegiatan kepartaian.

Tulisan ini akan mengulas secara singkat mengenai ‘Apa itu Blok Politik Demokratik?’ dengan mengedepankan definisi, posisi, tujuan, dan fungsi BPD sebagai wujud representasi populer.

DEFINISI & PRINSIP BPD

Definisi

Berbeda dengan model perorganisasian aliansi, koalisi, konsorsium, jaringan, front, komite, forum, dan lain-lain, BPD adalah suatu persekutuan sosial-politik yang berdasarkan atas:

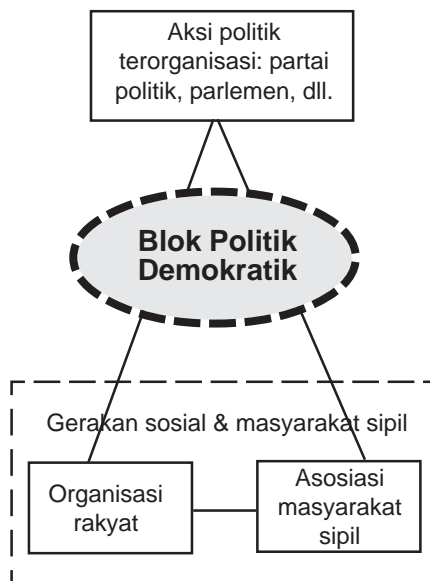
- satu *platform* minimal;
- lebih permanen ketimbang yang lain;
- memiliki agenda yang lebih umum berdasarkan isu strategis tetapi terukur, yang merepresentasikan kepentingan seluruh unsur BPD;
- berbasis teritorial.

Selama ini, aktivis melakukan persekutuan dalam bentuk aliansi, koalisi, front, yang pada hakekatnya sama, berbasis kepentingan spesifik, isu dan basisnya sektoral, bersifat *ad-hoc*, sementara, jangka pendek.

Blok politik adalah asosiasi politik non-partai yang merupakan wadah bagi gerakan sosial, asosiasi sipil, organisasi kemasyarakatan, individu

– bahkan para politisi (tetapi bukan sebagai wakil partai) untuk memperkuat partisipasi populer.

Blok politik berfungsi untuk **menjembatani** tiga wilayah yang dapat digambarkan sebagai



berikut:

Mengapa harus ada kata ‘demokratik’?

Dengan BPD dimaksudkan di sini untuk serangkaian proyek bersama dalam rangka melindungi demokratisasi berbasis HAM – termasuk di dalamnya adalah hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial ekonomi dan budaya; dan pendidikan politik mengenai masalah-masalah ini – dari skenario ‘politik keteraturan’ melalui konsolidasi-demokrasi-yang-didikte-elite.

Prinsip-prinsip

Blok Politik Demokratik yang



dimaksud disini didasarkan pada beberapa prinsip:

- Sebagai wadah gerakan sosial, asosiasi sipil, organisasi kemasyarakatan, individu – bahkan para politisi (tetapi bukan sebagai wakil partai) – untuk menggalang pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, menjalankan agenda dan program sosial-politik, mengawasi pemerintahan, dan/atau mendukung pencalonan seseorang untuk suatu jabatan publik.
- Wadah untuk mempersatukan kembali kekuatan rakyat yang selama ini terpecah-pecah dalam berbagai kepentingan sektoral ke dalam organisasi kerakyatan yang solid, terencana, dan terkoordinasi.
- Wadah untuk membangun jaringan yang kuat di antara gerakan di berbagai tempat.

MODEL PENGORGANISASIAN BPD

- Asosiasi non-partai politik
- Lembaga perantara antara (1) jaringan, gerakan dan organisasi yang fokus pada isu dan kepentingan sepihak, dan (2) partai politik dan kandidat politik
- Anggota BPD: ORNOP/LSM, organisasi rakyat, organisasi massa, perseorangan.
- BPD berada di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan pusat.
- BPD dibentuk atas *platform* minimal yang disepakati
- *Platform* tersebut mengakomodasi dan mengagregasi kepentingan gerakan demokrasi yang paling

utama menyangkut kepentingan banyak orang.

- BPD **dapat** berkembang menjadi partai politik.

POSISI BPD

Sistem politik demokrasi sejak satu dasawarsa yang lalu ternyata tidak membuat aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia terwakili dalam politik. Benar bahwa partai politik masih menjadi aktor kunci dalam kehidupan politik. Tetapi, kenyataannya partai-partai politik masih didominasi oleh kelompok elit yang hanya mementingkan diri sendiri dan abai terhadap kepentingan masyarakat banyak.

Sementara itu, gerakan masyarakat sipil dewasa ini memiliki karakter yang secara sosiologis mengambang dan secara politis marjinal, serta terpecah-belah (*fragmented*).

Maka harus ada suatu terobosan untuk mengatasi krisis representasi politik. Salah satu rekomendasi DEMOS untuk menanggulangi terhambatnya demokrasi akibat dominasi kalangan elite oligarkis terhadap sistem politik di Indonesia, adalah melalui pembentukan Blok Politik Demokratik.

Posisi inilah yang kemudian akan diisi oleh BPD sebagai lembaga 'perantara' (*intermediary*) yang berupaya memperkuat representasi populer.

TUJUAN BPD

Di tengah kondisi representasi yang buruk, BPD adalah satu-



satunya jawaban untuk memperbaiki situasi. BPD bisa memecahkan problem yang paling krusial, yakni fragmentasi gerakan pro-demokrasi dan terputusnya hubungan antara gerakan sosial dan masyarakat sipil, di satu sisi, dan gerakan politik terorganisir, di lain sisi.

Dengan blok politik demokratik, kita bisa menggalang energi kolektif untuk konsolidasi dan koordinasi gerakan-gerakan pro-demokrasi yang sejauh ini terfragmentasi, bukan saja karena perbedaan fokus gerakan di antara sesama mereka, tetapi juga karena tiadanya jaringan yang kuat di antara gerakan di tempat yang satu dengan gerakan di tempat yang lain.

Dengan demikian, tujuan utama pembentukan BPD adalah sebagai upaya untuk memperbaiki representasi yang buruk dengan mengedepankan model representasi alternatif yang berorientasi kerakyatan (*popular representation*). Secara khusus pembentukan BPD dimaksudkan untuk demonopolisasi sistem representasi dan sistem kepartaian yang semakin lama semakin tertutup.

BPD & KEPENTINGAN PEREMPUAN

Sebagai sebuah model representasi alternatif, BPD tentu harus

mengedepankan pemihakan pada kepentingan bersama yang bersifat lintas-sektoral. Kehadiran BPD diharapkan dapat menjadi model representasi alternatif yang berbasis pada gagasan dan kepentingan perempuan. Hal ini setidaknya didasarkan atas beberapa argumen berikut:

- Berbagai kajian mengenai perempuan dalam politik menunjukkan bahwa minat kalangan perempuan dalam soal politik masih rendah.
- Hasil Survei Nasional Ulangan DEMOS 2007 menunjukkan bahwa rendahnya minat perempuan dalam politik bukan sesuatu yang berdiri sendiri.
- Rendahnya minat perempuan terhadap politik bisa jadi justru karena sistem politik yang ada sangat maskulin sehingga tidak *women friendly*.

Dengan mempertimbangkan suara kaum perempuan yang begitu besar dan isu-isu perempuan yang selalu termarginalkan dalam isu politik utama, maka BPD sebagai model representasi alternatif perlu melibatkan kelompok perempuan secara massif. ❖



Sesi 4

KONTEKS: ALASAN & MANFAAT BLOK POLITIK DEMOKRATIK di INDONESIA

TUJUAN

- Peserta mampu merumuskan dan memahami alasan pentingnya pembentukan BPD dalam konteks politik Indonesia saat ini dan di masa mendatang.
- Peserta mampu merumuskan dan mengetahui apa saja manfaat pembentukan BPD bagi diri dan organisasi mereka.

POKOK BAHASAN

- Alasan pentingnya BPD dalam konteks politik Indonesia saat ini dan di masa mendatang.
- Manfaat BPD bagi para anggotanya.

METODE & MEDIA

- Diskusi Kelompok
- Diskusi Pleno
- Presentasi Hasil Riset

BAHAN & PERALATAN

- Bahan Bacaan-2: 'Potret Demokrasi Indonesia: Maju Selangkah, Mundur Dua Langkah -- Ringkasan Hasil Survei Nasional DEMOS, 2003-2004' (h.46-58); dan Bahan Bacaan-3 'Masalah & Pilihan Demokrasi di Indonesia -- Ringkasan Hasil Survei Nasional Ulangan DEMOS, 2007-2008' (h.59-64).
- Papan tulis, kertas plano, spidol, LCD-proyektor + komputer.

WAKTU

2 jam efektif (1 sesi)

PROSES

- (1) Pengantar singkat tentang tujuan & pokok bahasan sesi ini.
- (2) Bagi seluruh peserta dalam beberapa kelompok kecil lagi secara acak.



Catatan: pembagian kelompok kali ini tidak harus sama dengan kelompok sebelumnya. Bahkan disarankan untuk melakukan pengacakan baru agar seluruh peserta memperoleh kesempatan bekerja dalam kelompok yang berbeda anggotanya.

- (3) Jelaskan pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus didiskusikan pada semua kelompok:

■ Setelah merumuskan kesimpulan umum dan pengertian dasar bersama tentang BPD pada sesi-sesi sebelumnya, maka apa pentingnya pembentukan BPD tersebut dalam konteks sistem politik Indonesia saat ini, termasuk situasi politik yang sedang berkembang di daerah-daerah asal peserta?

■ Dalam pengertian tersebut, maka apakah manfaat BPD itu nanti bagi para peserta atau organisasi mereka dan, secara umum, bagi pengembangan demokrasi atau gerakan-gerakan pro-demokrasi atau gerakan sosial pada umumnya baik pada tingkat lokal maupun nasional?

- (4) Diskusi kelompok selama sekitar 30-45 menit.

(5) Presentasi hasil diskusi semua kelompok, masing-masing sekitar 5-10 menit per kelompok. Beri kesempatan pada kelompok lain untuk bertanya dan meminta klarifikasi.

- (6) Setelah seluruh presentasi kelompok selesai, ajak seluruh peserta melakukan pembahasan:

■ Manakah di antara semua alasan dan manfaat pentingnya pembentukan BPD dari semua kelompok itu yang benar-benar kontekstual dengan sistem dan situasi politik Indonesia saat ini dan di masa mendatang, baik pada tingkat lokal maupun nasional?

■ Manakah di antara semua alasan dan manfaat tersebut yang tidak relevan, atau bahkan mungkin justru bertentangan, dengan pengertian dasar BPD yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga perlu dipertegas untuk tidak dijadikan sebagai alasan pembentukan BPD?



Keterangan: jawaban terhadap pertanyaan kedua ini (jika ada) perlu dipisahkan tersendiri secara tegas dengan jawaban terhadap pertanyaan pertama, karena jawaban ini juga akan membantu semakin memperjelas taraf pemahaman peserta yang sebenarnya tentang pengertian dasar BPD yang telah dirumuskan pada sesi-sesi sebelumnya. Adalah sangat mungkin terjadi munculnya jawaban-jawaban yang rancu dalam hal ini, misalnya: alasan atau manfaat pentingnya pembentukan BPD karena merasa perlu ada 'kendaraan politik kekuasaan' bagi mereka, sehingga pengertian BPD menjadi rancu lagi dengan 'partai politik'.

(7) Bagikan bahan bacaan: 'Ringkasan Hasil Survei Nasional DEMOS' (tahun 2003-2005 dan 2007-2008) kepada seluruh peserta.

(8) Presentasi dari salah seorang Tim Peneliti DEMOS yang menjelaskan 'Ringkasan Hasil Survei Nasional' tersebut, dengan penekanan khusus pada bagian-bagian yang menjelaskan **pokok-pokok temuan penting yang mendasari alasan-alasan dan manfaat pembentukan BPD dalam konteks sistem dan situasi politik Indonesia saat ini.**



Catatan: presentasi ini dapat saja dilakukan sendiri langsung oleh fasilitator, tetapi sebaiknya memang mendatangkan salah seorang anggota Tim Peneliti DEMOS tersebut sebagai narasumber, sehingga memungkinkan diskusi lebih rinci dan mendalam. Kemungkinan lain adalah mendatangkan tambahan narasumber perbandingan (termasuk narasumber lokal: politisi, peneliti, aktivis gerakan sosial, dan sebagainya) yang selama ini dikenal cukup giat melemparkan atau memajukan gagasan pembentukan persekutuan politik yang mirip (atau mungkin juga berbeda sama sekali) dengan pengertian BPD, untuk memperoleh semakin banyak bahan masukan dan perbandingan. Jika kemungkinan kedua ini dapat dilakukan, maka fasilitator harus cukup ketat mengawasi agar diskusi yang terjadi antara peserta dengan narasumber tersebut benar-benar atau tetap mengacu ketat pada pengertian dasar BPD yang telah dirumuskan sebelumnya.

Selama presentasi ini, buka kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan klarifikasi pengertian jika perlu, terutama terhadap beberapa pengertian dasar dan istilah penting yang digunakan. Yang terpenting dari presentasi ini adalah menunjukkan pada peserta bahwa **gagasan dan saran pembentukan BPD sama sekali tidak didasarkan pada *common-sense* belaka, tetapi didukung oleh data hasil kajian yang sistematis dan serius**. Dengan demikian, fasilitator dapat menegaskan bahwa pembentukan BPD oleh peserta di daerah asal masing-masing nanti semestinya juga didasarkan pada satu hasil kajian yang sistematis dan serius pula.

(9) Tutup sesi ini dengan melakukan rangkuman umum bersama tentang alasan dan manfaat pendirian BPD yang semakin mempertegas pengertian dasar BPD pada sesi-sesi sebelumnya.

(10) Jika masih ada waktu tersisa, pembahasan dapat saja diperluas ke arah alasan dan manfaat pembentukan BPD yang lebih spesifik, misalnya: alasan dan kepentingan bagi kaum perempuan, atau bagi kelompok-kelompok atau organisasi sektoral (gerakan lingkungan, dan sebagainya). ❖



BAHAN BACAAN 2

POTRET DEMOKRASI INDONESIA: MAJU SELANGKAH, MUNDUR DUA LANGKAH Ringkasan Hasil Survei Nasional 2003-2004

Tim Peneliti DEMOS

Survei DEMOS yang lalu (2003-2004) mengenai 'Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di Indonesia' menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami ketekoran (defisit). Keadaan tekor itu ditandai, pada satu sisi, oleh berkembangnya sejumlah kebebasan sipil dan politik, namun tidak diimbangi oleh aspek-aspek esensial dan instrumental demokrasi lainnya, pada lain sisi.¹

Apakah kondisi demokrasi saat ini sudah mengalami perubahan? Temuan survei DEMOS 2007-2008² secara umum menunjukkan bahwa potret demokrasi Indonesia mengalami sejumlah kemajuan.

Informan kami memberikan penilaian bahwa hampir semua instrumen demokrasi mengalami perbaikan cukup berarti (signifikan). Celah tekor pun menjadi semakin sempit.

Namun begitu, membaiknya kondisi instrumen-instrumen demokrasi itu dibarengi dengan terhambatnya beberapa kebebasan sipil dan politik. Beberapa yang dianggap memburuk oleh informan adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berbicara, kebebasan mendirikan serikat buruh, serta akses publik terhadap berbagai pandangan

¹ Penjelasan lebih rinci mengenai ketekoran demokrasi serta hasil-hasil lainnya dari riset DEMOS terdahulu dapat disimak dalam: Priyono, AE., Willy Purna Samadhi, Olle Tornquist, *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan di Indonesia* (Jakarta: DEMOS, 2007, edisi revisi).

² Survei tahun 2007-2008 ini merupakan survei-ulangan dari riset sebelumnya (2003-2005) mengenai *Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokrasi di Indonesia*. Gagasan utama survei-ulangan ini adalah untuk melihat perubahan dari hasil-hasil utama survei sebelumnya dan ditujukan untuk mengantisipasi dinamika demokrasi menjelang Pemilihan Umum 2009.



dalam media massa.³ Karena itu, para informan kami secara umum memberikan penilaian bahwa potret kehidupan demokrasi kini ibarat 'tarian poco-poco': *two steps ahead, one step back* (maju dua langkah dan mundur selangkah)! Keadaan umum itulah yang kemudian akan dijabarkan lebih rinci pada uraian berikut.

Instrumen yang membaik dan yang memburuk

Potret demokrasi Indonesia menunjukkan sejumlah kemajuan, meskipun dalam beberapa hal masih tampak berjalan di tempat dan bahkan dalam hal-hal tertentu mengalami kemunduran. Secara umum, informan kami menilai indeks kinerja perangkat-perangkat formal yang diperlukan untuk mendorong

demokrasi naik sekitar 30 persen. Kemajuan itu antara lain terlihat pada aspek-aspek manajemen pemerintahan.⁴

Perbaikan kehidupan demokrasi tampak pula dari menguatnya proses rekayasa kelembagaan untuk demokrasi (*crafting democracy*). Karena itu, pandangan sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa pemerintah tak berbuat apa-apa dalam rangka memperbaiki bakuan manajemen kelembagaannya juga harus ditolak. Nyatanya, pemerintah telah melakukan sejumlah perbaikan, meskipun masih sebatas perbaikan prosedural. Namun, rekayasa kelembagaan dan perbaikan prosedural tidaklah cukup sebagai prasyarat bagi terciptanya proses demokrasi yang substansial.⁵

³ Tragedi yang menimpa Jama'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) akhir-akhir ini menjadi salah satu contoh nyata betapa kebebasan berkeyakinan —sebagai salah satu hak asasi yang dijamin undang-undang— diabaikan dan bahkan dinodai secara sangat norak. Contoh lain yang penad untuk disebut adalah 'kekalahan' majalah *Time* atas Soeharto yang sekaligus dikabulkannya tuntutan Soeharto agar *Time* membayar ganti-rugi sebesar Rp 1milyar. Kendati survei ini tidak memperlihatkan kemunduran dalam kebebasan pers, peristiwaini bisa mengancam kebebasan publik untuk mengakses berbagai pandangan yang disajikan media dan, lebih jauh lagi, bisa menjadi preseden buruk yang mengancam kebebasan pers.

⁴ Penanganan korupsi merupakan salah satu contoh di mana kinerja pemerintah mengalami perbaikan, meskipun dalam tindakannya pemerintah masih 'tebang-pilih'. Laporan Transparency International (TI) tahun 2007 menyebutkan bahwa penanganan korupsi yang dilakukan pemerintah Indonesia, indeksinya mengalami perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lihat: <www.ti.or.id>

⁵ Adanya lembaga-lembaga perwakilan —seperti, DPR, MPR, DPD, dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU)— baik di tingkat pusat maupun daerah menunjukkan bahwa prosedur demokrasi sudah berjalan di Indonesia. Akan tetapi keberadaan lembaga-lembaga itu tidak serta-merta menciptakan representasi politik yang baik.



Para informan menilai ada beberapa instrumen meningkat kinerjanya, terutama yang menyangkut kepatuhan pejabat pemerintahan dan pejabat publik terhadap hukum (*rule of law*), pemberantasan korupsi, dan kesetaraan di hadapan hukum. Instrumen demokrasi yang juga membaik adalah kemampuan pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter dan preman, *good corporate governance*, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Gejala perbaikan menyangkut instrumen-instrumen yang berkaitan dengan persoalan

pengelolaan negara itu bisa dijelaskan dengan mengaitkannya dengan agenda *good governance* yang memang dicanangkan oleh pemerintahan SBY-JK sejak awal.

Instrumen lainnya yang mengalami perbaikan dan menunjukkan indeks yang membaik adalah instrumen yang menyangkut hak memperoleh pekerjaan, akses media, partisipasi sipil, pendidikan, transparansi di masyarakat sipil, partisipasi langsung dan beberapa lagi. Lebih rinci dapat disimak pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Kinerja instrumen yang dianggap membaik

| No | Instrumen | Kinerja (%) | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| | | 2004 | 2007 |
| 1 | (4) Kesetaraan di hadapan hukum | 53 | 80 |
| 2 | (26) Independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan | 59 | 76 |
| 3 | (13) Tatakelola perusahaan yang baik | 72 | 79 |
| 4 | (22) Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dan birokrasi pada semua tingkatan | 75 | 78 |
| 5 | (3) Kepatuhan pejabat pemerintah terhadap hukum (<i>rule of law</i>) | 76 | 78 |

Persentase berbasis jumlah informan (n=876)

Nomor-nomor dalam kurung di depan setiap instrumen adalah nomor pertanyaan instrumen tersebut dalam kuisisioner. Demikian pula pada tabel-tabel berikutnya.

Adapun instrumen yang mengalami penurunan kinerja adalah yang berkenaan dengan soal transparansi militer, kemampuan partai

merefleksikan kepentingan konstituennya, pengaruh asing, keanggotaan partai, keterlibatan semua kelompok sosial,



kemampuan partai untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan, milisi, partisipasi langsung, *money politics*, *good corporate governance* dan kebebasan partai. Hampir semua instrumen ini sangat fundamental untuk demokrasi, termasuk

representasi dan kemandirian negara. Beberapa instrumen yang kinerjanya mengalami perubahan cukup menonjol, membaik dan memburuk dapat disimak pada Tabel 1.2. berikut.

Tabel 1.2. Kinerja instrumen yang dianggap memburuk

| No | Instrumen | Kinerja (%) | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| | | 2004 | 2007 |
| 1 | (23) Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah terpilih dan terhadap publik | 67 | 26 |
| 2 | (16) Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk memperjuangkan isu-isu vital dan kepentingan publik | 69 | 22 |
| 3 | (25) Independensi pemerintah dari pihak asing (kecuali berkenaan dengan pemberlakuan konvensi PBB dan hukum internasional lainnya) | 69 | 23 |
| 4 | (19) Adanya mekanisme kontrol anggota terhadap partai serta respon dan tanggungjawab partai dan para kandidat kepada konstituennya | 65 | 21 |
| 5 | (31) Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial –termasuk kelompok-kelompok marginal— terhadap kegiatan publik | 73 | 21 |
| 6 | (20) Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan | 76 | 21 |
| 7 | (32) Partisipasi langsung | 74 | 18 |

Persentase berbasis jumlah informan (n=876).



Jika dibandingkan dengan kualitas operasional peraturan dan ketentuan, secara umum kualitas hak-hak sipil dan politik tampaknya masih yang terbaik. Akan tetapi, jarak antara keduanya sudah tidak terlalu timpang. Namun begitu, gambaran secara umum menunjukkan bahwa ada beberapa persoalan baru menyangkut sejumlah kebebasan yang indeksinya justru memburuk, yaitu: kebebasan beragama, kebebasan berbicara, partisipasi warga negara di kalangan

masyarakat sipil, kebebasan berserikat bagi kelompok buruh, serta kebebasan pers dan media.

Selain itu, instrumen lain yang memburuk adalah soal gender, meskipun angka penurunannya tidak terlalu signifikan. Ini adalah satu-satunya instrumen yang dikatakan buruk oleh lebih dari 50% informan. Tabel 1.3. berikut menggambarkan berbagai instrumen kebebasan yang indeksinya mengalami penurunan.

Tabel 1.3. Indeks & peringkat yang memburuk

| No | Instrumen | 2004 | | 2007 | |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Indeks ¹ | Peringkat ² | Indeks ¹ | Peringkat ² |
| 1 | (27) Kebebasan beragama | 40 | 27 | 29 | 32 |
| 2 | (6) Kebebasan berbicara | 26 | 31 | 40 | 29 |
| 3 | (29) Partisipasi warga negara di kalangan masyarakat sipil | 38 | 28 | 46 | 27 |
| 4 | (7) Kebebasan berserikat bagi kelompok buruh | 43 | 25 | 49 | 25 |
| 5 | (28) Kebebasan pers dan media | 43 | 26 | 53 | 22 |

¹ Rentang angka indeks adalah 1 hingga 100. Semakin besar angka indeks menunjukkan instrumen semakin bagus.

² Rentang angka peringkat adalah 1 hingga 32. Semakin besar angka peringkat menunjukkan semakin bagus.

Dengan memperhatikan perubahan indeks masing-masing instrumen tersebut, setidaknya, ada dua hal mendasar yang perlu mendapatkan

perhatian serius, yaitu soal perbaikan kinerja manajemen pemerintahan dan peningkatan kebebasan. Jadi, selagi



pemerintah memperbaiki manajemen kelembagaannya, pemerintah juga dituntut untuk memberikan kebebasan yang luas, terutama menyangkut beberapa instrumen yang tampak sangat memburuk. Jika ini tidak dilakukan, maka kebebasan sebagai salah satu pondasi demokrasi sedang terancam.

Representasi masih tetap bermasalah

Kemunduran lainnya yang tampak dari data re-survei adalah soal representasi yang hingga kini masih bermasalah, bahkan ada indikasi

semakin memburuk dibandingkan dengan data riset dua putaran sebelumnya (2003-2004 dan 2005-2006). Padahal, masalah representasi ini merupakan salah satu unsur strategis yang harus dicermati dan diperbaiki untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang sedang berjalan. Data re-survei menunjukkan bahwa dari 12 instrumen terburuk sebagaimana yang terungkap dalam Tabel 1.4. di bawah ini, ditemukan 6 instrumen diantaranya berhubungan dengan masalah representasi.

Tabel 1.4. Kinerja RR dalam mempromosikan representasi

| No | Instrumen mempromosikan perangkat intrinsik demokrasi | Kualitas RR Kinerja (%) | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | Sangat mendukung | Sangat tidak mendukung | Tidak menjawab |
| 1 | Kewargaan (kesetaraan warga-negara; hak kaum minoritas, pendatang, dan pengungsi; rekonsiliasi konflik horizontal) | 77 | 21 | 2 |
| 2 | Kepatuhan pejabat publik dan pemerintah kepada aturan hukum | 78 | 21 | 1 |
| 3 | Hak atas pekerjaan, jaminan sosial dan kebutuhan pokok lainnya | 78 | 22 | 0 |
| 4 | Tata pemerintahan yang baik (<i>good corporate government</i>) | 79 | 20 | 1 |
| 5 | Kebebasan membentuk partai politik lokal dan nasional (atau calon independen) yang dapat merekrut anggota dan ikut Pemilu | 75 | 24 | 1 |

(tabel bersambung ke halaman berikutnya)



(sambungan tabel dari halaman sebelumnya)

Tabel 1.4. Kinerja RR dalam mempromosikan representasi

| No | Instrumen mempromosikan perangkat intrinsik demokrasi | Kualitas RR Kinerja (%) | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | Sangat mendukung | Sangat tidak mendukung | Tidak menjawab |
| 6 | Refleksi atas masalah utama & kepentingan rakyat oleh parati politik dan calon-calon legislatif mereka | 77 | 22 | 0 |
| 7 | Tidak lagi menyalahgunakan ajaran, simbol-simbol dan sentimen agama atau kesukuan oleh partai politik dan calon-calon legislatif | 79 | 20 | 1 |
| 8 | Ketidaktergantungan pada politik uang dan kelompok berkuasa besar oleh partai politik dan calon legislatif | 70 | 30 | 0 |
| 9 | Pengawasan partai politik oleh anggotanya; pertanggung-jawaban & pertanggung-gugatan partai politik dan calon-calon legislatif langsung kepada anggotanya | 79 | 21 | 0 |
| 10 | Partai-partai politik dan calon-calon legislatif berkemampuan membentuk dan menjalankan roda pemerintahan | 78 | 21 | 1 |
| 11 | Desentralisasi demokratis pemerintahan pada semua bidang yang tidak perlu lagi ditangani sendiri oleh pemerintahan pusat | 72 | 26 | 1 |
| 12 | Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dan calon-calon legislatif terpilih pada semua aras | 78 | 21 | 1 |

Persentase berbasis jumlah informan (n=876).



Tabel tersebut menunjukkan bahwa instrumen demokrasi yang berkaitan dengan representasi, sebagaimana diungkapkan, sangat strategis dan vital untuk perbaikan kualitas demokrasi. Tetapi, faktanya, 6 instrumen yang berkaitan dengan instrumen representasi ternyata memiliki kinerja yang buruk. Hanya satu di luar 6 instrumen tersebut yakni 'pemilu yang bebas dan adil' yang memiliki kinerja baik (85%). Bahkan jika kita melihat ke indeks dan peringkat dari instrumen 'kebebasan mendirikan partai politik' ada lompatan angka yang buruk yakni dari indeks (29%) dan peringkat (30) di tahun 2004 menjadi (60%) dan (11) di tahun 2007. Ini artinya, ada situasi yang memburuk karena terjadi perubahan lebih dari 100% untuk instrumen ini.

Masalah representasi yang masih bermasalah ini sebetulnya dapat disebut sebagai 'krisis representasi', karena hal itu tidak hanya instrumen demokrasi yang berhubungan dengan partai politik, tapi sudah melibatkan instrumen representasi yang lain. Kita bisa menyebutnya, seperti instrumen 'representasi langsung' (*direct representation*) serta 'akses dan partisipasi dalam kehidupan publik' yang masing-masing peringkatnya anjlok menjadi 8 dan 5 (2007) jika dibandingkan dengan peringkat sebelumnya, yakni 14 dan 23 (2004).

Peraturan formal versus ketentuan informal

Dalam beberapa instrumen, para informan menyatakan bahwa peraturan dan ketentuan informal bahkan tidak ada. Ini berlawanan

dengan tesis bahwa infrastruktur formal yang demokratis telah terselenggara. Sayangnya, kita tidak punya gambaran tentang hal ini di dalam survei 2004. Jadi kita tidak dapat mengukur apakah telah ada perubahan atau tidak, karena tidak ada pembandingan. Hasil semacam ini muncul mungkin karena kita memperluas cakupan riset dan menyertakan situasi lokal. Lebih dari 45% informan mengatakan ketiadaan peraturan formal yang menyangkut: transparansi militer, kepartaian --terutama dalam hal partai yang merefleksikan kepentingan konstituennya, kendali anggota terhadap partai, kemampuan partai untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan, kemampuan partai melawan milisi, kemampuan partai melawan pengaruh asing, serta pengikutsertaan semua kelompok sosial. Sedangkan sebanyak 16% dan 19% informan menyatakan bahwa peraturan formal itu tidak berlaku pada sejumlah instrumen, seperti: pemilihan umum, pendidikan, dan kebebasan berbicara.

Hampir semua peraturan formal indeksnya meningkat, kecuali peraturan formal yang menyangkut beberapa instrumen, seperti: penyertaan semua kelompok sosial, kebebasan berpartai, gender, kualitas media, serikat buruh, partisipasi dalam masyarakat sipil, kebebasan berbicara, serta kebebasan beragama. Kualitas lembaga-lembaga informal –di mana kita tidak mempunyai tabel terpisah untuk re-survei 2003-2004–



secara mengejutkan angkanya sangat tinggi, meski banyak yang berkata bahwa peraturan formal akan bagus jika budaya yang ada tidak mendukung demokrasi. Mayoritas informan menganggap bahwa hampir semua ketentuan informal cukup mendukung demokrasi. Sebaran dan substansi ketentuan informal tersebut tidaklah terlalu tinggi, meskipun juga tidak terlalu rendah.

Selain itu, sebagian besar informan re-survei menilai bahwa substansi dari peraturan formal dan ketentuan informal lebih buruk dari pada cakupannya. Sebaliknya, cakupan ketentuan informal lebih baik dari pada peraturan formalnya. Hal ini bisa jadi karena informan-informan kita agak sedikit 'menceng' (*biased*) pemahamannya tentang ketentuan informal. Kemungkinan lain, bisa juga

mereka hanya berpegang pada lingkungan dan pengalaman kehidupan mereka sendiri, bukan pada kenyataan kehidupan masyarakat kebanyakan umumnya yang mereka nilai.

Politik masih disikapi secara sinis

Secara umum, informan re-survei ini menilai bahwa sebagian besar masyarakat masih bersikap sinis menyikapi politik di Indonesia. Sebagian besar informan menilai bahwa masyarakat cenderung memahami politik sebagai alat untuk menggapai kekuasaan (54%), dan manipulasi para elit (17%), ketimbang alasan-alasan lainnya. Tabel 1.5. berikut dapat menjelaskan bagaimana sikap masyarakat memahami politik.

Tabel 1.5. Sikap terhadap partai politik

| No | Sikap terhadap partai politik | (%) |
|----|-------------------------------------|-----|
| 1 | Perjuangan untuk merebut kekuasaan | 54 |
| 2 | Kontrol rakyat atas urusan publik | 14 |
| 3 | Urusan para elit/tokoh | 12 |
| 4 | manipulasi kekuasaan oleh para elit | 17 |
| 5 | Sebagai pekerjaan/karir | 1 |
| 6 | Pengabdian | 0 |
| 7 | Tidak menjawab | 2 |

Persentase berbasis jumlah informan (N=876).



Namun demikian, sebagian besar informan memberikan penilaian bahwa ketertarikan masyarakat terhadap politik masih cukup besar, meskipun tidak terlampau tinggi (46%). Ini berarti bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menghindari politik, meskipun angka ketidaktertarikan masyarakat pun juga menunjukkan

jumlah yang cukup besar (40%). Angka ini bahkan lebih tinggi lagi diberikan oleh kelompok informan perempuan (50%). Dua tabel berikut (Tabel 1.6. dan 1.7.) dapat menjelaskan sejauh mana ketertarikan masyarakat terhadap politik.

Tabel 1.6. Minat terhadap politik

| No | Minat terhadap politik | (%) |
|----|------------------------|-----|
| 1 | Sangat berminat | 14 |
| 2 | Berminat | 46 |
| 3 | Tidak berminat | 40 |

Persentase berbasis jumlah informan (N=876).

Tabel 1.7. Minat perempuan terhadap politik

| No | Minat perempuan terhadap politik | (%) |
|----|----------------------------------|-----|
| 1 | Sangat berminat | 7 |
| 2 | Berminat | 42 |
| 3 | Tidak berminat | 50 |
| 4 | Tidak menjawab | 1 |

Persentase berbasis jumlah informan (N=876).

Pelajaran dari Aceh

Menyangkut sikap dan ketertarikan terhadap politik, kondisi di Aceh ternyata lebih 'baik'.⁶ Dalam hal memahami politik, informan di Aceh

tampaknya lebih progresif. Meskipun sebagian besar informan menilai bahwa masyarakat cenderung memahami politik sebagai alat

⁶ Lebih rinci dapat disimak dalam monograf *Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Tentang Demokrasi Berbasis Hak Asasi Manusia yang Bermakna di Aceh Pasca MoU Helsinki* (Jakarta: DEMOS, 2007, monografi tak diterbitkan).



untuk merebut kekuasaan (36 persen), namun sebagian besar lainnya menilai bahwa politik juga merupakan kontrol rakyat atas urusan publik (34 persen). Tabel 1.8. berikut

merupakan perbandingan sikap politik informan Aceh dengan informan re-survei nasional pada umumnya.

Tabel 1.8. Sikap terhadap partai politik: perbandingan resurvei nasional dengan Aceh

| No | Sikap terhadap partai politik | Survei Nasional (%) | Survei Aceh ¹ (%) |
|----|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | Perjuangan untuk merebut kekuasaan | 54 | 36 |
| 2 | Kontrol rakyat atas urusan publik | 14 | 34 |
| 3 | Urusan para elit/tokoh | 12 | 12 |
| 4 | manipulasi kekuasaan oleh para elit | 17 | 12 |
| 5 | Sebagai pekerjaan/karir | 1 | 5 |
| 6 | Tidak menjawab | 2 | 0 |

¹Data Aceh berasal dari survei khusus di daerah itu pada akhir 2006. Persentase berbasis jumlah informan (Survei Nasional n=876; Survei Aceh n=131).

Demikian pula dalam hal minat dan ketertarikan terhadap politik. Informan Aceh memperlihatkan minat politik yang lebih besar, baik di

kalangan informan umumnya (54 persen) maupun di kalangan informan perempuan (45 persen), seperti terlihat pada Tabel 1.9:

Tabel 1.9. Minat orang Aceh terhadap politik: perbandingan informan umum dengan perempuan

| No | Minat terhadap politik | Informan umum ¹ (%) | Perempuan ² (%) |
|----|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | Sangat berminat | 28 | 11 |
| 2 | Berminat | 55 | 45 |
| 3 | Tidak berminat | 16 | 41 |
| 4 | Tidak menjawab | 1 | 3 |

Persentase berbasis jumlah informan: ¹n=876 ²n=208



Pengalaman Aceh memberikan pelajaran kepada kita bahwa keterbukaan sistem politik di tingkat lokal bukan merupakan ancaman terhadap politik nasional.⁷

Sebaliknya, demokrasi di tingkat lokal justru dapat menjadi basis penting bagi penguatan demokrasi secara lebih luas dan bermakna.

Keterbukaan sistem politik, dengan begitu, dapat menjawab apatisme dan sinisme masyarakat sehingga mereka lebih apresiatif sikapnya sekaligus lebih tinggi minatnya terhadap politik.

Kesimpulan

Dari data dan uraian di atas, kesimpulan umum yang dapat dijadikan pelajaran adalah:

(1) Anggapan sementara pihak yang menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia telah gagal tidaklah sepenuhnya benar. Sebagian besar informan kami justru memberikan penilaian bahwa harapan akan demokrasi masih terbuka.

(2) Walaupun instrumen hak-hak sipil-politik terus membaik, namun sejumlah instrumen mengenai kebebasan justru mengalami kemunduran. Jika hal ini terus diabaikan maka demokrasi berada pada posisi yang berbahaya! Benar bahwa masih terdapat kebebasan, namun sejumlah kebebasan lainnya

mengalami kemunduran.

Termasuk juga soal kemandirian negara yang juga sedang dalam kondisi kritis, sementara sinisme masyarakat terhadap politik juga masih muncul.

Di tengah maraknya reaksi negatif kaum elit terhadap praktek sehari-hari demokrasi, ada pertanda kemajuan yaitu perbaikan 'manajemen' pemerintahan. Dibandingkan dengan hasil penelitian yang lalu (2003-2004), instrumen demokrasi yang berhubungan dengan tata-kelola pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas, pemberantasan korupsi, serta *rule of law*, tampak mengalami perbaikan. Hal ini sekaligus mempersempit sekat (*gap*) defisit sehingga tampak makin mengecil.

(3) Akan tetapi, secara umum, dasar-dasar demokrasi masih lemah. Ini berkaitan dengan masih langgengnya dominasi elit, lemahnya kemampuan politik rakyat dan mutu representasi yang masih tetap memburuk.

(4) Bahkan, ditemukan pula instrumen-instrumen yang kinerja maupun cakupannya semakin memburuk. Instrumen-instrumen yang semakin memburuk tentu perlu mendapat perhatian tersendiri untuk diantisipasi. Berikut beberapa instrumen yang

⁷ Kenyataan ini antara lain dapat disimak setelah keluarnya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang justru berimplikasi positif menyemarakkan ruang demokrasi lokal.



kinerjanya semakin memburuk dan perlu mendapat perhatian serius, yakni: partisipasi langsung, akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial, independensi pemerintah dari pihak asing, transparansi militer, serta beberapa instrumen yang berhubungan dengan partai politik, seperti kemampuan partai untuk membentuk dan

menjalankan pemerintahan, akuntabilitas partai tentang adanya mekanisme kontrol anggota terhadap partai, respon dan tanggungjawab partai kepada konstituennya, serta kemampuan partai merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan-kepentingan masyarakat luas. ❖



BAHAN BACAAN 3

MASALAH & PILIHAN DEMOKRASI di INDONESIA: Ringkasan Hasil Survei Nasional 2007-2008

Tim Peneliti DEMOS

Pada tahun 2003-2004, DEMOS dan unsur-unsur utama gerakan demokrasi mengembangkan dan menerapkan suatu kerangka kerja penilaian demokrasi di Indonesia yang dilakukan 'dari bawah' (*from below*). Suatu survei nasional yang melibatkan para pengkampanye senior dan pakar demokratisasi di semua propinsi tentang sejauh mana para pelaku (aktor) utama politik dan instrumen demokrasi yang ada di Indonesia benar-benar mendukung tujuan-tujuan demokrasi yang secara umum telah diterima. Dengan mengambil peristiwa pemilihan umum nasional 2004, survei ini juga dimaksudkan untuk melakukan pemetaan politik yang hasilnya bisa digunakan untuk mempengaruhi agenda-agenda politik menjelang dan sesudah pemilu nasional tersebut.

Kemudian, untuk mempengaruhi agenda politik pemilu nasional 2009, survei ulangan (re-survei) dilakukan pada tahun 2007 dengan mewawancarai lebih dari 900 informan yang dipilih berdasarkan kegiatan mereka dalam wilayah-wilayah utama gerakan demokratisasi. Setidaknya ada 13 isu gerakan yang dipilih sebagai latar pemilihan para informan tersebut, yakni: [1] perjuangan petani dan

nelayan; [2] gerakan buruh; [3] perjuangan bagi kelompok miskin kota; [4] gerakan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia; [5] gerakan anti-korupsi dan *good governance*; [6] demokratisasi sistem kepartaian; [7] pluralisme dan rekonsiliasi konflik; [8] demokratisasi pendidikan; [9] pengembangan profesionalisme; [10] kemerdekaan pers dan prinsip-prinsip jurnalisme; [11] perjuangan kesetaraan gender; [12] representasi alternatif di tingkat lokal; dan [13] pembangunan berkelanjutan.

Para informan ini lalu diwawancarai secara terstruktur melalui kuesioner yang terdiri atas beberapa bagian.

Fokus pertama dari pertanyaan survei adalah **kinerja, sebaran, dan cakupan dari 32 instrumen yang berguna bagi pemajuan dan penerapan demokrasi** yang berkaitan dengan: kesetaraan warga negara, konvensi HAM dan hukum internasional, *rule of law* dan keadilan, hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, pemilu yang bebas dan adil, representasi politik yang baik, pemerintahan yang demokratik dan akuntabel, kebebasan media pers dan



akademik, partisipasi sipil tambahan, dan partisipasi langsung.

Fokus kedua adalah **sejauh mana para pelaku politik sesungguhnya mendorong, menggunakan atau menyalahgunakan, dan bahkan menghindari perangkat-perangkat demokrasi** yang terdiri dari 32 instrumen tersebut.

Fokus ketiga adalah **kapasitas para pelaku politik untuk memajukan dan menggunakan perangkat-perangkat demokrasi tersebut**, yakni: dengan melibatkan diri dalam politik secara umum, mempunyai sumber kekuasaan yang relevan, kemampuan untuk mentransformasikan sumber kekuasaan tersebut menjadi otoritas dan legitimasi, kapasitas untuk mempolitisir isu dan kepentingan utama, mengorganisasikan dan memobilisir aksi kolektif, serta mendekati proses pengambilan keputusan dan institusi eksekutif pemerintahan baik secara langsung dan/atau melalui representasi.

Dari beberapa instrumen kuesioner tersebut, survei pertama DEMOS telah menghasilkan empat temuan umum;

Pertama, telah terjadi ketekoran (defisit) demokrasi. Terdapat seperangkat kebebasan sipil dan politik yang penting, namun ukuran pemenuhan hak-hak sosial ekonomi, kepastian hukum dan keadilan, pemerintahan yang bertanggungjawab, serta --yang terpenting-- keterwakilan politik, masih berada dalam keadaan yang amat buruk.

Kedua, sejalan dengan masih buruknya kualitas instrumen demokrasi di tingkat pemerintahan,

kualitas yang masih memprihatinkan juga terjadi pada representasi dan sistem kepartaian di Indonesia. Dalam hal ini, demokrasi tidak bisa dimajukan karena lembaga-lembaga representasi yang berkualitas belum tersedia secara memadai. Partai politik di Indonesia belum berfungsi secara maksimal dengan basis dukungan yang juga tidak berakar dan baru akan bekerja hanya menjelang pemilu. Ini merupakan masalah paling serius dan paling problematis.

Ketiga, hampir semua instrumen (hak dan institusi) yang dinilai mendukung demokrasi telah 'dibajak' oleh kaum elit. Survei ini dengan jelas menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia hanya dikuasai oleh para elit-oligarkis, yang memiliki pengaruh kuat yang dominan terutama dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Kelompok elit ini tidak hanya menguasai perangkat demokrasi di tingkat negara, namun juga telah memonopoli dan memanipulasinya untuk kepentingan mereka sendiri, termasuk di tingkat lokal.

Keempat, tidak hanya masyarakat luas, namun juga para aktivis pro-demokrasi di negeri ini tidak bisa berbuat banyak untuk memperbaiki situasi, karena mereka tidak mempunyai kapasitas untuk menggunakan berbagai instrumen demokrasi yang ada dan hanya membatasi kerja mereka di wilayah masyarakat sipil – di luar sistem politik. Dengan situasi ini, mereka berada pada posisi yang



mengambang dan terpinggirkan. Keadaan tersebut tidak jauh beranjak dengan survei ulangan berikutnya. Data yang ditunjukkan pada survei DEMOS 2007 semakin mengarah pada perkembangan demokrasi Indonesia yang telah berubah menjadi demokrasi elit yang terkonsolidasi dan memburuknya persoalan representasi. Hal tersebut, antara lain, ditunjukkan dengan membaiknya perangkat-perangkat yang berkaitan dengan tata pemerintahan (seperti *rule-of law*, anti korupsi dan akuntabilitas pemerintahan) —meski dari tingkat yang sangat rendah—namun di sisi lain kualitas perbaikan representasi makin melorot.

Di sisi lain, meski terdapat perbaikan di sana sini --yang ditunjukkan dengan telah berkembangnya komunitas politik yang bersifat nasional menggantikan negara-bangsa (*nation-state*) yang sedang goyah – meskipun masyarakat politik baru tersebut pada kenyataannya kemudian didominasi oleh politik elit dan identitas lokal, serta globalisasi ekonomi. Perbaikan juga ditunjukkan dengan peran militer yang semakin mundur dari politik, dan kekuatan lokal yang semakin meluas menggunakan aturan-aturan formal demokrasi – untuk kepentingan mereka.

Namun begitu, sebagian besar kebebasan dan hak yang relatif mengesankan pada awalnya, kini mandeg (*stagnant*), bahkan mengalami kemunduran. Para elit tampaknya lebih tertarik pada ‘politik keteraturan’. Untuk sebagian besar orang, institusi politik sangat tertutup. Meski para pro-demokrat telah

mengusahakannya, representasi kerakyatan menyangkut isu dan kepentingan yang berkaitan dengan kelas menengah, perempuan, buruh, petani dan nelayan, kaum miskin kota dan masyarakat adat, masih sangat buruk. Meski ada kebebasan dalam memilih, hanya mereka yang berkuasa dan berduit yang dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Secara ringkas, survei DEMOS ini menghasilkan beberapa temuan umum yang dikelompokkan pada empat gejala: [a] demokrasi yang berjalan goyah; [b] bangunan masyarakat politik nasional dalam bayang-bayang komunitas lokal; [c] demokrasi elit yang makin terkonsolidasi; dan [d] jalur pintas populis kaum pro-demokrasi yang mengabaikan upaya penguatan representasi.

Beberapa temuan umum tersebut diantaranya ditunjukkan dengan data yang menunjukkan gejala-gejala berikut:

(1) Kebebasan yang memburuk

Kesimpulan pertama survei ini adalah, bahwa meskipun kebebasan politik dan sipil terus dibuka lebar-lebar, tapi ternyata kemunduran justru terus terjadi sejak 2003-2004. Para informan kami menyatakan bahwa persoalan besar kemunduran tersebut tidak hanya menyangkut ‘kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan’, namun juga



'kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan lokal', 'kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi', 'kebebasan pers, dunia seni dan dunia akademis', 'partisipasi warganegara dalam organisasi masyarakat yang independen' dan 'akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, serta kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya,' mengalami kemunduran.

(2) Tata Kelola Pemerintahan membaik

Kesimpulan kedua menunjukkan bahwa usaha *top-down* (dari atas ke bawah) institusi pemerintah untuk meningkatkan kinerja *rule of law*, terutama pengendalian terhadap korupsi, boleh dibilang mengalami perbaikan atau membaik sejak 2003-2004. Perbaikan yang cukup mencolok berkaitan dengan 'kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (*rule of law*)', 'kesetaraan dan kesamaan di hadapan hukum', 'transparansi dan akuntabilitas pemerintah hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan', 'independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan', serta 'kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir'. Meski perbaikan-perbaikan itu berasal dan beranjak dari tingkat yang sangat rendah, namun cukup bisa diperhitungkan.

(3) Komunitas Politik Nasional

Telah Bekerja

Ketiga, disintegrasi Orde Baru yang sentralistik ternyata tidak mendorong terjadinya 'Balkanisasi' yang dicirikan oleh separatisme dan pembersihan etnis dan agama. Sebaliknya, yang terjadi adalah terbentuknya 'komunitas politik' (dan bukan etno-nasionalis) unitarian dengan ruang yang sangat lebar untuk politik lokal. Benar, bahwa adanya ruang ini memungkinkan terjadinya ketimpangan di antara propinsi-propinsi dan daerah-daerah, dan bahwa ruang tersebut telah seringkali dikuasai oleh kelompok-kelompok dominan. Upaya-upaya untuk mengembangkan politik demokratis yang berdasarkan isu dan kepentingan yang nyata-nyata berasal dari bawah diancam oleh politik identitas lokal dan elitis di satu sisi, dan globalisasi ekonomi di sisi yang lain. Akan tetapi, di Aceh, di mana donor-donor asing telah mengatasi kekuatan militer dan bisnis, dan di mana para separatis telah berhasil menggantikan perjuangan bersenjata dengan partisipasi politik, desentralisasi telah membuka jalan bagi terciptanya perdamaian dan demokrasi yang secara potensial berhasil.

(4) Stabilitas Relatif Demokrasi dengan Penyertaan Rakyat yang Elitis

Pada saat yang bersamaan, politik secara umum terus didominasi oleh kaum elit. Akan tetapi kali ini kelompok-kelompok elit ini berasal dari basis yang lebih luas, lebih lokal, dan tidak terlalu militeristik



jika dibandingkan dengan era Soeharto dulu. Sebagian besar dari mereka telah menyesuaikan diri dengan institusi-institusi baru (yang semestinya) demokrasi. Bukan berarti tak ada penyalahgunaan institusi tersebut, akan tetapi desentralisasi dan pemilihan umum terbuka telah membuat unsur-unsur elit yang lebih bervariasi di Indonesia mampu memobilisir dukungan popular.

(5) Monopolisasi Representasi

Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan segala potensi demokrasi? Persoalan utama adalah sistem representasi dan pemilihan umum di Indonesia tidak mengakomodasi kepentingan banyak orang. Organisasi-organisasi populer dan sipil juga masih sulit masuk ke dalam sistem politik. Selain itu, mereka juga dihambat oleh fragmentasi yang terjadi di antara mereka sendiri serta pengorganisasian massa yang lemah. Partai politik pada akhirnya hanya menjadi ajang kemenangan bagi orang atau kelompok bermodal besar. Karena itu, Indonesia masih tertinggal jauh di belakang, terutama dalam soal isu dan kepentingan rakyat yang terabaikan.

(6) Resiko yang harus Ditanggung: Kembali kepada Politik Keteraturan

Representasi yang lemah tidak hanya buruk bagi demokrasi, tetapi juga menghancurkan kesempatan orang-orang pada umumnya untuk menyalurkan pandangan dan kepentingan mereka –serta kemungkinan-kemungkinan untuk menggantikan pembagian kekuasaan yang tidak adil yang, pada gilirannya, menghambat terjadinya pembangunan yang bertanggung

jawab secara sosial dan pada kelestarian lingkungan. Tambahan pula, monopolisasi representasi akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap demokrasi. Yang paling mengkhawatirkan, kelompok masyarakat kelas menengah dan atas, yang tidak berhasil memenangkan pemilihan umum, akan menggunakan ketidakpuasan akan demokrasi elit ini untuk memperoleh dukungan atas usaha mereka menciptakan alternatif atas demokrasi dan mengkampanyekan ‘prakondisi yang lebih baik’ lewat ‘politik keteraturan’.

(7) Potensi yang ada: Representasi Populer

Maka, sudah menjadi keharusan jika organisasi-organisasi sipil dan populer dapat memperluas gagasan dan aliansi mereka. Dengan menghubungkan komunitas-komunitas dan berbagai bidang pekerjaan, pada tingkat lokal maupun nasional, mereka dapat mengimbangi kendali kaum elit atas politik. Survei dan beberapa studi kasus yang dilakukan DEMOS menunjukkan bahwa usaha untuk memperluas gerakan ke tingkat politik ini tidak hanya dihambat oleh monopolisasi elit dalam bidang politik, tetapi juga oleh aktivis politik dan kelompok sipil sendiri.

(8) Rekomendasi : Blok Politik Demokratik

Melihat kondisi tersebut, terutama menyangkut persoalan representasi yang memburuk, survei ini memberi beberapa



rekomendasi.

Pertama, kelompok-kelompok kewargaan dan kerakyatan di tingkat basis harus melakukan koordinasi — ketimbang sekadar menjadi lembaga politik tingkat menengah— antara isu-isu di tingkat ‘akar rumput’ (*grass root*) dengan perspektif yang ada di tingkat atas. Hal ini berguna untuk mendefinisikan *platform* bersama, serta mendapatkan dukungan dan aliansi yang lebih luas. Hal ini juga penting agar mereka dapat mengawasi dan mengendalikan para politisi, dan bukannya menjadi korban fragmentasi dan didominasi oleh berbagai partai atau para pelaku politik.

Kedua, koordinasi antar kelompok tersebut merupakan tempat di mana seharusnya kemungkinan untuk menggabungkan kegiatan-kegiatan parlementer dan non-parlementer, serta partisipasi representatif dan partisipasi langsung. Maka, DEMOS merekomendasikan agar gerakan sosial demokratik, serta asosiasi-asosiasi kerakyatan dan sipil yang ingin terjun ke arena politik, seharusnya membentuk suatu ‘Blok Politik Demokratik’ terkoordinasi dari tingkat lokal sampai nasional. ❖



Sesi 5

LANGKAH-LANGKAH MEMBENTUK BLOK POLITIK DEMOKRATIK

TUJUAN

- Peserta mengetahui garis-besar urutan langkah-langkah sistematis memprakarsai dan membentuk BPD.
- Peserta memahami kaidah-kaidah asas (prinsip) dan unsur-unsur terpenting yang mutlak diperhatikan dalam setiap urutan langkah tersebut.

POKOK BAHASAN

- Langkah-langkah Pembentukan BPD
- Kaidah-kaidah asas dan unsur-unsur penting dalam setiap langkah pembentukan BPD.

METODE & MEDIA

- Presentasi ringkasan hasil riset
- Telaah contoh kasus

BAHAN & PERALATAN

- Bahan Bacaan-4: 'Langkah-langkah Pembentukan BPD' (h.67-68)
- Lembar Kasus-4: 'Merintis Blok Politik Demokratik: Pengalaman Sumatera Utara & Nusa Tenggara Timur' (h.69-70)
- Papan tulis, kertas plano, spidol, LCD-proyektor + komputer.

WAKTU

2 jam efektif (1 sesi)

PROSES

- (1) Pengantar singkat tentang tujuan dan pokok bahasan sesi ini.
- (2) Bagikan bahan bacaan: 'Langkah-langkah Pembentukan BPD' kepada seluruh peserta.
- (3) Presentasi oleh narasumber (salah seorang Tim Peneliti DEMOS) yang menjelaskan lebih rinci tentang bahan bacaan tersebut ('Langkah-langkah Pembentukan BPD'). Selama presentasi, buka kesempatan luas kepada seluruh peserta untuk bertanya dan melakukan klarifikasi pengertian yang diperlukan.
- (4) Setelah presentasi dan diskusi dengan narasumber, segera bagikan lembar kasus 'Pengalaman Merintis BPD di Medan dan Kupang' kepada semua peserta. Minta peserta membacanya sekitar 5-10 menit, kemudian minta pendapat dan tanggapan mereka secara umum saja.
- (5) Ajukan beberapa pertanyaan kunci untuk mengembangkan berbagai kemungkinan penyempurnaannya atau semakin mempertajam rumusan langkah pembentukan BPD yang telah dirumuskan oleh DEMOS atau yang telah dicoba dipraktikkan dalam contoh kasus di Medan dan Kupang tersebut:
 - Ada pendapat atau saran tentang langkah-langkah tersebut?
 - Apakah urutan langkah-langkah tersebut memang cukup layak (*workable*) dilaksanakan di daerah asal (kabupaten/kota) masing-masing peserta? Mengapa?
 - Apa saja kemungkinan pengembangan (perubahan, penyesuaian, penyempurnaannya)? Mengapa dan bagaimana?



Catatan: jika memang waktu memungkinkan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, semua peserta dapat saja dibagi kembali dalam beberapa kelompok kecil, tetapi kali ini dengan sengaja dibagi menurut pengelompokan daerah asal, agar mereka lebih tajam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut (terutama pertanyaan kedua dan ketiga). Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah saat ini yang berpusat pada tingkat kabupaten/kota, maka pembagian kelompok menurut daerah asal peserta ini juga sebaiknya adalah menurut atau pada tingkat kabupaten/kota.

- (6) Tutup acara ini dengan kesimpulan umum bersama. ❖



LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN BLOK POLITIK DEMOKRATIK

Untuk membentuk BPD, terdapat empat tahap yang penting dilakukan. Tahapan tersebut meliputi:

- (1) membentuk 'Kelompok Pemrakarsa';
- (2) melakukan riset (pemetaan) politik;
- (3) menganalisis hasil pemetaan tersebut; dan
- (4) menginisiasi pertemuan/forum untuk menyepakati atau tidaknya gagasan pembentukan BPD berdasarkan analisis tersebut.

1. Membentuk Kelompok Pemrakarsa

Langkah pertama ini, pada dasarnya, adalah menggalang sejumlah kecil orang (*committed persons*) yang benar-benar menerima dan memahami dengan baik gagasan BPD. Tugas atau pekerjaan utama kelompok kecil ini (mungkin sekitar 3-4 orang saja) adalah mempersiapkan dan melaksanakan riset (pemetaan) politik lokal di daerah mereka. Tugas ini sangat menentukan, karena hasil riset atau pemetaan itulah nanti yang akan menjadi basis argumen utama mereka untuk menawarkan gagasan perlunya membentuk BPD kepada kalangan yang lebih luas. Penjelasan lebih rinci tentang Kelompok

Pemrakarsa ini akan diuraikan tersendiri pada bagian berikutnya nanti.

2. Melakukan riset (pemetaan) politik

Sesudah Kelompok Pemrakarsa terbentuk, mereka segera harus menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan riset (pemetaan) politik lokal. Pemetaan ini, pada dasarnya, bertujuan memetakan situasi dan kecenderungan perkembangan politik lokal (misalnya pada tingkat kabupaten/kota) secara sistematis dan menyeluruh. Data dan informasi yang diperlukan adalah semua aspek yang memungkinkan untuk menganalisis perkembangan politik dan demokratisasi di daerah tersebut. Penjelasan lebih rinci tentang cakupan materi dan metodologi riset ini akan diuraikan tersendiri pada bagian berikutnya nanti.

3. Menganalisis hasil pemetaan politik

Setelah seluruh data dan informasi hasil riset (pemetaan) tersebut terkumpul, Kelompok Pemrakarsa segera dapat



mengundang berbagai kalangan yang lebih luas untuk melakukan analisis bersama terhadap data dan informasi tersebut. Untuk itu, Kelompok Pemrakarsa dapat menyelenggarakan serangkaian forum pertemuan dan diskusi. Kesimpulan bersama dari forum-forum diskusi dan analisis inilah yang akan menentukan apakah gagasan pembentukan BPD yang ditawarkan oleh Kelompok Pemrakarsa memang sesuatu yang layak dilanjutkan atau tidak? Atau, sangat mungkin juga akan muncul gagasan baru yang dianggap 'lebih sesuai' dengan konteks politik lokal.

4. Membentuk Kelompok Kerja BPD

Jika rangkaian proses diskusi dan analisis bersama itu memang tiba pada suatu kesimpulan bersama

bahwa BPD adalah sesuatu yang dibutuhkan, maka pada saat inilah Kelompok Pemrakarsa menawarkan kepada kalangan yang lebih luas itu untuk membentuk satu 'Kelompok Kerja' mempersiapkan pembentukan BPD yang sesungguhnya. Para anggota Kelompok Pemrakarsa dapat saja terlibat kembali langsung sebagai bagian dari Kelompok Kerja tersebut, tetapi dapat juga tidak. Dengan kata lain, mandat dan keberadaan Kelompok Pemrakarsa berakhir pada saat Kelompok Kerja ini telah terbentuk. Kelompok Kerja inilah yang akan menginisiasi kelahiran atau merupakan cikal-bakal BPD yang sesungguhnya. Penjelasan lebih rinci tentang Kelompok Kerja ini akan diuraikan pada bagian berikutnya nanti. ❖



LEMBAR KASUS 4

MERINTIS BLOK POLITIK DEMOKRATIK **Pengalaman Sumatera Utara dan** **Nusa Tenggara Timur**

Mulanya adalah aksi. Aksi menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan; aksi mendorong dan meningkatkan keterlibatan rakyat dalam pengambilan kebijakan publik; atau aksi memperkuat politik kewargaan. Semuanya adalah aksi untuk meletakkan rakyat pada posisi sentral dalam kegiatan politik maupun ekonomi.

Orientasi pada aksi itu pulalah yang mendorong Kelompok Kerja Jaringan Demokrasi Sumatera Utara dan kemudian Nusa Tenggara Timur mengupayakan pemilihan langsung kepala daerah (PILKADA) sebagai ajang perbaikan kualitas perwakilan dan kepemimpinan. Untuk itu puluhan aktivis Organisasi Rakyat (OR) Organisasi Non Pemerintah (ORNOP), media, akademisi, rohaniwan dan politisi, berkumpul dan merumuskan platform politik bagi kemajuan demokrasi substansial, di kedua propinsi tersebut. Momen ini pulalah yang digunakan untuk membentuk 'Blok Politik Demokratik' (BPD).

Pembentukan BPD menemukan momentumnya karena: (a) PILKADA tidak berhasil menciptakan ruang bagi demokrasi populer; (b) PILKADA lebih banyak melahirkan elit politik lokal dengan karakter

kooptatif; (c) PILKADA menjadi ajang jual-beli atau sewa-menyewa 'perahu' partai politik bagi para kandidat. Melalui BPD, warga diharap dapat mengendalikan pemerintahan lokal, termasuk menjaring kandidat Gubernur yang mendukung nilai-nilai dan agenda demokrasi yang diputuskan oleh anggota BPD. Di samping itu, BPD dipercaya menjadi organisasi yang dapat mengkonsolidasi gerakan sosial dan mentautkannya dengan politik-formal.

Proses yang dilalui adalah dengan mengadakan pertemuan intensif selama beberapa hari dengan agenda merumuskan platform politik menghadapi pemilihan Gubernur. Peserta semaksimal mungkin merepresentasikan berbagai sektor masyarakat dan wilayah di propinsi setempat. Platform politik dirumuskan secara partisipatoris dengan orientasi pada cita-cita dan kepentingan masyarakat lokal, termasuk merespon persoalan-persoalan demokrasi setempat. Berbeda dengan agenda politik, diupayakan agar platform politik gerakan pro-demokrasi sangat terbatas jumlahnya.



Setelah perumusan platform politik yang dilakukan oleh tim kecil dengan merujuk pada proses diskusi sebelumnya dan dikoreksi secara bersama-sama oleh seluruh peserta yang kemudian membicarakan pembentukan BPD; yaitu blok politik yang terbuka dan memiliki mandat yang disepakati bersama untuk: (a) sosialisasi platform politik; (b) melakukan negosiasi dengan calon/kandidat Gubernur; dan (c) mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan raya BPD.

Tentu dengan sendirinya, peserta menyepakati: (a) anggota awal dari BPD tersebut; (b) memilih serta membentuk pengurus sementara BPD melalui proses demokrasi (termasuk *voting*) dan wewenangnya, dan (c) menyepakati mekanisme penggalangan dana (baik iuran maupun pencarian sumber dana lain). Keanggotaan BPD bersifat terbuka dan terdiri dari individu maupun organisasi. Pengurus sementara sangat diperlukan bukan saja untuk meneruskan jalannya BPD, tetapi juga untuk memperluas keanggotaan dan terbentuknya blok politik yang lebih permanen. Mekanisme penggalangan dana

diorientasikan pada penggalan iuran karena berkaitan dengan kepemilikan dan independensi BPD. Disepakati pula tempat sekretariat sementara hingga BPD terbentuk secara permanen.

Rintisan BPD yang telah dimulai di Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur tersebut juga kemudian diterapkan di Bali yang membentuk KORDEM yang mengarahkan 59 orang calon multipartai sebagai peserta pemilihan legislatif dalam pemilihan umum 2009. Sama seperti yang sudah dilakukan oleh satu jaringan organisasi rakyat di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Tidak semua upaya rintisan itu berjalan mulus, seperti di Sumatera Barat, dimana rintisan BPD ini baru sampai pada tingkat insiasi forum-forum warga, belum melangkah lebih jauh seperti di beberapa daerah lain tadi. Demikian pula di Sulawesi Selatan yang menghadapi kendala fragmentasi di kalangan organisasi dan gerakan masyarakat sipil di daerah tersebut . ❖



Sesi 6

MEMBENTUK KELOMPOK PEMRAKARSA BLOK POLITIK DEMOKRATIK

TUJUAN

- Peserta memahami pengertian dasar 'Kelompok Pemrakarsa' dalam keseluruhan proses pembentukan BPD.
- Peserta mampu secara simulatif menyusun formasi 'Kelompok Pemrakarsa' di daerah asal (kabupaten/kota) masing-masing sesuai dengan konteks lokalnya.

POKOK BAHASAN

- Pengertian dasar 'Kelompok Pemrakarsa' dalam rangka pembentukan BPD
- Langkah-langkah pembentukan 'Kelompok Pemrakarsa'

METODE & MEDIA

- Presentasi ringkasan hasil riset.
- Simulasi & Kerja Kelompok

BAHAN & PERALATAN

- Bahan Bacaan-5: 'Membentuk Kelompok Pemrakarsa BPD' (h.74-75)
- Papan tulis, kertas plano, spidol, LCD-proyektor + komputer.

WAKTU

2 jam efektif (1 sesi)

PROSES

- (1) Pengantar singkat tentang tujuan dan pokok bahasan sesi ini.
- (2) Bagikan bahan bacaan ‘Membentuk Kelompok Pemrakarsa BPD’ kepada seluruh peserta.
- (3) Presentasi dari narasumber (anggota Tim Peneliti DEMOS) yang menjelaskan lebih rinci isi bahan bacaan tersebut. (‘Membentuk Kelompok Pemrakarsa BPD’). Penjelasan ini sedapat mungkin memberi tekanan pada **pengertian dasar Kelompok Pemrakarsa hanya sebagai ‘kelompok perintis awal’, bukan BPD itu sendiri**. Selama presentasi, beri kesempatan kepada semua peserta untuk mengajukan pertanyaan dan klarifikasi pengertian.
- (4) Setelah presentasi dan diskusi dengan narasumber, segera bagi seluruh peserta dalam kelompok-kelompok kecil menurut daerah asal (kabupaten/kota) mereka.



Keterangan: sejak sesi ini pembagian kelompok menurut daerah asal (kabupaten/kota) peserta –tidak lagi secara acak seperti pada sesi-sesi sebelumnya— bersifat menetap sampai akhir pelatihan. Karena, sejak sesi ini, semua diskusi atau kerja kelompok akan selalu mengacu pada konteks lokal daerah asal para peserta. Jika ternyata ada hanya seorang peserta dari satu kabupaten/kota –sesuatu yang sebaiknya dihindari sejak persiapan pelatihan— maka peserta tersebut dapat saja digabungkan ke kelompok peserta dari kabupaten/kota terdekat atau yang memiliki banyak persamaan karakteristik sosial-politik dan budayanya.

- (5) Selama 30-45 menit, minta setiap kelompok membahas:
 - Apakah mereka sendiri memang bersedia untuk menjadi ‘Kelompok Pemrakarsa’ tersebut? Jika –karena berbagai alasan yang sangat relevan— ada di antara mereka yang tidak bersedia, bagaimana usulan jalan keluarnya?
 - Jika mereka merasa perlu menambah beberapa orang lagi –selain mereka sendiri— ke dalam ‘Kelompok Pemrakarsa’ ini, bagaimana kemungkinan-kemungkinannya? Apa saja kemungkinan hambatan atau kesulitannya, dan bagaimana mengatasinya?
 - Bagaimana dengan kemungkinan pendanaan kegiatan ‘Kelompok Pemrakarsa’ itu nanti dari sumber-sumber luar (donor)? (pengembangan pertanyaan yang ada dalam bahan bacaan).



Catatan: tahap ini merupakan salah satu bagian paling ‘menentukan’ (*crucial*) dalam pelatihan ini, karena sudah menyangkut pernyataan kesediaan para peserta untuk menjadi bagian dari ‘Kelompok Pemrakarsa’ yang akan merintis gagasan pembentukan BPD di daerah asal mereka. Karena itu, beri cukup waktu dan keleluasaan pada setiap peserta di kelompok mereka masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas secara tenang, tidak terburu-buru dan asal-asalan, terutama pertanyaan pertama. Sebenarnya, pertanyaan itu dapat saja ditiadakan jika persiapan pelatihan ini memang cukup baik, yakni telah menanyakan terlebih dahulu hal tersebut kepada para calon peserta sebelum pelatihan. Singkatnya, semua peserta benar-benar telah ‘terseleksi’ sebagai orang yang sudah menyatakan bersedia menjadi anggota ‘Kelompok Pemrakarsa BPD’ di daerahnya nanti.

(6) Presentasi hasil diskusi semua kelompok, masing-masing sekitar 5-10 menit per kelompok. Jika memang ternyata ada kelompok yang tidak semua anggotanya bersedia menjadi ‘Kelompok Pemrakarsa’, sebaiknya dibahas cara penyelesaian atau jalan keluarnya sampai tuntas (ada kesepakatan jalan keluar).

(7) Tutup sesi ini dengan satu rangkuman atau kesimpulan umum bersama yang, antara lain, menegaskan bahwa semua peserta yang bersedia sejak saat itu telah mejadi ‘Kelompok Pemrakarsa BPD’ nanti di daerah mereka. ❖



MEMBENTUK KELOMPOK PEMRAKARSA BLOK POLITIK DEMOKRATIK

PENGERTIAN

Kelompok Pemrakarsa adalah sekumpulan orang-orang yang akan menjadi perintis (pemrakarsa awal) pembentukan BPD. Merekalah yang akan bertanggung jawab terhadap tugas pemetaan konteks lokal, melakukan analisis, serta menginisiasi suatu pertemuan yang akan membahas bersama-sama hasil pemetaan tersebut.

Rangkaian tugas/tanggung jawab tersebut merupakan proses yang penting dilakukan, agar BPD tidak menjadi suatu organisasi yang 'tinggal jalan saja' (*instant*), tetapi dibentuk berdasarkan suatu kerangka yang jelas serta pemahaman terhadap kebutuhan dan konteks di wilayah masing-masing.

Karena hanya merupakan perintis dan kepanitiaan *ad hoc*, kelompok ini bersifat sementara. Yaitu hanya 'hidup' untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu yang akan dibahas kemudian. Begitu tugas ini selesai, secara otomatis 'Kelompok Pemrakarsa' akan bubar.

ANGGOTA

Pada dasarnya, anggota 'Kelompok Pemrakarsa' adalah siapa saja yang memiliki komitmen dan sumber daya untuk melakukan tugas-tugas perintisan BPD.

Namun harus diusahakan agar kelompok ini terdiri dari beragam latar belakang organisasi (diusahakan tidak berasal dari satu kelompok/organisasi yang sama), independen (non-partai politik dan non-bisnis) sehingga tidak terkesan 'ditanggung' oleh pihak tertentu.

Bisa saja prakarsa ini terbentuk dari KKJD (Kelompok Kerja Jaringan Demokrasi) yang sudah ada atau yang sudah terbentuk selama ini.

LEGITIMASI

Mengingat cukup tingginya fragmentasi, maka selain persoalan latar belakang dan independensi, maka diusahakan agar 'Kelompok Pemrakarsa' juga terdiri dari sekelompok orang yang telah memiliki reputasi baik dan diakui oleh komunitas gerakan pro-demokrasi pada umumnya.

PENDANAAN

Seharusnya, pendanaan kegiatan 'Kelompok Pemrakarsa' ini terutama berasal dari sumbangan perseorangan dan lembaga atau organisasi yang memang mendukung dan terlibat di dalamnya.



Timbul pertanyaan: apakah dimungkinkan untuk menerima dana dari donor untuk kegiatan tertentu saja, misalnya survei pemetaan politik lokal?

Pada dasarnya, menerima dana dari lembaga-lembaga donor (khususnya donor asing) dapat saja dilakukan, asalkan lembaga donor tersebut tidak turut campur dalam metodologi dan tujuan pemetaan. Tapi, memang, lembaga donor itu nanti juga akan meminta laporan hasil kegiatan yang didanainya, termasuk meminta hasil pemetaan, maka: apakah dengan demikian, donor juga ikut dalam proses-proses penelitiannya, khususnya dalam forum-forum diskusi fokus (FGD)? Atau, perlu ada presentasi terpisah dan khusus kepada donor yang bersangkutan? Lalu, apakah kita siap dengan konsekuensi bahwa donor akan menggunakan pemetaan tersebut untuk tujuan atau kepentingan lain yang berbeda atau bahkan mungkin bertentangan dengan tujuan kita sendiri?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada yang baku, semua tergantung pada bagaimana pembicaraan dan kesepakatan awal yang dilakukan dengan lembaga donor yang bersangkutan. Namun, jalan terbaik memang adalah bertumpu pada kekuatan sumberdaya pendanaan sendiri. Kalaupun membutuhkan bantuan dana dari lembaga donor, maka sebaiknya hal itu hanya merupakan

pelengkap saja, bukan yang utama.

TUGAS

Secara garis besar, terdapat lima tugas utama Kelompok Pemrakarsa:

- (1) Melakukan pemetaan politik dan keadaan demokrasi lokal;
 - (2) Mengolah data dan melakukan analisis terhadap hasil pemetaan tersebut;
 - (3) Mengadakan satu atau serangkaian forum yang akan membahas bersama hasil analisis tersebut, yang sekaligus menyepakati apakah di wilayah itu memang perlu dibentuk BPD;
 - (4) Jika pembentukan BPD disepakati, maka Kelompok Pemrakarsa ini bersama dengan forum membentuk pelaksana atau Kelompok Kerja (POKJA), yang akan mempersiapkan suatu kongres (forum yang lebih besar) yang melibatkan lebih banyak orang dan organisasi lagi; dan
 - (5) Dengan terbentuknya POKJA, maka tugas Kelompok Pemrakarsa beralih menjadi mengawasi pekerjaan serta menerima pertanggungjawaban dari POKJA.
- Kelompok Pemrakarsa bubar secara otomatis ketika POKJA menyelesaikan pekerjaannya, memberikan pertanggungjawaban, dan BPD telah terbentuk. ❖



MODUL-2

PEMETAAN POLITIK LOKAL



Sesi 7

MELAKUKAN PEMETAAN KEKUATAN POLITIK LOKAL (Bagian-1: Pengantar)

TUJUAN

- Peserta memahami pengertian, tujuan, cakupan, dan unsur-unsur utama analisis politik sebagai kerangka dasar melakukan pemerataan kekuatan politik lokal, khususnya dalam rangka pembentukan BPD.
- Peserta memahami arti penting dan menentukan dari pemetaan & analisis kekuatan politik lokal dalam keseluruhan proses pembentukan BPD.

POKOK BAHASAN

- Pengertian, tujuan, cakupan, dan unsur-unsur utama analisis politik untuk pemetaan kekuatan-kekuatan politik lokal dalam rangka pembentukan BPD.
- Kedudukan penting pemetaan politik lokal sebagai prasyarat mutlak dalam keseluruhan proses pembentukan BPD.

METODE & MEDIA

- Presentasi narasumber
- Diskusi pleno

BAHAN & PERALATAN

- Bahan Bacaan-6: 'Kerangka Dasar Analisis Politik' (h.81-83).
- Papan tulis, kertas plano, spidol, LCD-proyektor + komputer.

WAKTU

2 jam efektif (1 sesi)

PROSES

(1) Pengantar singkat dari fasilitator tentang tujuan dan pokok bahasan sesi ini.

(2) Bagikan bahan bacaan: 'Kerangka Dasar Analisis Politik'

(3) Presentasi dari narasumber (pelaksana riset DEMOS atau narasumber yang didatangkan khusus) menjelaskan bahan bacaan tersebut, mencakup:

- **Pengertian dasar** 'Analisis Politik'

- **Tujuan utama dan manfaat** nya

- **Unsur-unsur utama** nya

- **Metode dan langkah-langkah pokok** penerapannya

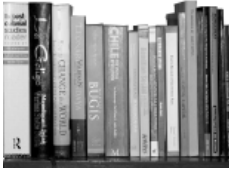
(4) Setelah presentasi, buka kesempatan kepada para peserta untuk melakukan tanya-jawab dengan narasumber, terutama tentang beberapa hal dari presentasi tersebut yang mereka rasa belum terlalu jelas. Minta narasumber menjelaskannya secara lebih rinci dan, jika perlu, dengan contoh-contoh nyata.

(5) Minta peserta mengajukan pendapat mereka sendiri tentang beberapa hal yang berkaitan dengan presentasi ini, misalnya:

- Apakah masih ada unsur-unsur penting dari kerangka analisis tersebut yang tidak atau belum mencakup berbagai realitas politik yang sesungguhnya di daerah mereka masing-masing?

- Dalam rangka pembentukan BPD, mengapa analisis politik semacam ini menjadi sangat penting dan menentukan, bahkan merupakan salah satu prasyarat mutlak nya?

(6) Tutup sesi ini dengan rangkuman kesimpulan umum dan penjelasan singkat bahwa beberapa sesi selanjutnya akan merupakan sesi latihan praktis (*exercise*) bagaimana melakukan pemetaan politik lokal berdasarkan kerangka analisis tersebut, terutama difokuskan pada analisis unsur kekuatan aktor-aktor (pelaku utama) politik dan relasi-relasi antar mereka di daerah asal seluruh peserta. ❖



ANALISIS POLITIK Kerangka Dasar

disarikan dari presentasi 'Analisis Politik' oleh
Nezar Patria

PENGERTIAN DASAR

Analisis Politik adalah pencarian penjelasan secara metodologis atas fenomena politik tertentu dengan menggunakan data empirik yang logis, signifikan dan relevan.

TUJUAN

Mencari hubungan kausalitas (sebab akibat) antara beberapa faktor, aktor, struktur dan kultur dari suatu fenomena politik.

MANFAAT

- Memetakan dan mengidentifikasi masalah dan pemecahannya
- Mengelola konflik politik
- Merencanakan dan merumuskan strategi
- Membangun jaringan dan aliansi
- Menjaga konsistensi agenda politik

BEBERAPA PENDEKATAN

(1) Pendekatan Aktor (*Rational choice approach*)

- Hanya aktor yang memilih, memiliki preferensi, dll
- Fokus pada hal2 yang bisa diobservasi langsung secara individual (perilaku memilih pengambilan keputusan, dan lain-lain)

- Percaya bahwa materi/kondisi material yang mempengaruhi kesadaran subjektif dan pertimbangan rasional aktor.

(2) Pendekatan Struktural atau Kelembagaan (*Structural approach*)

- Secara metodologis bersifat menyeluruh
- Mempelajari jaringan (*networks*), saling hubungan (*linkages*), saling ketergantungan (*interdependencies*), dan interaksi antar-bagian dalam suatu sistem sosial-politik.
- Fokus pada relasi dan konteks politik, ekonomi, dan sosial antar manusia.

(3) Pendekatan Budaya (*Cultural approach*)

- Norma/sistem nilai bersifat intersubjektif
- Berasumsi bahwa dalam diri individu selalu tertanam budaya tertentu mengikuti aturan sosial yang bersifat konstitutif terhadap identitas diri maupun kelompoknya.
- Percaya bahwa manusia selalu dipengaruhi oleh emosi, sikap,



pemahaman, dan hal subjektif lainnya, mempengaruhi interaksinya dengan manusia lain.

- Menekankan metode interpretasi

METODA

■ Induktif

Observasi atas fenomena yang spesifik/khusus, identifikasi faktor-faktor, dengan bantuan kerangka berpikir/teori, kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan awal.

■ Deduktif:

Mengkaji data dan fenomena yang ada di berbagai tempat/waktu, kemudian cari 'benang merahnya' dan akhirnya rumuskan penjelasan teoretis yang spesifik.

LANGKAH-LANGKAH

- (1) Identifikasi masalah;
- (2) Rumuskan pertanyaan analitis (mengapa, apa yang menyebabkan, bagaimana terjadi, dan seterusnya);
- (3) Pelajari penjelasan tentang masalah yang sama yang telah dianalisis di tempat lain atau kerangka analisis yang ada, tentukan variabel/faktor2 yang penting;
- (4) Penafsiran dan penjelasan atas fenomena yang diobservasi.

DIMENSI ANALISIS

(1) Sistem nilai, ideologi

- Individu bertindak atas dasar kepercayaan, gagasan, dan cara pikir yang hampir selalu

dipengaruhi oleh konsepsi keagamaan maupun politiknya (Weberian)

- Sistem nilai/ideologi menjadi dasar (*the moral order*) atau 'ethics' (apa yang seharusnya/sebaiknya dan apa yang tidak).

- Dasar sistem nilai/ideologi: nilai-nilai kewahyuan (*divinity*), individual (*liberalism, libertarian*, dan sebagainya), kelompok (komunisme, komunalisme, dan sebagainya).

(2) Struktur kekuasaan

- Infrastruktur kekuasaan meliputi pengaruh berbagai kelompok (sosial, keagamaan, ekonomi, dan lain-lain) dalam proses kebijakan dan pengaruh partai politik dalam mengagregasi kepentingan ke dalam alternatif kebijakan.

- Suprastruktur kekuasaan meliputi karakteristik distribusi dan pelaksanaan kekuasaan oleh lembaga pemerintah; dimensi kekuasaan (tingkat penggunaan koersi dan konsensus), pelaksanaan kekuasaan (tingkat koordinasi kelembagaan), distribusi kekuasaan (tingkat sentralisasi kekuasaan), intensitas kekuasaan (lingkup kekuasaan pemerintah dan otonomi infrastruktur dari kontrol pemerintah).

(3) Budaya politik

- Menghubungkan antara identitas individu dan kelompok

- Menentukan batas kelompok (*group boundaries*) dan mengorganisasikan aksi atau tindakan di dalam dan antar kelompok.

- Bisa menjadi suatu kerangka berpikir untuk menginterpretasikan tindakan dan motif aktor/kelompok lain.



■ Menjadi basis/sumber untuk organisasi dan mobilisasi politik.

■ Budaya politik kewargaan (*civic culture*) ditandai tiga ciri:

- (a) kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan warga negara lain yang berbeda latar belakang sosio-kulturalnya
- (b) kesediaan menaati pemerintah yang sah, dan
- (c) secara rasional aktif dan bersedia kompromi dalam proses politik.

(4) Perilaku dan partisipasi politik

■ Keikutsertaan warganegara dalam proses politik untuk menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (secara individu atau kolektif)

■ Lima lapisan pelaku partisipasi politik:

- (1) pemimpin/elit politik, komunikator politik,
- (2) aktivis politik,
- (3) warga biasa,

(4) kelompok marjinal (sedikit/terpinggirkan dalam interaksi politik),

(5) Kelompok terisolasi.

■ Tipe Partisipasi:

- (1) aktif (bila memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem politik/pemerintah),
- (2) pasif-tertekan/apatis (kesadaran politik dan kepercayaan rendah),
- (3) militan-radikal (kesadaran tinggi, tetapi kepercayaan rendah terhadap sistem politik/pemerintah rendah),
- (4) pasif (kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem politik/pemerintah juga rendah).

(5) Perubahan politik

■ Bisa bersifat linear, sirkuler maupun bertingkat.

■ Bisa melalui berbagai rute perubahan:

- (a) tradisional
- (b) transisional
- (c) modern: (revolusi sosial, liberalisasi, reformasi, dan lain-lain). ❖



Sesi 8

MELAKUKAN PEMETAAN KEKUATAN POLITIK LOKAL (Bagian-2: Mengidentifikasi Para Aktor Utama)

TUJUAN

Peserta mampu mengidentifikasi berbagai pelaku utama sebagai kekuatan politik penting di daerah asal masing-masing.

POKOK BAHASAN

Batasan pengertian pelaku utama sebagai kekuatan politik lokal di satu daerah.

METODE & MEDIA

- Diskusi & kerja kelompok.
- Presentasi & diskusi pleno.

BAHAN & PERALATAN

- Lembar Kerja-1: 'Identifikasi Pelaku Utama sebagai Kekuatan Politik Lokal' (h.87-90)
- Papan tulis, kertas plano, spidol, LCD-proyektor + komputer.

WAKTU

2 jam efektif (1 sesi)

PROSES

- (1) Pengantar singkat tentang tujuan dan pokok bahasan sesi ini.
- (2) Bagikan Lembar Kerja-1 (Identifikasi Pelaku Utama sebagai Kekuatan Politik Lokal) kepada setiap peserta. Jelaskan bahwa lembar kerja tersebut adalah cuplikan dari instrumen survei

(kuisisioner) ‘Pemantauan Demokrasi’ (Demwatch) yang pernah dikembangkan dan digunakan DEMOS pada tahun 2003-2004 dan 2007-2008 untuk suatu survei nasional. Untuk keperluan saat ini, maka hanya bagian tersebut yang dibagikan untuk membantu peserta lebih mudah melakukan identifikasi pelaku utama politik lokal di daerah masing-masing.

(3) Segera minta semua peserta kembali ke dalam kelompok kecil menurut asal daerah (kabupaten/kota) mereka masing-masing. Minta segera semua kelompok mulai bekerja, selama sekitar 45-60 menit, mengisi lengkap format lembar kerja tersebut.



Catatan: ada beberapa kemungkinan yang akan ditemui oleh setiap kelompok. Mungkin saja setiap anggota mengisi lembar kerjanya masing-masing terlebih dahulu, baru kemudian menggabungkan dan merangkumnya menjadi satu dengan semua anggota kelompok yang lain.

Mungkin juga mereka justru langsung melakukannya bersama-sama dengan menggunakan salah satu lembar kerja dari salah seorang anggotanya. Jelaskan bahwa terserah kepada setiap kelompok untuk menentukan cara kerja yang paling mereka anggap sesuai dan sepakati bersama. Yang penting adalah setiap kelompok menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan batas waktu (45-60 menit) yang tersedia.

(4) Selama proses kerja kelompok ini berlangsung, lakukan pengamatan kepada setiap kelompok. Beri penjelasan ulang lebih rinci atau bantuan teknis seperlunya pada kelompok yang mengalami kesulitan.

(5) Presentasi hasil perumusan setiap kelompok, masing-masing sekitar 10-15 menit per kelompok.



Catatan: agar menghemat waktu, sebaiknya semua kelompok mempresentasikan saja dulu hasil rumusan mereka, tidak segera dibahas setiap kelompok, tetapi dibahas seluruhnya setelah semua kelompok selesai.

(6) Pembahasan umum terhadap semua hasil presentasi kelompok, terutama yang menyangkut:

■ Adakah di antara para aktor politik lokal yang diidentifikasi oleh setiap kelompok yang sebenarnya tidak terlalu penting (tidak relevan atau tidak signifikan) untuk disebut atau diperhitungkan sebagai

kekuatan politik lokal di daerah yang bersangkutan? Mengapa?

(7) Jika masih tersedia cukup waktu, ajak seluruh peserta melakukan pengelompokan semua aktor politik lokal pada setiap daerah berdasarkan kategorisasi tertentu, misalnya: menurut latar belakang aktor-aktor tersebut yang mereka catat dalam lembar kerja.

Kategorisasi ini dapat dilanjutkan dengan membuat tabulasi sederhana, sehingga akan tampak berapa banyak aktor dari setiap jenis latar belakang. Ini akan membantu memberi gambaran awal tentang peta umum kekuatan politik di setiap daerah yang bersangkutan. Maka, pada papan tulis atau melalui proyektor-LCD, hasil tabulasi ini akan nampak sebagai berikut (contoh):

| Latar-belakang Aktor Politik Lokal | KABUPATEN/KOTA | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---|---|--------|
| | A | B | C | D | Jumlah |
| a Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | 3 | 5 | 0 | 8 | 16 |
| b Parlemen (pusat, daerah) | | dan seterusnya..... | | | |
| c Partai politik | | | | | |
| d Kelompok agama/etnis | | | | | |
| e Akademisi, pengacara, kalangan media | | | | | |
| f LSM/ORNOP | | | | | |
| g Organisasi massa bukan berbasis kelas | | | | | |
| h Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | | | | | |
| i Perusahaan/pengusaha swasta | | | | | |
| j Dewan Adat & lembaga tradisional semacamnya | | | | | |
| k Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | | | | | |
| l Lainnya (sebutkan): _____ | | | | | |

(8) Tutup sesi ini dengan rangkuman kesimpulan umum. ❖



LEMBAR KERJA 1

**IDENTIFIKASI PARA PELAKU UTAMA
SEBAGAI KEKUATAN POLITIK LOKAL**

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman anda selama ini, manakah aktor-aktor atau pelaku utama politik yang sangat berpengaruh (atau yang berpotensi untuk berpengaruh) dalam proses-proses politik di daerah anda? (Harap pertimbangkan bukan hanya yang saat ini memang sangat berpengaruh, tetapi juga yang mungkin akan berpengaruh di masa depan, termasuk organisasi-organisasi rakyat, jadi bukan hanya partai-partai politik atau organisasi besar yang sudah ada sekarang).

| No | Pelaku Utama (baik perseorangan maupun kelompok/organisasi) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | <p>Nama:</p> <hr/> <p>Latar-belakang:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="306 706 671 760">a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer)</td> <td data-bbox="722 706 1099 789">h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 778 667 808">b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah)</td> <td data-bbox="722 802 1066 851">i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 824 525 853">c <input type="checkbox"/> Partai politik</td> <td data-bbox="722 869 1066 924">j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & lembaga tradisional semacamnya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 869 638 899">d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis</td> <td data-bbox="722 942 1092 1026">k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 915 638 970">e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media</td> <td data-bbox="722 1042 1018 1071">l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan):</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 979 538 1008">f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP</td> <td data-bbox="808 1097 1092 1108">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1024 658 1079">g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas</td> <td></td> </tr> </table> | a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & lembaga tradisional semacamnya | d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): | f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | _____ | g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | |
| a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | | | | | | | | | | | | | | |
| b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & lembaga tradisional semacamnya | | | | | | | | | | | | | | |
| d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | | | | | | | | | | | | | | |
| e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): | | | | | | | | | | | | | | |
| f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <p>Nama:</p> <hr/> <p>Latar-belakang:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="306 1252 671 1306">a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer)</td> <td data-bbox="722 1252 1099 1335">h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1324 667 1354">b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah)</td> <td data-bbox="722 1348 1066 1397">i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1370 525 1399">c <input type="checkbox"/> Partai politik</td> <td data-bbox="722 1415 1066 1470">j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & lembaga tradisional semacamnya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1415 638 1445">d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis</td> <td data-bbox="722 1488 1092 1572">k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1461 638 1516">e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media</td> <td data-bbox="722 1588 1018 1617">l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan):</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1525 538 1554">f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP</td> <td data-bbox="808 1643 1092 1654">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1570 658 1625">g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas</td> <td></td> </tr> </table> | a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & lembaga tradisional semacamnya | d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): | f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | _____ | g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | |
| a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | | | | | | | | | | | | | | |
| b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & lembaga tradisional semacamnya | | | | | | | | | | | | | | |
| d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | | | | | | | | | | | | | | |
| e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): | | | | | | | | | | | | | | |
| f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | Pelaku Utama (baik perseorang maupun kelompok/organisasi) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | <p>Nama:</p> <p>Latar-belakang:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="233 311 598 365">a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer)</td> <td data-bbox="654 311 1030 396">h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 384 598 420">b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah)</td> <td data-bbox="654 407 1030 462">i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 425 598 462">c <input type="checkbox"/> Partai politik</td> <td data-bbox="654 467 1030 504">j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 473 598 527">d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis</td> <td data-bbox="654 509 1030 595">k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 515 598 569">e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media</td> <td data-bbox="654 600 1030 673">l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 575 598 611">f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 616 598 671">g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas</td> <td></td> </tr> </table> | a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | |
| a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | | | | | | | | | | | | | | |
| b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | | | | | | | | | | | | | | |
| d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | | | | | | | | | | | | | | |
| e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | | | | | | | | | | | | | | |
| g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <p>Nama:</p> <p>Latar-belakang:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="233 802 598 857">a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer)</td> <td data-bbox="654 802 1030 888">h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 880 598 917">b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah)</td> <td data-bbox="654 893 1030 948">i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 922 598 959">c <input type="checkbox"/> Partai politik</td> <td data-bbox="654 953 1030 990">j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 964 598 1019">d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis</td> <td data-bbox="654 1002 1030 1088">k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1006 598 1061">e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media</td> <td data-bbox="654 1093 1030 1166">l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1066 598 1102">f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1108 598 1162">g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas</td> <td></td> </tr> </table> | a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | |
| a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | | | | | | | | | | | | | | |
| b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | | | | | | | | | | | | | | |
| d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | | | | | | | | | | | | | | |
| e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | | | | | | | | | | | | | | |
| g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <p>Nama:</p> <p>Latar-belakang:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="233 1284 598 1339">a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer)</td> <td data-bbox="654 1284 1030 1370">h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1352 598 1388">b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah)</td> <td data-bbox="654 1375 1030 1430">i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1394 598 1430">c <input type="checkbox"/> Partai politik</td> <td data-bbox="654 1435 1030 1472">j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1443 598 1497">d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis</td> <td data-bbox="654 1477 1030 1563">k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1485 598 1539">e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media</td> <td data-bbox="654 1568 1030 1641">l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1545 598 1581">f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1587 598 1641">g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas</td> <td></td> </tr> </table> | a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | |
| a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | | | | | | | | | | | | | | |
| b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | | | | | | | | | | | | | | |
| d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | | | | | | | | | | | | | | |
| e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | | | | | | | | | | | | | | |
| g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | Pelaku Utama (baik perseorang maupun kelompok/organisasi) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | <p>Nama:</p> <hr/> <p>Latar-belakang:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="306 313 718 371">a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer)</td> <td data-bbox="723 313 1115 396">h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 385 718 418">b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah)</td> <td data-bbox="723 407 1115 465">i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 425 718 458">c <input type="checkbox"/> Partai politik</td> <td data-bbox="723 473 1115 505">j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 473 718 505">d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis</td> <td data-bbox="723 513 1115 596">k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 513 718 571">e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media</td> <td data-bbox="723 618 1115 677">l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 578 718 611">f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 618 718 677">g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas</td> <td></td> </tr> </table> | a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | |
| a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | | | | | | | | | | | | | | |
| b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | | | | | | | | | | | | | | |
| d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | | | | | | | | | | | | | | |
| e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | | | | | | | | | | | | | | |
| g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | <p>Nama:</p> <hr/> <p>Latar-belakang:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="306 804 718 862">a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer)</td> <td data-bbox="723 804 1115 888">h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 869 718 902">b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah)</td> <td data-bbox="723 895 1115 953">i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 910 718 942">c <input type="checkbox"/> Partai politik</td> <td data-bbox="723 968 1115 1001">j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 950 718 982">d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis</td> <td data-bbox="723 1008 1115 1092">k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 990 718 1048">e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media</td> <td data-bbox="723 1099 1115 1157">l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1055 718 1088">f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1095 718 1153">g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas</td> <td></td> </tr> </table> | a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | |
| a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | | | | | | | | | | | | | | |
| b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | | | | | | | | | | | | | | |
| d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | | | | | | | | | | | | | | |
| e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | | | | | | | | | | | | | | |
| g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <p>Nama:</p> <hr/> <p>Latar-belakang:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="306 1284 718 1343">a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer)</td> <td data-bbox="723 1284 1115 1368">h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1350 718 1383">b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah)</td> <td data-bbox="723 1375 1115 1434">i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1390 718 1423">c <input type="checkbox"/> Partai politik</td> <td data-bbox="723 1441 1115 1474">j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1430 718 1463">d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis</td> <td data-bbox="723 1481 1115 1565">k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1470 718 1528">e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media</td> <td data-bbox="723 1572 1115 1630">l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1536 718 1568">f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1576 718 1634">g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas</td> <td></td> </tr> </table> | a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | |
| a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | | | | | | | | | | | | | | |
| b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | | | | | | | | | | | | | | |
| d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | | | | | | | | | | | | | | |
| e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | | | | | | | | | | | | | | |
| g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | | | | | | | | | | | | | | | |



| No | Pelaku Utama (baik perseorang maupun kelompok/organisasi) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| 9 | <p>Nama:</p> <p>Latar-belakang:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="229 311 641 371">a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer)</td> <td data-bbox="646 311 1052 402">h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 387 641 420">b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah)</td> <td data-bbox="646 405 1052 465">i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 429 641 462">c <input type="checkbox"/> Partai politik</td> <td data-bbox="646 469 1052 511">j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 469 641 511">d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis</td> <td data-bbox="646 515 1052 606">k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 515 641 575">e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media</td> <td data-bbox="646 609 1052 680">l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 578 641 620">f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 624 641 684">g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas</td> <td></td> </tr> </table> | a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | |
| a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | | | | | | | | | | | | | | |
| b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | | | | | | | | | | | | | | |
| d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | | | | | | | | | | | | | | |
| e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | | | | | | | | | | | | | | |
| g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | <p>Nama:</p> <p>Latar-belakang:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="229 802 641 862">a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer)</td> <td data-bbox="646 802 1052 893">h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 875 641 917">b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah)</td> <td data-bbox="646 897 1052 957">i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 920 641 953">c <input type="checkbox"/> Partai politik</td> <td data-bbox="646 960 1052 1002">j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 960 641 1002">d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis</td> <td data-bbox="646 1006 1052 1097">k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1006 641 1066">e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media</td> <td data-bbox="646 1101 1052 1172">l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1070 641 1112">f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1115 641 1175">g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas</td> <td></td> </tr> </table> | a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | |
| a <input type="checkbox"/> Pemerintah/birokrasi (sipil maupun militer) | h <input type="checkbox"/> Organisasi massa berbasis kelas (misalnya: serikat buruh, petani, dsb) | | | | | | | | | | | | | | |
| b <input type="checkbox"/> Parlemen (pusat, daerah) | i <input type="checkbox"/> Perusahaan/pengusaha swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| c <input type="checkbox"/> Partai politik | j <input type="checkbox"/> Dewan Adat & semacamnya | | | | | | | | | | | | | | |
| d <input type="checkbox"/> Kelompok agama/etnis | k <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga negara (misalnya: KPK, KPU/ KPUD, KOMNAS, dll) | | | | | | | | | | | | | | |
| e <input type="checkbox"/> Akademisi, pengacara, kalangan media | l <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| f <input type="checkbox"/> LSM/ORNOP | | | | | | | | | | | | | | | |
| g <input type="checkbox"/> Organisasi massa bukan berbasis kelas | | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan:

Jika masih ada pelaku utama yang belum tercatat, silahkan menambahkan kertas kosong dengan format yang sama.



Sesi 9-10

MELAKUKAN ANALISIS KEKUATAN POLITIK LOKAL

TUJUAN

- Peserta memahami kerangka kerja dasar dan unsur-unsur utama analisis kekuatan politik.
- Peserta mampu menganalisis berbagai pelaku utama sebagai kekuatan politik lokal yang telah mereka petakan sebelumnya di daerah masing-masing.
- Peserta dapat menggunakan hasil pemetaan dan analisis kekuatan politik lokal tersebut untuk keperluan pembentukan BPD di daerah masing-masing.

POKOK BAHASAN

- Kerangka kerja dasar dan unsur-unsur utama analisis kekuatan politik.
- Analisis kekuatan politik lokal di daerah asal peserta menurut Kabupaten/Kota dan kegunaannya untuk keperluan pembentukan BPD.

METODE & MEDIA

- Simulasi & kerja kelompok.
- Presentasi & diskusi pleno.

BAHAN & PERALATAN

- Hasil pemetaan pelaku utama politik lokal setiap daerah asal kelompok peserta dari sesi sebelumnya.

- Bahan Bacaan-7: 'Analisis Kekuatan Politik Lokal' (h.95)
- Lembar Kerja-2: 'Tabel Analisis Kekuatan Politik Lokal' (h.96-104)
- Kertas-kertas metaplan berbagai warna yang berbeda (minimal 5-6 warna: kuning, merah, biru, hijau, putih, dan seterusnya)
- Papan tulis, kertas plano, spidol, LCD-proyektor + komputer.

WAKTU

4 jam efektif (2 sesi berurutan)

PROSES

(1) Pengantar singkat fasilitator tentang tujuan dan pokok bahasan sesi-sesi ini.

(2) Ingatkan semua peserta untuk menyiapkan kembali hasil pemetaan pelaku utama politik lokal daerah masing-masing dari sesi sebelumnya. Jelaskan bahwa hasil pemetaan itu akan menjadi bahan dasar kegiatan 2 sesi ini, yakni menganalisis hasil pemetaan tersebut berdasarkan satu kerangka dan teknik analisis tertentu, yakni terdiri dari tiga unsur utama:

- **Kekuasaan** (*Power*)
- **Kepentingan** (*Interest*)
- **Keabsahan** (*Legitimacy*)

(3) Untuk itu, segera bagikan bahan bacaan: 'Analisis Kekuatan Politik Lokal' kepada semua peserta. Lalu, jelaskan dengan proyektor LCD pengertian dari setiap unsur tersebut. Beri kesempatan kepada peserta untuk mempertanyakan hal-hal yang mereka anggap belum terlalu jelas dan jawab pertanyaan mereka tentang hal-hal tersebut.

(4) Segera minta seluruh peserta kembali lagi ke kelompok kecil menurut asal daerah (kabupaten/kota) mereka masing-masing.

(5) Bagikan kepada mereka Lembar Kerja-2 (Analisis Kekuatan Politik Lokal). Minta segera semua kelompok mulai bekerja mengisi lembar kerja tersebut, selama sekitar 45-60 menit, dengan urutan sebagai berikut:

- Pertama, isi dahulu Lembar Kerja tersebut sampai selesai
- Kedua, pindahkan atau terjemahkan hasil isian tersebut dalam bentuk 'Peta Pengelompokan dan Relasi' dengan menggunakan potongan-potongan kertas berwarna yang ditempelkan pada kertas

plano besar. Selama kerja kelompok ini, lakukan pengamatan berkeliling dan beri bantuan teknis kepada kelompok yang mengalami kesulitan.



Catatan: Mungkin saja ada kelompok peserta yang membawa peralatan komputer jinjing (laptop) dengan program grafis yang cukup memadai untuk membuat petanya langsung dalam format file elektronik. Jika ada yang demikian, maka beri mereka kebebasan untuk menggunakannya (tidak perlu lagi menggunakan potongan kertas-kertas berwarna yang ditempelkan ke kertas plano besar).

(5) Selama proses kerja kelompok ini berlangsung, lakukan pengamatan kepada setiap kelompok. Beri penjelasan ulang lebih rinci atau bantuan teknis seperlunya pada kelompok yang mengalami kesulitan.

(6) Umumkan jedah antar sesi.

(7) Segera lanjutkan sesi ini. Jelaskan bahwa kali ini setiap kelompok akan mempresentasikan hasil analisis dan pemetaan (baik tabek maupun peta warna-warni) mereka, masing-masing sekitar 10-15 menit per kelompok.

(8) Pembahasan umum terhadap semua hasil presentasi kelompok, terutama:

■ Apakah isian setiap unsur pada setiap kolom tabel (Kekuasaan, Kepentingan, Keabsahan) dari setiap aktor politik lokal pada setiap kelompok daerah memang sudah sesuai dengan pengertian tiap unsur tersebut?

■ Apakah peta-peta pengelompokannya kemudian memang masuk akal (logis) dan konsisten dengan isian tabelnya masing-masing?

(9) Lakukan analisis umum bersama:

■ Apa kesimpulan atau keputusan tiap kelompok tentang pelaku-pelaku politik mana saja di daerah masing-masing yang memang potensial untuk diajak membentuk BPD? Mengapa demikian?

■ Dapatkah dibuat skala penilaian (prioritas) pada setiap pelaku politik lokal tersebut (dari yang paling potensial sampai ke yang paling

tidak potensial)? Bagaimana caranya?

(10) Jika masih ada waktu, minta segera setiap kelompok menyusun daftar prioritas tersebut dan alasannya, kira-kira selama 10-15 menit saja, kemudian mempresentasikannya kembali segera dalam diskusi pleno.



Catatan: Jika waktu tidak terlalu banyak lagi, proses ini dapat dipercepat dengan meminta setiap kelompok menyebutkannya langsung saja dan fasilitator membantu menuliskannya langsung di papan tulis atau dengan menggunakan proyektor LCD. Untuk itu, siapkan sebelumnya satu daftar tabel yang tinggal diisi saja.

(11) Tutup sesi ini dengan rangkuman kesimpulan umum, terutama menegaskan apa kegunaan analisis dan pemetaan politik tersebut dengan keperluan pembentukan BPD. ❖



ANALISIS KEKUATAN POLITIK LOKAL

disarikan dari presentasi 'Analisis Politik' oleh Nezar Patria

PENGERTIAN DASAR

Analisis kekuatan politik lokal adalah mengukur kekuatan para pelaku politik di suatu daerah dengan menggunakan beberapa tolok-ukur tertentu.

TUJUAN

Membantu membuat profil dari pihak-pihak yang terlibat dalam satu persoalan politik atau rencana aksi politik.

UNSUR DASAR

Sebagai tolok-ukur utama penilaian, disini digunakan tiga unsur dasar. Tiga unsur dasar ini akan memberikan gambaran watak dan hubungan dari pihak berkepentingan pada satu situasi politik yang kongkrit, dan menggali cara untuk memecahkan masalah sosial dan politik.

(1) **Kekuasaan** (*Power*)

Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain dan menggunakan sumber-sumber yang terkendali untuk mencapai tujuan

tertentu. Sumber-sumber itu mencakup:

- Kekayaan (*wealth*)
- Otoritas politik
- Kemampuan menggunakan kekuatan (*forces*)
- Akses informasi (pengetahuan dan kecakapan), dan alat untuk komunikasi

(2) **Kepentingan** (*Interests*)

Kepentingan adalah untung (*gains*) dan rugi (*losses*) yang akan dialami berdasarkan hasil dari aksi atau rencana aksi yang ada. Untung-rugi ini akan berdampak pada akses ke kekuasaan, legitimasi, dan hubungan sosial.

(3) **Keabsahan** (*Legitimacy*)

Keabsahan dalam konteks analisis politik adalah pengakuan hak dan kewajiban oleh pihak lain dan mampu dengan tegas serta cakap menjalankan hak dan kewajiban itu berdasarkan hukum atau adat lokal. ❖



LEMBAR KERJA 2

ANALISIS KEKUATAN POLITIK LOKAL

Berdasarkan hasil identifikasi (pemetaan) para pelaku utama politik lokal di daerah anda (yang telah anda lakukan pada sesi sebelumnya), maka lakukanlah analisis kekuatan mereka masing-masing dengan mengisi kolom-kolom penilaian berikut:

Diskusikan dalam kelompok anda dan tuliskan secara singkat rincian dari tiap unsur pada setiap kolom.

| No | Nama Pelaku Utama (baik perseorangan maupun kelompok/ organisasi) | KEKUASAAN | KEPENTINGAN | KEABSAHAN |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | <p>Kekayaan:</p> <p>Otoritas politik:</p> <p>Kemampuan menggunakan kekuasaan:</p> <p>Akses informasi & alat komunikasi</p> | <p>Keuntungan yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya:</p> <p>Kerugian yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya:</p> | <p>Basis-basis massa, anggota atau organisasi yang menjadi sumber-sumber kekuatan utamanya:</p> |



| No | Nama Pelaku Utama (baik perseorangan maupun kelompok/ organisasi) | KEKUASAAN | KEPENTINGAN | KEABSAHAN |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | | <p>Kekayaan:</p> <p>Otoritas politik:</p> <p>Kemampuan menggunakan kekuasaan:</p> <p>Akses informasi & alat komunikasi</p> | <p>Keuntungan yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya:</p> <p>Kerugian yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya:</p> | <p>Basis-bass massa, anggota atau organisasi yang menjadi sumber-sumber kekuatan utamanya:</p> |
| 3 | | <p>Kekayaan:</p> <p>Otoritas politik:</p> <p>Kemampuan menggunakan kekuasaan:</p> <p>Akses informasi & alat komunikasi</p> | <p>Keuntungan yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya:</p> <p>Kerugian yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya:</p> | <p>Basis-bass massa, anggota atau organisasi yang menjadi sumber-sumber kekuatan utamanya:</p> |



| No | Nama Pelaku Utama (baik perseorangan maupun kelompok/ organisasi) | KEKUASAAN | KEPENTINGAN | KEABSAHAN |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | | Kekayaan: Otoritas politik: Kemampuan menggunakan kekuasaan: Akses informasi & alat komunikasi | Keuntungan yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: Kerugian yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: | Basis-bass massa, anggota atau organisasi yang menjadi sumber-sumber kekuatan utamanya: |
| 5 | | Kekayaan: Otoritas politik: Kemampuan menggunakan kekuasaan: Akses informasi & alat komunikasi | Keuntungan yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: Kerugian yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: | Basis-bass massa, anggota atau organisasi yang menjadi sumber-sumber kekuatan utamanya: |



| No | Nama Pelaku Utama (baik perseorangan maupun kelompok/ organisasi) | KEKUASAAN | KEPENTINGAN | KEABSAHAN |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | | Kekayaan: Otoritas politik: Kemampuan menggunakan kekuasaan: Akses informasi & alat komunikasi | Keuntungan yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: Kerugian yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: | Basis-bass massa, anggota atau organisasi yang menjadi sumber-sumber kekuatan utamanya: |
| 7 | | Kekayaan: Otoritas politik: Kemampuan menggunakan kekuasaan: Akses informasi & alat komunikasi | Keuntungan yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: Kerugian yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: | Basis-bass massa, anggota atau organisasi yang menjadi sumber-sumber kekuatan utamanya: |



| No | Nama Pelaku Utama (baik perseorangan maupun kelompok/ organisasi) | KEKUASAAN | KEPENTINGAN | KEABSAHAN |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | | Kekayaan: Otoritas politik: Kemampuan menggunakan kekuasaan: Akses informasi & alat komunikasi | Keuntungan yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: Kerugian yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: | Basis-bass massa, anggota atau organisasi yang menjadi sumber-sumber kekuatan utamanya: |
| 9 | | Kekayaan: Otoritas politik: Kemampuan menggunakan kekuasaan: Akses informasi & alat komunikasi | Keuntungan yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: Kerugian yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: | Basis-bass massa, anggota atau organisasi yang menjadi sumber-sumber kekuatan utamanya: |



| No | Nama Pelaku Utama (baik perseorangan maupun kelompok/ organisasi) | KEKUASAAN | KEPENTINGAN | KEABSAHAN |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | | Kekayaan: Otoritas politik: Kemampuan menggunakan kekuasaan: Akses informasi & alat komunikasi | Keuntungan yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: Kerugian yang diperoleh dari tindakan-tindakan politiknya: | Basis-bass massa, anggota atau organisasi yang menjadi sumber-sumber kekuatan utamanya: |

TABEL REKAPITULASI PADA HALAMAN BERIKUTNYA

Catatan:

Jika masih ada pelaku utama yang belum tercatat, atau lembaran ini tidak mencukupi, silahkan menambahkan kertas kosong dengan format yang sama.

**REKAPITULASI
PENILAIAN UMUM**

Berdasarkan isi tabel-tabel sebelumnya, lakukanlah rekapitulasi penilaian umum anda pada semua kekuatan politik lokal tersebut pada tabel berikut:

| No | Nama Pelaku Utama | KEKUASAAN | KEPENTINGAN | KEABSAHAN |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | <input type="checkbox"/> Sangat besar <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil <input type="checkbox"/> Sangat kecil | <input type="checkbox"/> Sangat banyak <input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Sedikit <input type="checkbox"/> Sangat sedikit | <input type="checkbox"/> Sangat kuat <input type="checkbox"/> Kuat <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Lemah <input type="checkbox"/> Sangat lemah |
| 2 | | <input type="checkbox"/> Sangat besar <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil <input type="checkbox"/> Sangat kecil | <input type="checkbox"/> Sangat banyak <input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Sedikit <input type="checkbox"/> Sangat sedikit | <input type="checkbox"/> Sangat kuat <input type="checkbox"/> Kuat <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Lemah <input type="checkbox"/> Sangat lemah |
| 3 | | <input type="checkbox"/> Sangat besar <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil <input type="checkbox"/> Sangat kecil | <input type="checkbox"/> Sangat banyak <input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Sedikit <input type="checkbox"/> Sangat sedikit | <input type="checkbox"/> Sangat kuat <input type="checkbox"/> Kuat <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Lemah <input type="checkbox"/> Sangat lemah |
| 4 | | <input type="checkbox"/> Sangat besar <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil <input type="checkbox"/> Sangat kecil | <input type="checkbox"/> Sangat banyak <input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Sedikit <input type="checkbox"/> Sangat sedikit | <input type="checkbox"/> Sangat kuat <input type="checkbox"/> Kuat <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Lemah <input type="checkbox"/> Sangat lemah |
| 5 | | <input type="checkbox"/> Sangat besar <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil <input type="checkbox"/> Sangat kecil | <input type="checkbox"/> Sangat banyak <input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Sedikit <input type="checkbox"/> Sangat sedikit | <input type="checkbox"/> Sangat kuat <input type="checkbox"/> Kuat <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Lemah <input type="checkbox"/> Sangat lemah |

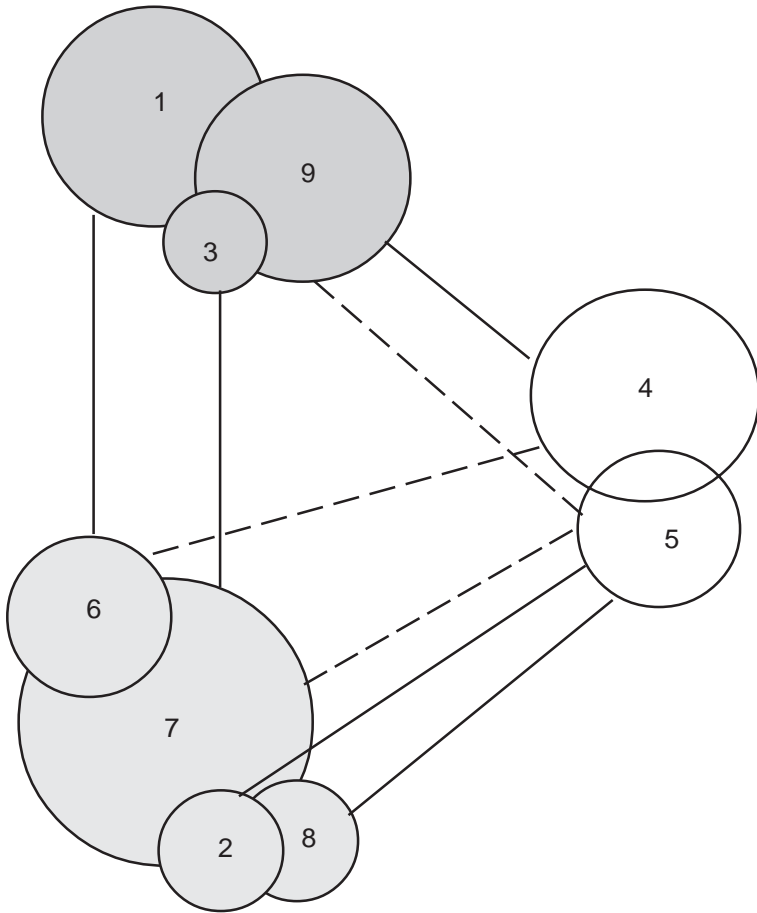
**REKAPITULASI PENILAIAN UMUM**

| No | Nama Pelaku Utama | KEKUASAAN | KEPENTINGAN | KEABSAHAN |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | | <input type="checkbox"/> Sangat besar <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil <input type="checkbox"/> Sangat kecil | <input type="checkbox"/> Sangat banyak <input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Sedikit <input type="checkbox"/> Sangat sedikit | <input type="checkbox"/> Sangat kuat <input type="checkbox"/> Kuat <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Lemah <input type="checkbox"/> Sangat lemah |
| 7 | | <input type="checkbox"/> Sangat besar <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil <input type="checkbox"/> Sangat kecil | <input type="checkbox"/> Sangat banyak <input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Sedikit <input type="checkbox"/> Sangat sedikit | <input type="checkbox"/> Sangat kuat <input type="checkbox"/> Kuat <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Lemah <input type="checkbox"/> Sangat lemah |
| 8 | | <input type="checkbox"/> Sangat besar <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil <input type="checkbox"/> Sangat kecil | <input type="checkbox"/> Sangat banyak <input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Sedikit <input type="checkbox"/> Sangat sedikit | <input type="checkbox"/> Sangat kuat <input type="checkbox"/> Kuat <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Lemah <input type="checkbox"/> Sangat lemah |
| 9 | | <input type="checkbox"/> Sangat besar <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil <input type="checkbox"/> Sangat kecil | <input type="checkbox"/> Sangat banyak <input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Sedikit <input type="checkbox"/> Sangat sedikit | <input type="checkbox"/> Sangat kuat <input type="checkbox"/> Kuat <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Lemah <input type="checkbox"/> Sangat lemah |
| 10 | | <input type="checkbox"/> Sangat besar <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kecil <input type="checkbox"/> Sangat kecil | <input type="checkbox"/> Sangat banyak <input type="checkbox"/> Banyak <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Sedikit <input type="checkbox"/> Sangat sedikit | <input type="checkbox"/> Sangat kuat <input type="checkbox"/> Kuat <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Lemah <input type="checkbox"/> Sangat lemah |

Catatan: Jika masih ada pelaku utama yang belum tercatat, atau lembaran ini tidak cukup, silahkan tambahkan kertas kosong dengan format sama.



Berdasarkan hasil rekapitulasi umum tersebut, sekarang buatlah peta relasi antar semua kekuatan politik lokal tersebut berdasarkan irisan kekuatan, kepentingan, dan keabsahan mereka masing-masing. Buatlah peta tersebut pada kertas lain, atau dengan potongan kertas-kertas berwarna yang berbeda, lalu tempelkan pada kertas plano besar. Contoh (nomor adalah nomor pelaku dari daftar tabel, sementara besarnya bulatan potongan kertas menampilkan besar/banyak/kuatnya kekuatan setiap pelaku):



Atau, anda punya bentuk konfigurasi lain yang lebih baik?

Misalnya berdasarkan orientasi ideologi atau kecenderungan pandangan dan sikap politik mereka? Silahkan mencoba memetakannya. Anda bebas menggambarkan peta anda sendiri, tidak selalu harus sama dengan contoh ini (yang memang hanya sebagai contoh saja). Yang penting, peta itu adalah hasil diskusi kelompok anda berdasarkan semua data dari tabel-tabel sebelumnya.



MODUL-3

**RENCANA TINDAK-LANJUT
& EVALUASI PELATIHAN**



Sesi 11

MEMBENTUK KELOMPOK KERJA BLOK POLITIK DEMOKRATIK

TUJUAN

- Peserta memahami pengertian Kelompok Kerja BPD dan mampu membedakannya dengan Kelompok Pemrakarsa BPD.
- Peserta mengetahui langkah-langkah dan cara-cara memulai dan membentuk Kelompok Kerja BPD.

POKOK BAHASAN

Pembentukan Kelompok Kerja BPD

METODE & MEDIA

- Presentasi hasil riset
- Diskusi kelompok.

BAHAN & PERALATAN

- Bahan Bacaan-8: 'Membentuk Kelompok Kerja Blok Politik Demokratik' (h.109-112)
- Papan tulis, kertas plano, spidol, LCD-proyektor + komputer.

PROSES

- (1) Pengantar singkat tentang tujuan dan pokok bahasan sesi ini.
- (2) Bagikan bahan bacaan 'Membentuk Kelompok Kerja BPD' kepada semua peserta.
- (3) Presentasi fasilitator (atau pelaksana riset DEMOS) menjelaskan bahan bacaan tersebut ('Membentuk Kelompok Kerja BPD'), antara lain, dengan menekankan **perbedaan pentingnya dengan 'Kelompok Pemrakarsa BPD' yang dibentuk pada tahap sebelumnya**. Presentasi harus ditekankan pada **alasan dan tujuan**

pembentukannya, fungsi dan perannya, siapa saja yang dapat menjadi anggotanya, mekanisme kerjanya, dan batasan mandatnya. Selama presentasi, beri kesempatan kepada semua peserta untuk menanggapi, menanyakan dan meminta klarifikasi pada hal-hal yang belum jelas bagi mereka. Buka kemungkinan mereka menambahkan hal-hal yang mereka anggap perlu atau khas (unik) pada situasi politik lokal daerah (kabupaten/kota) masing-masing.

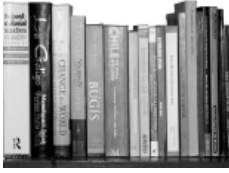
(4) Ajak seluruh peserta membahas berbagai kemungkinan menerapkan semua panduan dasar dari DEMOS tersebut dalam rangka membentuk Kelompok Kerja BPD di daerah asal (kabupaten/kota) masing-masing:

- Adakah hal-hal khusus tertentu yang khas (unik) di daerah asal masing-masing yang perlu ditambahkan dalam bagian-bagian tertentu dari panduan yang dipresentasikan DEMOS (misalnya, dalam hal penentuan tolok-ukur keanggotaan, cara perekrutan, dan sebagainya)? Mengapa hal-hal semacam itu perlu dipertimbangkan di daerah yang bersangkutan? Apakah justru tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan ideal pembentukan BPD nanti disana?
- Bagaimana caranya agar Kelompok Kerja BPD itu nanti dan cara-cara kerja mereka tidak menjadi 'sangat teknokratik'? Bagaimana caranya menghindari kecenderungan umum yang kuat semacam itu?
- Bagaimana caranya agar Kelompok Kerja BPD itu anti juga tidak terjebak menjadi suatu 'kelompok eksklusif elit oligarkis'? Bagaimana caranya mencegah agar tidak terjadi kecenderungan terjebak dalam 'perangkap para pendiri' (*founder's traps*) seperti 'perasaan memiliki yang berlebihan', atau bahkan gejala '*post-power syndrome*' setelah BPD itu nanti bubar (menyelesaikan tugas utamanya membentuk BPD yang sesungguhnya)?



Keterangan: Daftar pertanyaan kritis ini dapat diperluas atau ditambahkan lagi sesuai dengan pengalaman yang pernah ada, misalnya dari contoh-contoh 'kegagalan' banyak bentuk persekutuan (koalisi, jaringan, aliansi, front) selama ini, khususnya di Indonesia, yang akhirnya melenceng jauh dari tujuan awal pembentukan (*raison d'être*) nya, atau bahkan 'mati suri', hanya karena terjebak dalam kecenderungan-kecenderungan atau gejala *trivial* (tidak penting) tersebut.

(5) Tutup sesi ini dengan rangkuman kesimpulan umum. ❖



MEMBENTUK KELOMPOK KERJA BLOK POLITIK DEMOKRATIK

Pembentukan blok politik diawali oleh pembentukan kelompok inisiatif. kelompok inisiatif kemudian melakukan pemetaan, evaluasi, serta memfasilitasi pertemuan yang akan menyepakati terbentuknya blok politik.

Karena blok diharapkan diinisiasi dari bawah, maka dalam bab ini tidak akan memperinci seperti apa bentuk organisasi blok politik. Hanya saja, demi menjaga agar blok politik berfungsi sebagai representasi politik masyarakat secara substansial, maka tetap harus ada acuan dasar yang menjadi kerangka organisasi blok.

Acuan tersebut meliputi:

- (1) Prinsip-prinsip dasar
- (2) Kapasitas minimal
- (3) Keanggotaan dan Proses Pengambilan Keputusan
- (4) Agenda (Isu dan Kebijakan) Utama

Beberapa Prinsip Dasar Pembentukan dan Organisasi

- BPD secara eksplisit dan prinsipil adalah pro-demokratis. Hal ini terkandung dalam seluruh aspek di dalamnya, mulai dari pembentukan blok hingga pengambilan keputusan.
- BPD difasilitasi oleh sebuah satuan tugas (pokja) dari atas, tetapi dibentuk dari bawah oleh individu dan organisasi serta gerakan yang ada di berbagai tingkatan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi,

bahkan nasional), termasuk wakil blok-blok politik yang berada di bawahnya.

- BPD tidak dibentuk berdasarkan persatuan karena seorang figur tertentu atau partai tertentu, tetapi karena sebuah platform minimum yang menuntut hak-hak dan kebijakan publik serta tuntutan kepada lembaga-lembaga non-publik seperti perusahaan, organisasi bisnis, milisi dan lembaga keagamaan atau etnis.

- Platform minimum harus mengakomodasi dan mengagregasi kepentingan gerakan demokrasi yang menyangkut kepentingan banyak orang.

- BPD bersifat independen, dalam pengertian tidak didirikan atas kepentingan atau tujuan beraliansi dengan partai politik.

- BPD menempatkan dirinya sebagai lembaga *intermediary* antara (1) jaringan, gerakan dan organisasi yang fokus pada isu dan kepentingan sepihak, dan (2) partai politik dan kandidat politik.

- BPD merupakan organisasi permanen, bukan koalisi atau aliansi taktis, sekalipun ketika terbentuk didorong/dipicu (*triggered*) oleh isu atau momentum tertentu.

- BPD dapat bekerja sama dengan aliansi/front/blok politik lain.

- Di kemudian hari, BPD bisa saja



berkembang menjadi partai politik. Namun BPD tidak mesti berubah menjadi partai politik.

Kapasitas (Minimal) yang Harus Dimiliki oleh BPD

- Oleh karena BPD merupakan organisasi yang mandiri (independen), maka ia harus bertumpu pada anggotanya. Baik dalam bentuk pendanaan, fasilitas operasional (sekretariat dsb), serta tenaga sukarela (*voluntary labour*).
- Pendanaan yang paling mendasar dan memungkinkan adalah iuran anggota. Iuran harus dapat memenuhi biaya kegiatan dasar operasional untuk menjaga independensi BPD.
- Donasi tambahan masih dimungkinkan sejauh tidak mempengaruhi kemandirian tersebut, termasuk ketergantungan pada salah satu/sebagian anggota, baik organisasi maupun individu.
- Penggalangan dana publik dimungkinkan melalui kegiatan kebudayaan dan kampanye. (misalnya: jual kaos, suvenir, kerajinan tangan, bikin pameran, pertunjukan?)
- Dana tambahan (donor dalam dan luar negeri) untuk agenda ke dalam (misalnya untuk pendidikan politik, seminar, konsolidasi).
- BPD harus memiliki *base camp* yang berfungsi sebagai kesekretariatan dan *meeting point*.
- BPD harus memiliki akses atau jaringan ke media.

Prinsip Keanggotaan dan Pengambilan Keputusan Kolektif

Anggota BPD terdiri dari:

- Organisasi rakyat
- LSM/ORNOP
- Asosiasi sipil lainnya
- Gerakan sosial
- Individu (yang tidak mewakili organisasi atau partai politik)
- Wakil Blok Politik yang berada di tingkatan bawah wilayah BPD yang bersangkutan. (Wakil blok di tingkat desa duduk sebagai anggota blok di tingkat kabupaten, dan wakil dari kabupaten juga menjadi anggota di tingkat provinsi. Begitu seterusnya).
Proses pengambilan keputusan yang sebaiknya diterapkan:
 - BPD sebisa mungkin menggunakan prinsip-prinsip *demokrasi deliberatif* untuk mengambil keputusan. (demokrasi deliberatif = musyawarah mufakat, berdasarkan adu argumen yang logis).
 - Ketika suara bulat tidak bisa dicapai, sementara keputusan harus segera diambil, maka hendaknya hal itu dilakukan berdasarkan mayoritas suara terbanyak (*voting*), misalnya dengan jumlah 2/3 suara, dari kuota forum sebesar 2/3 anggota.
 - Harus dibedakan bobot suara anggota organisasi dengan anggota individu. Dalam mengambil keputusan, setiap anggota harus mempunyai *jumlah suara proporsional*, misalnya 1 banding 10, di mana anggota individual mempunyai satu suara, sementara anggota yang berupa organisasi besar mempunyai sepuluh suara. Atau dibuat *range* 3 hingga 10 suara, tergantung besarnya organisasi.



■ Hal ini dilakukan untuk menghindari politik yang berorientasi pada individu tertentu, sekaligus juga perpecahan dalam organisasi.

■ Akan tetapi, para anggota BPD janganlah terlalu ekstrim dalam menghitung anggotanya, untuk menghindari perpecahan akibat klaim (melebih-lebihkan) jumlah anggota.

Contoh proporsi jumlah suara secara sistem yang disepakati, misalnya, dengan satuan 1 s/d 10 suara adalah seperti pada tabel berikut:

| Jumlah Anggota (orang) | Jumlah Suara |
|------------------------|--------------|
| 9.500 > | 10 |
| 8.500 – 9.499 | 9 |
| 7.500 – 8.499 | 8 |
| 6.500 – 7.499 | 7 |
| 5.500 – 6.499 | 6 |
| 4.500 – 5.499 | 5 |
| 3.500 – 4.499 | 4 |
| 2.500 – 2.499 | 3 |
| 1.500 – 2.499 | 2 |
| < 1.500 | 1 |
| Individu | 1 |

Merumuskan Agenda Blok Politik

Sekalipun agenda-agenda kegiatan BPD akan dirumuskan oleh anggotanya, secara garis besar, “tugas” atau agenda utama BPD adalah:

- (1) Melindungi demokratisasi berbasis HAM
- (2) Melakukan pendidikan politik
- (3) Memajukan pemerintahan lokal yang partisipatoris
- (4) Memajukan partisipasi perempuan

(5) Memajukan berbagai bentuk pakta sosial

(6) Memajukan pertumbuhan ekonomi yang memiliki wawasan pertanggungjawaban sosial dan keberlanjutan lingkungan

7) Membuka peluang terciptanya sistem representasi alternatif dari bawah.

BPD tidak boleh beranggotakan partai politik, serta tidak didominasi oleh partai tertentu, terlebih karena BPD –jika dimungkinkan – dapat bertransformasi menjadi partai politik. Namun pada kenyataannya, pemilu dan pilkada bisa saja menjadi momen pendorong pembentukan BPD. Maka hubungan-hubungan yang bisa dijalin antara BPD dengan partai politik adalah:

(1) Menegosiasikan kontrak politik dengan kandidat perseorang atau partai politik

(2) Memonitor kerja kandidat dan partai dan mendorong mereka untuk terus akuntabel.

(3) BPD tidak mencalonkan dirinya sendiri atau menjagokan kandidatnya, melainkan mendukung siapapun yang bekerja untuk memenuhi platform minimum (dalam kenyataan, bukankah cara seperti ini justru membuat cair? Memang harus dibuka kemungkinan untuk tidak mendukung salah satu kandidat saja, untuk memperkuat kesan ‘tidak partisan’ atau ‘bukan tunggangan’. Tetapi bisa saja ada suatu kondisi di mana ‘suara’ atau dukungan harus dikonsolidasikan ke satu orang. Apapun, BPD memang harus punya kontrak politik yang benar-benar konkret dan



dapat dipertanggungjawabkan. BPD harus punya bargain. Jadi kalau kontrak dilanggar, boikot atau protes bisa berjalan efektif.

(4) Mendukung siapapun pihak-pihak yang menyepakati kontrak politik dan bekerjasama dengan eksekutif dan administrasi politik. Misalkan dalam penyusunan anggaran, duduk sebagai komisi pengawas, dan lain-lain.

Struktur BPD

- Struktur BPD disepakati oleh kongres.

- Namun harus dipastikan terdapat seorang sekjen yang akan memimpin kepengurusan.

- Kepengurusan menjalankan keseharian dan kebijakan organisasi.

- Jika BPD meluas ke wilayah yang lebih tinggi, maka BPD-BPD lokal merupakan federasi atau konfederasi dari BPD di atasnya.

Langkah-langkah Awal

Sebagai cikal-bakal BPD yang sesungguhnya nanti, maka Kelompok Kerja yang telah terbentuk perlu melakukan serangkaian kegiatan pertemuan terbatas atau *focus group discussion* (FGD). Secara garis besar, panduan dasarnya adalah sebagai berikut:

{1) Peserta FGD

Diseleksi berdasarkan:

- Ketertarikan dan potensi suatu kelompok dan individu untuk terlibat dalam BPD.

- Rekam-jejak (*track record*) yang baik, setidaknya selama 5 tahun terakhir.

- Rekam-jejak orang-orang atau organisasi yang memiliki komitmen terhadap demokrasi (lebih rinci: disamakan dengan kriteria anggota BPD itu sendiri).

- FGD dapat dilakukan sehari-semalam, beberapa hari, tergantung dari diskusi yang berkembang.

Namun dihindari untuk berkepanjangan (lebih dari 1 minggu), mengingat masih banyak pekerjaan/tahapan yang harus dilakukan, serta terbatasnya pendanaan.

(2) Acara & Topik FGD

(a) Presentasi kelompok inisiatif

(b) Butir-butir pokok yang dianalisis secara kritis. Pertanyaan-pertanyaan kunci nya antara lain:

- Apa sajakah persamaan-persamaan yang dimiliki oleh kelompok alternatif?

- Bagaimana para pelaku (aktor) utama, terkait dengan partisipasi politik yang lebih luas, peran/keterlibatan perempuan dalam politik, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan, pertumbuhan (ekonomi) yang menunjang jaminan sosial, pemerintahan partisipatoris, dan sebagainya (silah tambahkan berdasarkan diskusi selama FGD).

- Apa sajakah yang sering menjadi perdebatan/pertentangan di antara para aktor alternatif? Apakah perdebatan/pertentangan tersebut cukup mendasar, sehingga harus dituntaskan terlebih dahulu? Atau masih bisa dikesampingkan?

(c) Pembentukan Blok Politik

Jika forum menyepakati pembentukan Blok Politik, maka dibentuk kelompok kerja yang akan mempersiapkan forum yang lebih besar/kongres. ❖



Sesi 12

RENCANA TINDAK-LANJUT & EVALUASI PELATIHAN

TUJUAN

- Peserta memberikan komitmen dan mampu menyusun rencana tindak-lanjut pasca pelatihan.
- Peserta memberikan umpan-balik tentang efektivitas pelaksanaan dan manfaat pelatihan.

POKOK BAHASAN

- Rencana Tindak Lanjut Pasca Pelatihan
- Evaluasi Efektivitas dan Manfaat Pelatihan

METODE & MEDIA

- Diskusi kelompok
- Diskusi Pleno

BAHAN & PERALATAN

Papan tulis, kertas plano, spidol, LCD-proyektor + komputer.

WAKTU

2 jam efektif (1 sesi)

PROSES

- (1) Pengantar singkat tentang tujuan dan pokok bahasan sesi ini.
- (2) Minta peserta kembali ke kelompok kecil berdasarkan asal daerahnya masing-masing. Selama 30-45 menit, setiap kelompok

menyusun ‘Rencana Aksi Pembentukan Blok Politik Demokratik’ di daerah (kabupaten/kota) nya masing-masing. Jelaskan bahwa rencana tersebut tidak harus sangat rinci, cukup pokok-pokoknya saja:

- Apa yang akan dikerjakan? (Kegiatan – sesuai dengan urutan langkah ke arah pembentukan BPD yang telah dibahas selama pelatihan ini)

- Kapan? (Jadwal tentatif)

- Oleh siapa dan siapa penanggungjawabnya? (Organisasi)

- Berapa biaya dan darimana sumbernya? (Anggaran)

(3) Presentasi rencana tiap kelompok, masing-masing sekitar 5-10 menit per kelompok. Kelompok lain boleh bertanya dan memberi saran perbaikan.

(4) Setelah semua rencana kelompok dipresentasikan, ajukan pertanyaan:

- Apa yang dapat dikontribusikan oleh DEMOS sendiri dalam keseluruhan rencana tersebut?

- Bagaimana bentuk hubungan kordinasi dan komunikasi antar setiap kelompok (kabupaten/kota) dengan DEMOS?

- Dan hal-hal teknis lainnya lagi yang dianggap perlu.

(5) Minta seluruh peserta, masing-masing sekitar 2-3 menit per orang, memberi umpan-balik terhadap efektivitas dan manfaat pelatihan ini:

- Apakah pelatihan ini memenuhi harapan mereka? Apakah menurut mereka pelatihan ini memang relevan dan mencapai tujuannya?

- Apa manfaat terpenting dari pelatihan ini bagi mereka?

- Bagaimana dengan metodologi penyajian materi pelatihan?

- Bagaimana dengan teknis pelaksanaannya?

- Apa saran mereka?

(6) Tutup sesi ini dengan kesimpulan umum, sekaligus menutup kseseluruhan acara pelatihan. ❖

Jadi, gimana... rencana
kalian mau bikin Blok atau
Non-Blok?



■ PUSTAKA

- D. Beetham, S. Bracking, L. Kearton, dan S. Weir (eds)., *International IDEA Handbook and Democracy Assessment* (The Hague: Kluwer Law International, 2002).
- DPR-RI, 'UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh' (Jakarta: 2006).
- Priyono, AE., Willy Purna Samadhi, Olle Törnquist, *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta-Yogyakarta: PCD Press, 2007).
- Priyono, AE., Willy Purna Samadhi, Olle Törnquist, et.al., *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan di Indonesia* (Jakarta: DEMOS, 2007, edisi revisi).
- Tim DEMOS, 'Laporan Awal dan Ringkasan Eksekutif Resurvei 2007' (Jakarta: DEMOS, 2007). Naskah laporan bisa diunduh di situs <www.demosindonesia.org>
- Tim DEMOS, 'Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Tentang Demokrasi Berbasis Hak Asasi Manusia yang Bermakna di Aceh Pasca MoU Helsinki'; monograf, 2007.
- Tim DEMOS, 'Pandan Survei Penilaian Situasi Demokrasi di Tingkat Lokal'; dalam proses penerbitan, 2009.
- Transparency International, ringkasan laporan tahunan 2007 dalam: <www.ti.or.id>

■ CATATAN-CATATAN:

